



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI LEBANON TERHADAP ISRAEL
SETELAH Menguatnya PERAN HISBULLAH DALAM
PEMERINTAHAN LEBANON
(2006 – 2009)**

SKRIPSI

**SUTAN BATARA P. PANE
0905080261**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI LEBANON TERHADAP ISRAEL
SETELAH MENGUATNYA PERAN HISBULLAH DALAM
PEMERINTAHAN LEBANON
(2006 – 2009)**

SKRIPSI

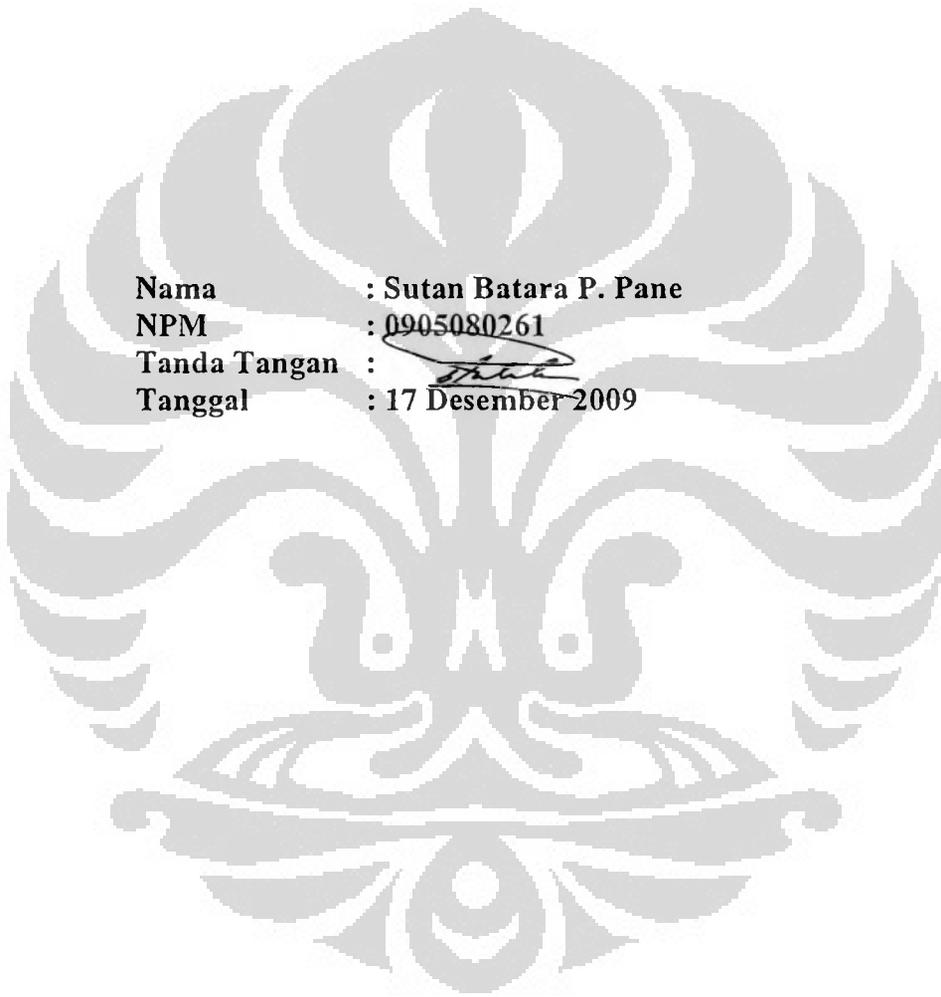
**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**

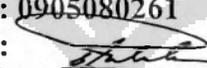
**SUTAN BATARA P. PANE
0905080261**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Sutan Batara P. Pane
NPM : 0905080261
Tanda Tangan : 
Tanggal : 17 Desember 2009

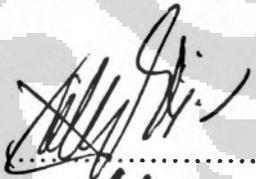
HALAMAN PENGESAHAN

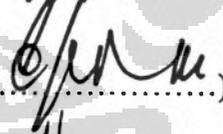
Skripsi ini diajukan oleh

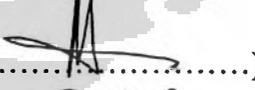
Nama : Sutan Batara P. Pane
NPM : 0905080261
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Kebijakan Luar Negeri Lebanon Terhadap Israel
Setelah Menguatnya Peran Hisbullah Dalam
Pemerintahan Lebanon (2006 – 2009)

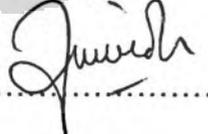
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Zainuddin Djafar, Ph.D.  (.....)

Penguji : Edy Prasetyono, Ph.D.  (.....)

Ketua Sidang : Dra. Nurani Chandrawati, M.Si  (.....)

Sekretaris Sidang : Aninda R. Tirtawinata, M.LITT  (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Isu mengenai kawasan Timur Tengah merupakan salah satu isu yang paling banyak dibahas oleh masyarakat dunia, dan khususnya isu yang paling menarik perhatian adalah persetujuan antara negara-negara Arab dengan Israel. Lebanon yang merupakan salah satu negara yang paling banyak mengalami konfrontasi militer dengan Israel, sedang mengalami perubahan struktur politik domestic, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perpolitikan luar negerinya pula. Kemunculan Hisbullah sebagai aktor baru yang ikut mempengaruhi dinamika perpolitikan di negara Lebanon maupun di kawasan Timur Tengah, telah mengubah pandangan banyak orang mengenai kekuatan absolut Israel maupun mengenai peran serta aktor-aktor *non-state* dalam perpolitikan di Lebanon.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melihat bagaimana Hisbullah telah mempengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri Lebanon terhadap Israel, khususnya setelah Hisbullah terintegrasi dalam pemerintahan Lebanon secara legal. Skripsi ini juga akan melihat apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Hisbullah dalam berperan dalam pemerintahan Lebanon.

Semoga skripsi ini menjadi manfaat bagi perkembangan studi keamanan dalam hubungan internasional, khususnya dalam kaitannya mengenai peran serta *non-state actors* dalam mempengaruhi kebijakan sebuah negara, Terima Kasih.

Depok, 17 Desember 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diberi judul Kebijakan Luar Negeri Lebanon Terhadap Israel Setelah Menguatnya Peran Hisbullah Dalam Pemerintahan Lebanon (2006 – 2009). Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, sebab tanpa dukungan dan bantuan tersebut skripsi ini akan sangat sulit untuk diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT, karena tanpa izin-Nya, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Mas Zainuddin Djafar, Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi dalam waktu yang sangat singkat.
3. Mas Edy Prasetyono, Ph.D, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi Penulis. Kritik dan sarannya yang membangun sangat membantu.
4. Mbak Dra. Nurani Chandrawati, M.Si, selaku ketua sidang dan juga ketua Program S1 Hubungan Internasional FISIP UI, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing menguji, serta membantu Penulis dalam menyelesaikan seluruh proses pengajuan skripsi. Maaf apabila saya merepotkan selama ini, Mbak.
5. Mama dan Ayah, yang telah memberikan dukungan penuh selama proses penulisan skripsi. Terima kasih karena kalian tetap mendukung meskipun Penulis telah menyusahkan dan merepotkan kalian selama ini.
6. Kedua adik Penulis, Tirta dan Chako, yang selama ini menghibur Penulis ketika pikiran sedang buntu, dan berebut komputer untuk *browsing* di rumah.

7. Keluarga besar HI 05 yang telah menemani Penulis selama empat tahun lebih. Kepada Tanti, Ainan, Mario, Anggi, Ayu, Ine, Bambang, Anas, Baskoro, Gera, Pandu, Daniel, Via, Vira, Pipit, Nety, Listie, Fika, Ical, Babe, Yudha, Pocil, Desca, Hans, Bear-rhei, Ranee, Ucan, terima kasih untuk bercandaan, bantuan, serta persahabatan kalian selama ini. Penulis tahu bahwa ia tidak pernah luput dari salah, oleh karena itu Penulis sangat berterima kasih telah memiliki teman-teman yang baik seperti kalian.
8. Sahabat-sahabat baik Penulis selama ini: Topik, Nteph, April, Japra, Cabi, Mirza, serta Yobeh. Terima kasih telah menjadi penghibur lara ketika Penulis sedang sedih dan tidak semangat mengerjakan skripsi. Pertemanan kalian selama 8 tahun ini akan selalu terjaga. *By the way*, akhirnya saya menyusul kalian semua!!!
9. Keluarga besar Abang None Jakarta Selatan, khususnya kepada Adit dan Tyo (dua sahabat terbaikku), Andre, Dita, Deasy, Chaca, Rhein (*thank you for the support, bray!*), Yudy (terima kasih telah menjadi adik yang membantu), Bimo (*the fun is just beginning!*), serta semua teman-teman yang tidak bisa semuanya disebutkan.
10. Keluarga besar Paskibra 34, khususnya kepada Angkatan XVI, angkatan Penulis yang berisikan makhluk-makhluk unik yang pernah Penulis temui: Acil, Anis (terima kasih atas teguran kalian selama ini apabila penulis malas mengerjakan skripsi), Adis, Ika, Mela, Yuli, Iswah, Adi, Ocal, Reni, Nurul, Inez, dan Putri.
11. Teman-teman terdekat Penulis yang selama ini berbagi cerita, membantu dalam tugas, serta bersenang dan bersedih bersama: Pito, Rio, Rilis, dan Wiwit (*my JJ, I love you guys!*), Naut (terima kasih karena telah menjadi teman yang tidak pernah Penulis miliki), Glory (*I've done it dude!*). Terima kasih untuk kalian semua.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan alangkah baiknya apabila penulis mendapatkan saran dan kritik untuk menjadi lebih baik dikemudian hari.

Depok, 17 Desember 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutan Batara P. Pane
NPM : 0905080261
Program Studi : Sarjana Reguler
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

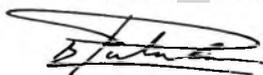
**Kebijakan Luar Negeri Lebanon Terhadap Israel Setelah Menguatnya Peran
Hisbullah Dalam Pemerintahan Lebanon (2006 – 2009)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 5 Januari 2010

Yang menyatakan



(Sutan Batara P. Pane)

ABSTRAK

Nama : Sutan Batara P. Pane
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kebijakan Luar Negeri Lebanon Terhadap Israel Setelah
Menguatnya Peran Hezbollah Dalam Pemerintahan Lebanon
(2006 – 2009)

Skripsi ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Lebanon terhadap Israel, khususnya setelah Hezbollah meningkatkan perannya dalam pemerintah Lebanon. Hezbollah yang berawal sebagai gerakan militer radikal, telah berkembang menjadi sebuah *state-building movement*, lalu menjadi sebuah partai politik yang pada akhirnya memiliki peran dalam perumusan kebijakan luar negeri Lebanon. Penulis akan mencoba melihat bagaimana Hezbollah yang meskipun tidak memiliki hak veto, bisa ikut mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Lebanon terhadap Israel. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi literatur.

Kata kunci:
Lebanon, Hezbollah, *state-building movement*, Israel

ABSTRACT

Name : Sutan Batara P. Pane
Study Program : International Relations
Title : Lebanon's Foreign Policy Towards Israel After the
Strengthening of Hezbollah's Role in the Lebanese Government
(2006-2009)

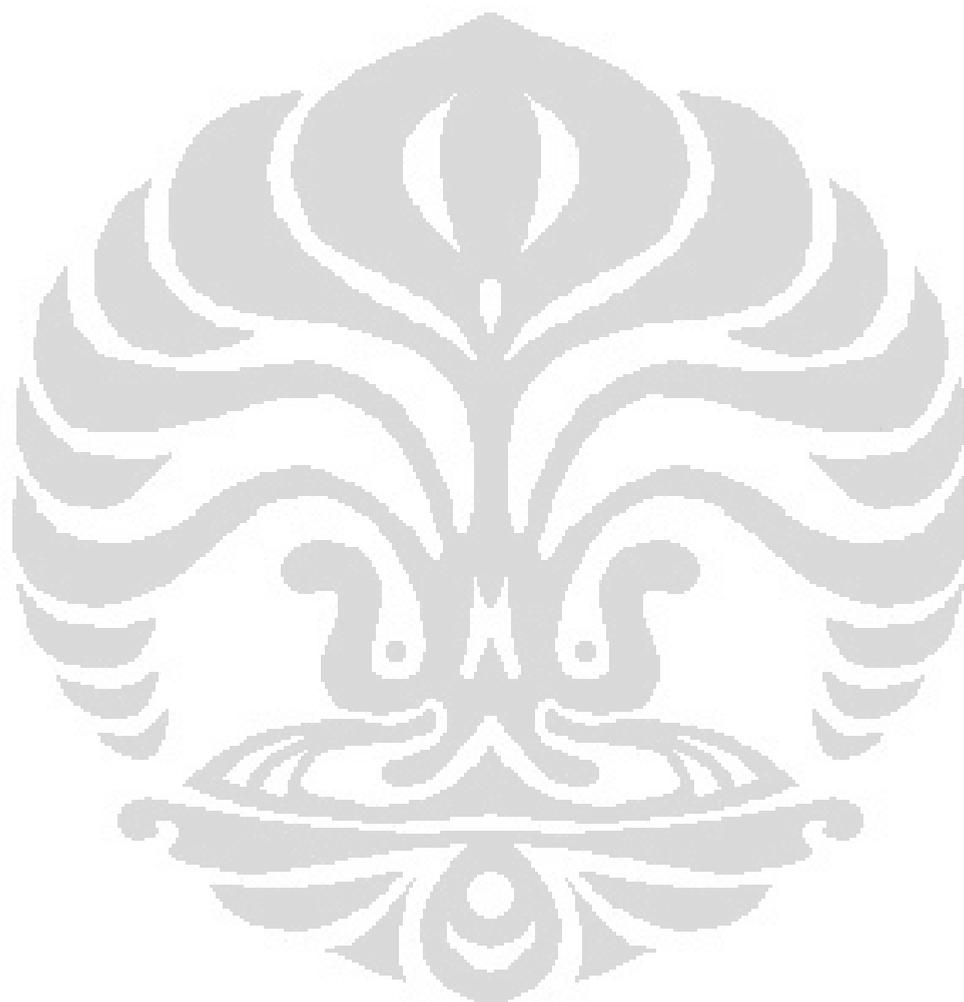
The focus of this study is about the Lebanese foreign policy towards Israel, especially after Hezbollah increased its role in the Lebanese government. Hezbollah which started out as a radical military movement, has developed into a state-building movement, which afterwards turned into a political party that finally has the role in making the Lebanese foreign policy. The writer will try to look how Hezbollah, which doesn't have a veto power, can also affect the process of Lebanese foreign policy making towards Israel. This is a Quantitative approach study with literature study.

Key words:
Lebanon, Hezbollah, state-building movement, Israel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka	7
• Literatur mengenai Posisi Hisbullah pasca Perang Israel-Hisbullah 2006	7
• Literatur mengenai Sistem Konfesionalisme dan Sektarianisme di Lebanon	10
1.5. Kerangka Teori	13
1.5.1. Konsep <i>State-building Movement</i>	13
1.5.2. Konsep Kebijakan Luar Negeri	15
1.6. Hubungan Antar Variabel	17
1.7. Asumsi	18
1.8. Hipotesa	18
1.9. Model Analisa	19
1.10. Metode Penelitian	19
1.11. Sistematika Penulisan	20
2. PERKEMBANGAN HISBULLAH DI LEBANON	21
2.1. Sejarah Singkat Berdirinya Hisbullah	21
2.2. Peran Hisbullah Sebagai Sebuah <i>State-building Movement</i>	24
2.3. Analisa Konsep <i>State-building Movement</i> Terhadap Program Sosial Hisbullah	28
2.4. Perubahan Status Hisbullah Menjadi Partai Politik	33
3. HISBULLAH DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI LEBANON	40
3.1. Kebijakan Luar Negeri Lebanon Sebelum Perang 2006	41
3.2. Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Hisbullah Dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri Lebanon	44
3.2.1. Iran	44
3.2.2. Israel	46
3.2.3. Amerika Serikat	50
3.2.4. Palestina	53

3.3. Pengaruh Hisbullah Dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri Lebanon Terhadap Israel	55
4. KESIMPULAN	62
DAFTAR PUSTAKA	66



DAFTAR LAMPIRAN

Peta Lebanon	70
Teks Ta'if Agreement	71
Teks Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1559	80
Teks Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1701	82
Daftar Perkembangan Kekuatan Militer Hisbullah di Lebanon	86



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang selalu mengalami dinamika internasional yang tidak terduga, penuh dengan konflik bersenjata baik antar negara-negara di kawasan ini maupun dengan negara-negara besar yang memiliki kepentingan tertentu di kawasan ini, khususnya mengenai isu energi. Lebanon merupakan salah satu negara yang kerap mengalami konflik bersenjata, dimulai dari perang sipil yang selama ini terjadi di negara ini¹, maupun konflik bersenjata dengan negara tetangganya yaitu Israel. Lebanon juga sangat dikenal sebagai sebuah negara yang paling sering dijadikan sebagai medan perang oleh negara-negara Timur Tengah, khususnya apabila peperangan tersebut menyangkut isu perseteruan antara Israel dan Palestina. Kerumitan kasus di Lebanon juga ditambah dengan kemunculan kelompok Hisbullah di negara ini, yang kita kenal sebagai agen perpanjangan tangan Iran untuk melakukan perlawanan terhadap Israel.

Hisbullah pada khususnya adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi perpolitikan dan kehidupan sosial di Lebanon, dengan kekuatan politik, militer, maupun basis sosialnya yang begitu besar. Hisbullah adalah sebuah kelompok *sub-state* berbasis militer yang secara tidak langsung menantang otoritas Lebanon itu sendiri dengan cara mendirikan sebuah struktur *power* paralel di dalam negara tersebut². Keberadaan dan kekuatan Hisbullah itu sendiri seakan tidak lagi dapat dipungkiri oleh baik pemerintah Lebanon maupun masyarakatnya. Dengan aliran agama Shi'ah yang kuat sebagai basis gerakannya, Hisbullah telah melakukan berbagai tindakan kontroversial yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Lebanon, khususnya dengan berbagai operasi-operasi militer dan penyerangan-penyerangan terhadap Israel, negara yang dianggap

¹ Lebanon dikenal sebagai salah satu negara dengan sejarah perang sipil yang cukup lama, berlangsung selama hampir 15 tahun, dengan korban lebih dari 150.000 jiwa. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Alfred B. Prados, "Lebanon: Update" dalam *CRS Issue Brief for Congress*, 16 Maret 2006, hlm. 1-16.

² Graham Usher, "Hezbollah, Syria, and the Lebanese Elections" dalam *Journal of Palestine Studies*, Vol. 26, No. 2 (Winter 1997), hlm. 59-67.

sebagai musuh utama dari negara-negara Islam. Lebanon yang selama ini berusaha untuk menempuh jalur damai dengan Israel kerap gagal dan justru mendapatkan reaksi yang sebaliknya diakibatkan oleh tindakan-tindakan sepihak dari Hisbullah.

Meskipun demikian, Lebanon terus berkembang secara politik, ekonomi, maupun sosial. Perkembangan yang dilalui oleh Lebanon bisa dikatakan tidak banyak dan cepat, namun secara perlahan, perekonomian dan sistem politik di Lebanon mengalami perubahan, khususnya sangat dirasakan pasca perang besar yang terjadi pada tahun 2006 antara Israel dengan Hisbullah yang terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Perkembangan ekonomi Lebanon sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Hisbullah, yang telah melakukan rekonstruksi secara besar di wilayah Lebanon Selatan, yang merupakan wilayah kekuasaannya³. Aliran dana yang tidak kecil terus diberikan oleh Iran untuk tujuan rekonstruksi serta donasi kepada keluarga-keluarga korban perang di wilayah tersebut⁴. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Hisbullah merupakan suatu hal yang sangat tidak diduga oleh pemerintah Lebanon, karena pada awalnya Hisbullah merupakan sebuah kelompok *non-state* yang murni berbasis militer dan memfokuskan diri pada penyerangan-penyerangan terhadap Israel.

Kemunculan dan perkembangan peran dari Hisbullah tidak terlepas dari kondisi pemerintah Lebanon yang pada saat itu mengalami kondisi yang sangat rentan dan tidak kredibel. Tahun 2006 merupakan tahun yang sangat buruk bagi pemerintah Lebanon, di mana posisi kepala negara kosong, pemerintahan yang hancur karena berbagai hal seperti permasalahan korupsi, pembunuhan tokoh-tokoh politik secara beruntun⁵, bahkan segregasi religius yang semakin memburuk dalam kehidupan sosial maupun politik.

³ George Emile Irani, "After the Lebanon War: *Quo Vadis* the Middle East" dalam *Real Instituto Elcano*, Area: Mediterranean & Arab World – ARI 94/2006, 1-6.

⁴ Iran mengeluarkan sekitar 10% dari pendapatan negaranya untuk kemajuan usaha Hisbullah, suatu hal yang dapat dikatakan cukup kontroversial, mengingat hal ini mengundang banyak protes di dalam Iran sendiri karena seakan memprioritaskan pengeluaran ini di atas kesejahteraan sosial di dalam negeri.

⁵ Lebih dari 20 orang tokoh penting di Lebanon tewas terbunuh karena bom menggunakan mobil, di mana pihak yang melakukan pembunuhan sangat sulit untuk diketahui, namun mengacu pada keterlibatan tidak langsung dari pihak Suriah yang sebelumnya memiliki pengaruh yang begitu besar di Lebanon. Untuk detail lebih jelas mengenai pembunuhan-pembunuhan ini dapat

Hisbullah mulai memasuki kancah perpolitikan Lebanon pasca perang besar dengan Israel di tahun 2006. Akhir perang yang dianggap sebagai kemenangan oleh Hisbullah tersebut mengubah cara pandang kelompok ini terhadap negara tempatnya berkembang, di mana mereka melihat bahwa pemerintahan yang lemah dan kurang kredibel bisa disempurnakan oleh keterlibatan mereka secara politik. Salah satu cara yang paling efektif bagi mereka untuk ikut terjun dalam kancah perpolitikan adalah dengan mengikuti pemilihan umum dan menyatakan diri sebagai sebuah partai di Lebanon⁶. Usaha Hisbullah ini terbilang tidak mudah karena banyak pihak yang mencurigai motif dari perubahan pendekatan yang dilakukan oleh kelompok ini, bukan hanya dari dalam Lebanon itu sendiri, tetapi dari Israel pun demikian. Bahkan Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai pendukung utama Israel pun menaruh kecurigaan yang besar, melihat banyak potensi-potensi yang tidak terduga apabila Hisbullah benar masuk dalam pemerintahan Lebanon. Sebaliknya, Iran sebagai penyokong utama Hisbullah melihat hal ini sebagai sebuah usaha yang akan membuka jalan yang lebih lebar bagi mereka untuk melakukan *proxy war* dengan lebih lancar terhadap Israel.

Segregasi religius pun sangat dirasakan dalam pemerintahan Lebanon, di mana kelompok-kelompok agama di Lebanon memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang sudah ditentukan. Hal ini dikenal dengan sistem konfesionalisme dan sektarianisme, dua sistem yang dapat dikatakan unik dan hanya di Lebanon berkembang hingga kini. Sistem ini dapat dijabarkan secara singkat sebagai sebuah sistem yang mengedepankan multikulturalisme dan keberagaman agama dalam masyarakatnya, yang juga terwujud dalam sistem pemerintahannya, di mana pada akhirnya politik sangat dipengaruhi oleh agama⁷. Posisi dalam pemerintahan terbagi dengan sangat sistematis pada masing-masing kelompok agama, contoh yang paling konkrit adalah di mana posisi presiden

mengakses "Timeline: Lebanon – A Chronology of Key Events" dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/819200.stm.

⁶ Augustus R. Norton, "The Role of Hezbollah in Lebanon Domestic Politics" dalam *The International Spectator*, Vol. 42, No. 4, Desember 2007, hlm. 475.

⁷ Imad Harb, "Lebanon's Confessionalism: Problems and Prospects" dalam *USIPeace Briefing*, Maret 2006, diakses dari <http://www.usip.org/resources/lebanons-confessionalism-problems-and-prospects>.

selalu ditempati oleh seorang Kristen Maronit, seorang perdana menteri yang beragama Islam Sunni, serta kursi parlemen yang terbagi rata antara Maronit, Sunni, Shi'ah, dan juga Druze. Sistem ini telah melekat sedemikian rupa sehingga sangat sulit untuk mengubahnya kecuali dengan adanya revolusi ataupun kudeta dari salah satu kelompok tersebut, suatu hal yang sangat jarang ditemui di Lebanon.

Sistem konfesionalisme yang telah memperumit terciptanya demokrasi penuh di Lebanon telah mempersulit proses-proses pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan-kebijakan politik di Lebanon, khususnya karena tidak ada kelompok agama yang ingin dirugikan maupun tidak diikutsertakan dalam proses-proses perumusannya. Pemerintah Lebanon mengalami krisis kepemimpinan ini hingga pertengahan tahun 2008, meskipun Emile Lahoud mengisi posisi presiden namun kondisi Lebanon tidak membaik dan pemerintah masih dapat dikatakan kurang kredibel menangani isu-isu politik maupun sosial dan ekonomi. Pada Mei 2008, posisi presiden diisi oleh Michel Sulaeman, seorang mantan jenderal beragama Kristen Maronit, yang dianggap kredibel untuk membawa perubahan kepada kondisi pemerintahan Lebanon, karena beliau merupakan kandidat presiden yang disetujui oleh kedua pihak berposisi dalam pemerintahan Lebanon, yaitu koalisi 14 Maret dan koalisi 8 Maret⁸.

Sebagai presiden terpilih baru, Michel Sulaeman diharapkan bisa membentuk sebuah kabinet dan pemerintahan yang bersatu, yang tidak membedakan kelompok agama maupun etnis. Pembentukan pemerintahan bersatu ini cukup sulit, mengingat bahwa sistem konfesionalisme dan sektarianisme masih kuat mempengaruhi perpolitikan Lebanon, dan cenderung sulit untuk menghapuskan pembagian posisi yang sudah teratur selama ini di antara kelompok-kelompok agama dan etnis di Lebanon.

Kemajuan yang dialami oleh Lebanon ini pun tidak terlepas dari peristiwa kemenangan yang dialami oleh Hisbullah pada tahun 2006 ketika mengalami konfrontasi dengan Israel. Perpolitikan Lebanon sempat mengalami kebuntuan

⁸ Kedua koalisi ini merupakan dua koalisi utama yang saling berposisi dalam pemerintah Lebanon maupun dalam pemilihan umum di Lebanon. Untuk keterangan lebih jelas mengenai kedua koalisi dapat dilihat dalam Dimitri Dombret, "The Lebanese Elections: The Defeat of Hezbollah – Is This a New Turn of Events for the Land of Cedars?" dalam *ESISC Analysis*, 11 Juni 2009, hlm. 1-5.

politik, di mana baik koalisi 14 Maret maupun 8 Maret terus bersikeras untuk memegang posisi dominan dalam pemerintahan, khususnya didasari oleh kekuatan massa yang dimiliki tiap kelompok. Kebuntuan politik ini menemui akhir setelah berlangsung selama 18 bulan, ketika Hisbullah dan koalisi 8 Maret yang disokongnya muncul sebagai pihak yang dominan dan berhasil menekan pihak oposisi untuk akhirnya setuju membentuk sebuah pemerintahan bersama⁹. Perubahan konstelasi politik ini telah memperlihatkan bahwa Hisbullah memiliki peran yang semakin signifikan dalam perpolitikan Lebanon, terutama di mana sekarang Hisbullah dan Koalisi 8 Maret memiliki 57 kursi dalam parlemen, serta kekuatan veto atas kebijakan-kebijakan domestik maupun internasional di masa depan.

Dengan dibentuknya pemerintahan yang baru, kondisi *status quo* yang selama ini ada di Lebanon, yaitu konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Arab Saudi yang dialami oleh koalisi 8 Maret, ataupun konfrontasi dengan Iran dan Suriah yang dialami oleh koalisi 14 Maret, seakan tidak lagi benar-benar terjadi, mengingat kedua isu tersebut telah terintegrasi dalam sebuah pemerintahan baru yang bersatu dan memfokuskan diri pada perbaikan hubungan internasional dengan negara-negara tersebut¹⁰. Namun satu hal yang justru semakin merisaukan adalah konfrontasi dengan Israel yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Hal ini juga didukung oleh keterlibatan Hisbullah yang lebih besar dalam perpolitikan Lebanon, yang tidak menginginkan diadakannya hubungan damai dengan Israel.

1.2. Permasalahan

Peran serta Hisbullah dalam perpolitikan Lebanon merupakan suatu hal yang pada awalnya tidak terduga, karena Hisbullah hanya dianggap sebagai salah satu dari sekian kelompok berbasis agama yang terdapat di Lebanon. Kenyataannya adalah Hisbullah muncul sebagai salah satu kekuatan militer *non-state* yang terkuat dan kini juga ikut berpartisipasi dalam perpolitikan Lebanon

⁹ Alex Chadwick, "Hezbollah's Role in Lebanon's Government – Interview with Amal Saad Ghorayeb, July 27, 2009" diakses dari <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5554992>.

¹⁰ *Ibid.*

dalam bentuk partai politik. Tanpa disadari, keberadaan dan keterlibatan Hisbullah selama ini membawa dampak yang besar terhadap rakyat Lebanon, khususnya di wilayah selatan.

Dukungan dari pemerintah Lebanon kepada Hisbullah telah terbukti dengan dikeluarkannya sebuah pernyataan kebijakan tertulis yang menyebutkan bahwa Hisbullah diperbolehkan untuk mempertahankan senjatanya dan meneruskan perlawanannya terhadap Israel untuk memperjuangkan wilayah-wilayahnya yang diperebutkan. Menteri Penerangan Lebanon pada masa itu, Tarek Mitri, mengatakan bahwa pernyataan kebijakan ini bukan manipulasi dari Hisbullah, karena jelas bahwa Hisbullah kini adalah salah satu bagian dari pemerintah, dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah keputusan yang disetujui oleh seluruh masyarakat Lebanon, atas nama kepentingan rakyat Lebanon itu sendiri¹¹.

Dengan didasari penjabaran latar belakang di atas, maka jelas bahwa kebijakan luar negeri Lebanon sejak Hisbullah masuk dalam perpolitikan mengalami perubahan. Pertanyaan yang akan dicoba untuk dijawab dalam skripsi ini adalah **“Bagaimanakah Kebijakan Luar Negeri Lebanon terhadap Israel setelah peran Hisbullah semakin kuat dalam Pemerintah Lebanon selama periode 2006-2009?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Topik dan pertanyaan permasalahan dalam skripsi ini cukup penting untuk diangkat karena kemunculan Hisbullah dalam kancah perpolitikan Lebanon merupakan sebuah hal yang cukup unik dalam sistem internasional ini, di mana sebuah entitas militer yang pada awalnya murni dibentuk sebagai “barisan depan” pasukan anti-semit, bisa ikut terjun ke dalam perpolitikan sebuah negara, bahkan ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi dan politik negara tersebut. Selain itu, konflik yang terjadi antara Hisbullah dan Israel ini mungkin saja akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan isu Israel-Palestina yang saat ini semakin samar karena konflik *state vs non-state actor* ini.

¹¹ Edward Yerenian, “Lebanese Cabinet Approves Policy Statement” diakses dari www.voanews.com/english/2008-08-05-voa9.cfm.

Penulisan ini pada umumnya bertujuan untuk mencari tahu dengan lebih jelas mengenai interaksi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, lebih spesifiknya, interaksi yang terjadi antara Lebanon dengan Israel, khususnya karena adanya keterlibatan yang lebih besar dari Hisbullah. Bentuk interaksi ini cukup khusus dan penting untuk dibahas, karena sangat jarang bisa ditemukan hubungan atau interaksi di mana sebuah *non-state entity* bisa mempengaruhi dinamika hubungan internasional antar negara sedemikian rupa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu sedikit lebih banyak, mengapa Hisbullah yang kita kenal sangat kuat secara fisik dan juga telah memiliki dukungan yang besar dari negara-negara sponsornya, tidak mengambil alih Lebanon melalui kekuatan fisik tersebut. Hisbullah memilih untuk masuk ke dalam pemerintah dan berusaha untuk mempengaruhi dinamika politik dan hubungan internasional Lebanon dari dalam, sesuatu yang cukup membingungkan karena sangat jarang terdapat sebuah *non-state actor* khususnya sebuah *sub-state entity* dengan kapabilitas militer yang sangat kuat, tidak melakukan penyerangan fisik terhadap negara tempatnya berkembang.

Penulisan ini bisa dikatakan signifikan karena jenis interaksi domestik maupun internasional yang terjadi di kawasan Timur Tengah merupakan suatu hal yang harus didalami dengan menyeluruh untuk dipahami, khususnya antara Israel-Lebanon-Hisbullah, yang selama ini bisa dikatakan memiliki bentuk hubungan yang sangat dinamis dan selalu berubah-ubah. Dinamika di negara ini masih cenderung sulit untuk dipahami karena mengalami perubahan-perubahan peristiwa yang tidak terduga, dan untuk memahaminya dengan lebih baik kita harus bisa mengenal Lebanon dari situasi domestiknya. Penelitian ini juga cukup penting karena hubungan antara Israel dan Hisbullah juga akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap isu Israel-Palestina yang hingga kini terus berkembang.

1.4. Tinjauan Pustaka

- **Literatur mengenai Posisi Hisbullah pasca Perang Israel-Hisbullah 2006**
Perang antara Hisbullah dengan Israel pada tahun 2006 telah membawa begitu banyak perubahan terhadap tatanan kehidupan sosial

maupun politik di Lebanon, khususnya karena sejak saat itu Hisbullah memiliki peran yang signifikan dalam kedua sektor ini. **George Emile Irani** dalam tulisannya “**After the Lebanon War: QuoVadis The Middle East**” menuliskan bahwa Hisbullah mendapatkan kesuksesan dalam meraih posisinya seperti saat ini karena tidak terlepas dari peranan Iran dan Suriah. Kedua negara ini menjadi donatur utama untuk gerakan ini, khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga Hisbullah dapat membuat jaringan institusi yang kuat dan luas dalam memenuhi segala kebutuhan sosial dan humaniter masyarakat Lebanon, khususnya di wilayah selatan¹².

Hisbullah bisa berkembang dengan demikian pesat karena Lebanon memiliki satu kelemahan fatal, yaitu pemerintahan pusat yang lemah. Negara ini telah membuka sebuah titik kosong yang menyebabkan banyak kelompok-kelompok bersenjata untuk mendirikan apa yang disebut sebagai sebuah *sub-state* atau negara di dalam negara. Kelompok-kelompok bersenjata ini pun tidak akan bisa berdiri tanpa dukungan dari pihak-pihak kuat yang memiliki sumber daya untuk menyokongnya, dalam kasus Hisbullah, adalah Iran. Melihat bahwa Lebanon memiliki komunitas Shi’ah yang sangat besar, Iran yang berbasiskan Islam Shi’ah memiliki keyakinan yang besar untuk memperluas pengaruh dan ideologinya di negara tersebut. Tujuan terpendamnya adalah untuk memperluas perlawanannya terhadap Israel, negara yang telah memiliki dukungan dari Amerika Serikat sedemikian besar dan dirasakan sebagai duri dalam negara-negara muslim di kawasan Timur Tengah¹³. Persenjataan dan juga sumber daya ekonomi Hisbullah mayoritas berasal dari Iran, yang membuat Hisbullah sebagai kelompok bersenjata terbesar di Lebanon, bahkan di Timur Tengah.

Perang pada tahun 2006 dengan Israel membawa begitu banyak perubahan di Lebanon, khususnya ketika dilihat bahwa perang ini adalah konfrontasi terlama yang pernah berlangsung antara Israel dengan sebuah kelompok *non-state*. Hasil akhir yang dinyatakan sebagai kemenangan oleh Hisbullah telah membawa beberapa efek yang cukup besar, yaitu: (1) bukti

¹² Irani, *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid.*

bahwa dominasi Sunni telah menurun dan Shi'ah telah bangkit sebagai kekuatan baru yang bisa melindungi bahkan menjamin kesejahteraan masyarakat di Lebanon, (2) kemenangan ini telah mendongkrak semangat perjuangan beberapa kelompok lain di Timur Tengah seperti Hamas di Palestina dan Persaudaraan Muslim di Mesir dan Yordania, dan (3) kekalahan Israel telah memaksa negara-negara Barat untuk mengubah metode pendekatan mereka terhadap kelompok-kelompok *sub-state* yang cenderung militan di Timur Tengah. Namun Hisbullah juga dihadapkan dengan beberapa hal dengan kemenangan ini, seperti nasib mereka ke depannya sebagai sebuah instrumen perpanjangan tangan Iran, atau menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari Lebanon baru yang akan ikut mereka bentuk¹⁴. Pilihan tersebut hingga saat ini masih dapat dikatakan rancu, karena Iran belum melepas pengaruhnya terhadap Hisbullah, sedangkan Hisbullah telah menjadi salah satu bagian integral dari masyarakat Lebanon.

David Menashri dalam “After the War in Lebanon: Iranian Might and Its Imitations” lebih banyak melihat bagaimana Lebanon dan Hisbullah tidak pernah terlepas dari pengaruh Iran sebagai donatur dan penyokong utamanya. Iran sebelum perang pada tahun 2006 terjadi, sudah dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan regional yang sangat besar, bahkan beberapa pemimpinnya berani mengatakan bahwa mereka juga telah menjadi sebuah kekuatan global juga. Meskipun Hisbullah yang melakukan perang secara langsung dengan Israel, Iran merasa bahwa merekalah yang paling diuntungkan dari hasil perang ini. Iran juga tidak pernah bermaksud untuk mengurangi pengaruhnya terhadap Hisbullah, mengingat bahwa kelompok ini merupakan instrumennya untuk menjamin pertahanan strategisnya di perbatasan Israel. Oleh karena itu mereka tidak pernah menyangkal, bahkan bangga apabila disebut sebagai sumber utama kekuatan ekonomi dan fisik Hisbullah¹⁵.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ David Menashri, “After the War in Lebanon: Iranian Might and Its Imitations” dalam *Iran-Pulse*, Center for Iranian Studies, No. 2, 20 Agustus 2006, hlm. 1-3.

Pasca perang 2006, Iran bisa dikatakan mendapatkan beberapa keuntungan yang sangat signifikan. Pertama, sebagai negara dengan konsentrasi Shi'ah terbesar di Timur Tengah, Iran menunjukkan bahwa Shi'ah yang selama ini ditindas oleh saudara-saudara Sunninya telah bangkit dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Hal ini ditunjukkan dengan begitu banyaknya pengikut mereka di Lebanon maupun Irak saat ini, khususnya setelah Saddam Husein dijatuhkan, serta Hisbullah mengalami kemenangan dari Israel. Selain itu, dengan terfokusnya dunia dengan isu Israel-Hisbullah, Iran semakin bebas mengembangkan proyek nuklirnya, yang selama ini seakan-akan tidak dilirik oleh negara-negara Barat maupun negara-negara Timur Tengah lainnya. Namun dukungan untuk Hisbullah tidak selancar yang kita ketahui, terutama bila dukungan ekonomi yang diperuntukkan bagi Hisbullah harus mendahului kepentingan ekonomi di dalam negeri. Banyak pihak domestik yang mulai melakukan protes bahwa pemerintah Iran tidak bisa mengimbangi pengeluaran domestik mereka dengan pengeluaran internasional seperti yang disebutkan di atas. Tetapi jelas bahwa selama Hisbullah membawa kemenangan dan keuntungan yang lebih bagi Iran, maka tidak ada alasan bagi Iran untuk melepaskan dukungan dan pengaruhnya dari Hisbullah.

- **Literatur mengenai Sistem Konfesionalisme dan Sektarianisme di Lebanon**

Lebanon memiliki satu ciri khas dalam sistem pemerintahannya, yaitu sistem konfesionalisme yang berlandaskan pada sistem sektarianisme yang telah berkembang di negara ini selama puluhan tahun sejak mendapatkan kemerdekaannya. Beberapa ahli melihat bahwa sistem konfesionalisme dan sektarianisme di Lebanon bukanlah suatu hal yang mudah untuk dihilangkan, karena seakan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan politik dari masyarakatnya. **Imad Harb** dalam **“Lebanon’s Confessionalism: Problems and Prospects”** memfokuskan diri untuk membahas bagaimana sistem ini telah memperumit proses terciptanya sebuah kehidupan politik yang seimbang dan stabil. Sistem sektarianisme yang mengedepankan kebebasan setiap kelompok agama maupun etnis untuk menentukan nasibnya masing-masing dalam sebuah negara, telah berkembang hingga ke dalam

sistem pemerintahan, yang kemudian dikenal dengan istilah konfesionalisme. Konfesionalisme sendiri bisa diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang membagi atau memberikan posisi dalam pemerintahan sesuai dengan kekuatan dari masing-masing kelompok etnis atau agama, di mana pada umumnya kelompok mayoritas akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada kelompok lainnya¹⁶. Posisi ini juga termasuk posisi-posisi penting seperti presiden, perdana menteri, dan sebagainya.

Ketika Lebanon pada akhirnya terbentuk sebagai sebuah negara yang merdeka, kelompok-kelompok etnis dan agama yang tersebar di dalamnya tidak pernah menemukan sebuah kesepakatan untuk bergabung membentuk sebuah pemerintahan yang uniter. Negara yang merupakan sebuah entitas yang legal tidak pernah dirancang untuk ikut campur dalam perpolitikan kelompok atau komunitas. Sebaliknya, kelompok-kelompok agama dan etnis memiliki hak untuk turut campur dalam perpolitikan negara. Permasalahan paling dasar dari sistem ini adalah bahwa kepentingan vertikal dan horizontal dari masing-masing kelompok di Lebanon sangat sulit untuk mencapai sebuah titik temu. Dengan demikian, demokrasi yang selama ini disebut telah berkembang di Lebanon merupakan demokrasi semu yang masih bercampur dengan sistem konfesionalisme yang cenderung menghambat terciptanya sebuah demokrasi sejati.

Hassan Krayem dalam **“Lebanon: Confessionalism and the Crisis of Democracy”** melihat bagaimana awal sistem konfesionalisme berkembang selama ini di Lebanon, sejak pertama kali diterapkan hingga pada tahun 2006 di mana konfesionalisme telah mencapai puncaknya dan telah mengancam kembali pecahnya perang sipil di Lebanon. Istilah demokrasi mengandung arti semu karena tidak adanya kesempatan yang seimbang dan merata bagi semua pihak dalam pemerintahan yang berujung pada ketidaksepahaman terhadap banyak keputusan nasional. Hal ini jelas karena kurangnya kohesi, integrasi sosial yang buruk, serta identitas nasional yang terlalu lemah di Lebanon.

¹⁶ Harb, *Loc. Cit.*

Keputusan mengenai sistem konfesionalisme dianggap adil pada saat itu, namun kenyataannya banyak kelompok agama yang merasa bahwa segregasi sosial telah semakin lebar dan hal ini tercermin di dalam pemerintahan, dan tidak sedikit tokoh yang berusaha untuk mengubah sistem ini, termasuk presiden Lebanon pada era 1958, Fouad Shehab¹⁷. Shehab melihat bahwa selama ini, isu-isu dan konflik domestik yang terjadi disebabkan oleh ketidakimbangan dan ketidakadilan regional (melihat dari demografi penduduk), konfesional, komunal, serta sosial-ekonomi (di mana umat Muslim merupakan mayoritas penduduk miskin di Lebanon pada masa itu). Kebijakan-kebijakannya yang berusaha menghapuskan sistem konfesionalisme justru mendapatkan reaksi yang buruk, di mana banyak pihak yang justru ingin mempertahankan posisi komunal mereka. Kegagalan demokrasi paling dirasakan ketika pada tahun 1975 terjadi perang sipil paling besar baik di Lebanon maupun di Timur Tengah, yang dimulai oleh para mahasiswa, sebuah perang saudara yang berlangsung selama 15 tahun ke depan. Meskipun demikian, pemerintah tetap berpedoman pada sistem konfesionalisme karena sistem ini dianggap paling efektif dengan bentuk masyarakat sosial Lebanon yang multietnis dan multireligi.

Setelah *Ta'if Accords* ditandatangani, implementasinya terhadap Lebanon tidak sesuai perkiraan. Pengaruh hegemoni Suriah yang seharusnya berkurang justru semakin kuat, yang pada akhirnya mendorong banyak pihak untuk melakukan protes terhadap hal ini. Suriah yang selama ini telah menjadi hegemon utama di Lebanon sangat merugikan masyarakat Lebanon, di mana ekonomi dan politik seluruhnya dikontrol oleh Suriah. *Ta'if Accords* yang seharusnya membawa perubahan terhadap sistem perpolitikan dan sosial di Lebanon memang berhasil, namun dengan cara yang cukup berbeda dari yang diharapkan. Kerusuhan dan protes menginginkan Suriah untuk

¹⁷ Sistem konfesional berawal pada tahun 1943, ketika Pakta Nasional yang menandakan kemerdekaan Lebanon ditandatangani. Pakta ini menyatakan bahwa sebuah sistem kuota berdasarkan kelompok agama dalam pemerintahan akan diterapkan, di mana perwakilan dari Kristen dan Islam akan mendapatkan akan mendapatkan posisi dengan rasio perbandingan enam banding lima, mengingat bahwa Kristen Maronit merupakan mayoritas pada masa itu. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Hassan Krayem, "Lebanon Confessionalism and the Crisis of Democracy" dalam Barry A. Kosmin & Ariela Keysar, *Secularism, Women & the State: The Mediterranean World in the 21st Century* (Hartford: ISSSC-Trinity College, 2009), hlm. 67-76.

pergi dari Lebanon justru memperburuk kondisi pemerintahan. Pemerintah yang tadinya dikuasai oleh kelompok Kristen Maronit di bawah asuhan Suriah, telah tergantikan oleh keseimbangan sektarian, di mana pada akhirnya terdapat kebebasan dan keseimbangan bagi semua kelompok konfesional di Lebanon¹⁸. Meski demikian, hal ini tetap bukan gambaran sebuah pemerintahan uniter yang mengatasnamakan Lebanon sebagai sebuah negara tunggal, namun masih tetap membawa bendera masing-masing kelompok atau komunitas. Konflik domestik masih tidak terhindarkan, dan segregasi sosial masih terus meluas.

1.5. Kerangka Teori

Apabila kita melihat dengan seksama, maka dalam kasus ini terlihat terdapat dua hal penting yang terjadi di Lebanon: (1) munculnya Hisbullah sebagai aktor sosio-politik baru namun bersifat militan dalam pemerintahan Lebanon, dan (2) perpolitikan domestik dan kebijakan luar negeri Lebanon terhadap Israel yang cenderung mengalami perubahan ketika Hisbullah mulai berperan dalam perpolitikan Lebanon.

1.5.1. Konsep *State-building Movement*

Poin pertama merupakan titik awal yang sangat penting, di mana kita harus bisa menganalisa bagaimana dan apa dasar dari aktivitas yang selama ini dilakukan oleh Hisbullah di Lebanon, khususnya mengapa saat ini Hisbullah bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat berpengaruh di negara tersebut. Untuk menganalisa poin pertama ini, kita akan menggunakan konsep *state-building movement* yang bisa dikatakan paling menggambarkan kondisi serta bentuk dari Hisbullah yang telah berevolusi dari sebuah gerakan militer murni menjadi sebuah gerakan, atau bahkan bisa disebut sebagai partai, yang ikut membangun struktur sosio-politik serta ekonomi di Lebanon. Meskipun Hisbullah secara murni dapat disebut sebagai sebuah *sub-state group*, otoritasnya tidak sepenuhnya dikuasai oleh dua negara yang membentuknya, yaitu Suriah dan Iran. Seiring dengan waktu, Hisbullah mulai menunjukkan kemampuannya untuk memiliki

¹⁸ *Ibid.*

otoritas sendiri, yang membuatnya mampu untuk menentukan tindakan secara independen di Lebanon.

Konsep *state-building movement* yang dianut oleh Hisbullah sekarang ini dapat didefinisikan menurut Keith Jagers sebagai berikut¹⁹:

“as the state's or a state-like entities ability to accumulate power. State building is the process by which the actor not only grows in economic productivity and government coercion but, also, in political and institutional power. More precisely, in the power of state elites to overcome environmental, social, and political forces which stand in the way of their policy objectives.”

Bisa kita lihat dari definisi di atas bahwa inti dari sebuah proses *state-building* adalah kemampuan dari *state* ataupun entitas yang menyerupai *state* untuk mengakumulasi *power*, dan *power* ini akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi serta koersi pemerintah, dan juga untuk menanggulangi segala macam halang rintangan yang menghambat tujuan-tujuan kebijakannya. Dalam kasus Hisbullah di Lebanon, jelas bahwa pasca perang Israel-Hisbullah tahun 2006, pemerintah menghadapi krisis yang cukup berat dan mengalami kegagalan dalam melakukan pemerintahan. Kehancuran yang disebabkan oleh peperangan telah meluluhlantakkan beberapa kota, bahkan korban jiwa pun tidak berjumlah kecil. Pemerintah pada masa itu dapat dikatakan menghadapi krisis yang cukup besar karena memang posisi pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan sedang kosong. Kas negara yang dimiliki sangat tidak cukup untuk melakukan restrukturisasi dan pembangunan kembali sarana serta prasarana yang hancur. Dalam kasus inilah Hisbullah memainkan perannya untuk lebih aktif di bidang ekonomi dan sosial, dengan cara memberikan sumbangan, obat, makanan, serta perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena tidak didapat dari pemerintah. Pemerintah Lebanon jelas merasa terbantu dengan hal tersebut, karena pada dasarnya, yang mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara kuat di kawasan tersebut, dalam hal ini Iran dan Suriah,

¹⁹ Keith Jagers, “War and the Three Faces of Power: War Making and State Making in Europe and the Americas” dalam *Comparative Political Studies*, Vol. 25, No.1, April 1992, hlm. 26-62.

bukanlah pemerintah melainkan Hisbullah, dengan demikian pemerintah harus merelakan posisi penting pasca perang tersebut dipegang oleh Hisbullah yang secara jelas memiliki kapabilitas lebih besar.

Selain itu, Hisbullah merasa mampu untuk melakukan perubahan kebijakan dalam bertindak karena beberapa hal, seperti kelompok Shi'ah yang terpinggirkan di Lebanon mulai mencari sebuah entitas kuat yang mampu membantu mereka untuk bangkit kembali serta mewakili mereka dalam kancah politik di Lebanon, ataupun keberhasilan Hisbullah selama ini dalam menjaga keselamatan penduduk Lebanon dari kembali pecahnya sebuah perang sipil atau keamanan dari serangan pihak Israel. Tetapi seperti yang kita lihat, konsep ini juga mengedepankan adanya akumulasi *power* untuk melakukan koersi terhadap pemerintah. Selama ini yang kita lihat, koersi dilakukan oleh Hisbullah murni hanya terhadap Israel, berupa penculikan, asasinasi, ataupun perang terbuka, sedangkan terhadap Lebanon sendiri, Hisbullah lebih memilih menggunakan jalur persuasif yang tidak akan memakan korban jiwa. Meskipun ada korban jiwa, maka hal tersebut akan dianggap sangat kecil karena akan muncul dari kelompok minoritas di dalam masyarakat yang kurang sepeham dengan tindakan dan cara-cara yang dilakukan Hisbullah.

1.5.2. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Konsep kebijakan luar negeri sebenarnya telah banyak dibahas oleh para peneliti ilmiah dan akademisi, namun hampir semua pembahasan tersebut memiliki dasar analisa yang berbeda. K.J. Holsti sebagai contohnya menganalisa kebijakan luar negeri menurut politik internasional. Disebutkan bahwa kebijakan luar negeri berakar pada politik luar negeri, di mana politik luar negeri itu sendiri adalah pola perilaku sebuah negara dan juga reaksi ataupun respon dari negara lain terhadap perilaku tersebut²⁰. Hubungan internasional akan terkait langsung dengan kebijakan luar negeri yang akan menyesuaikan diri dengan dinamika hubungan internasional yang ada, di mana seperti kita ketahui bahwa hubungan internasional yang selama ini

²⁰ K. J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, 6th ed. (New Jersey: Prentice Hall, 1992), hlm. 3.

terjadi biasanya mengambil tiga bentuk utama yaitu konflik, kompetisi, atau koperasi.

Apabila kita melihat secara lebih jelas, Holsti cenderung mendasari analisisnya mengenai kebijakan luar negeri dan hubungan internasional pada paham realisme, di mana aktor utamanya masih terfokus pada aktor negara. Ketiga bentuk interaksi tersebut di atas jelas lebih tercermin pada aktor negara, dan penjabaran tersebut menganggap seakan-akan aktor dalam dunia internasional ini hanya negara semata. Penjelasan lebih lanjutnya mengenai kebijakan luar negeri adalah tindakan sebuah negara untuk menghadapi lingkungan eksternal dan juga kondisi domestik melalui sebuah proses perumusan kebijakan²¹.

Untuk menganalisa kasus Lebanon dengan aktor-aktor lainnya yang terdapat dalam kasus ini, baik di dalam negeri maupun luar, baik *state* maupun *non-state*, Holsti dapat dikatakan kurang cocok. Mark Webber dan Michael Smith dalam bukunya *Foreign Policy in a Transformed World*, menjelaskan bagaimana seiring dengan berubahnya tatanan dunia, maka kebijakan luar negeri yang dirumuskan, dihasilkan, maupun diimplementasikan dalam dunia internasional pun ikut mengalami perubahan²². Seperti yang mereka jelaskan dalam definisi kebijakan luar negeri:

“Foreign policy is composed of the goals sought, values set, decisions made and actions taken by states, and national governments acting on their behalf, in the context of the external relations of national societies. It constitutes an attempt to design, manage, and control the foreign relations of national societies.”

kebijakan luar negeri dalam dunia internasional saat ini tidak hanya terfokus pada aktor negara semata. Dunia ini telah mengalami perubahan yang cukup pesat baik dalam jumlah negara baru, organisasi maupun kelompok-kelompok sosial *non-state* yang semakin memiliki pengaruh besar terhadap

²¹ *Ibid.*, hlm. 17.

²² Mark Webber dan Michael Smith, *Foreign Policy in a Transformed World* (Harlow: Prentice Hall, 2002), hlm. 3.

dunia internasional, serta isu-isu yang dapat dikatakan tidak lagi sepenuhnya *state-centric*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri, baik perumusan, pembuatan, serta implementasinya harus memperhatikan poin-poin perubahan tersebut.

Sebuah kebijakan luar negeri dijelaskan sebagai sebuah usaha untuk merumuskan, mengelola, serta mengatur hubungan antar kelompok-kelompok masyarakat di dalam sebuah negara. Jelas dengan penjelasan tersebut kita melihat bahwa kebijakan luar negeri tidak bisa terwujud tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok sosial di dalam ranah domestiknya. Dalam kasus ini, di mana kawasan yang ditelaah adalah Timur Tengah, maka jelas bahwa faktor-faktor yang menjadi bagian dari pertimbangan dalam perumusan kebijakan luar negeri cukup banyak, mengingat bahwa kawasan ini adalah salah satu kawasan dengan dinamika regional maupun internasional yang cukup variatif dan terus berkembang.

Hubungan-hubungan yang terjadi berkat masa Perang Dingin sangat mempengaruhi dan membentuk kebijakan luar negeri serta hubungan antarnegara di kawasan Timur Tengah, dan hal ini secara umum dijelaskan bahwa terdapat enam faktor utama yang membentuknya yaitu: (1) nasionalisme, (2) konflik Israel dan negara-negara Arab, (3) peperangan, (4) minyak, (5) politik Islam, dan (6) pengaruh dari kekuatan eksternal²³. Keenam faktor ini bisa dikatakan sebagai unsur-unsur terpenting yang selama ini mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Timur Tengah, ditambah dengan semakin banyak komunitas dan kelompok sosial masyarakat yang bermain dalam perpolitikan masing-masing negara.

1.6. Hubungan Antar Variabel

Kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh pemerintah Lebanon tidak pernah terlepas dari kelompok-kelompok politik yang terdapat di dalamnya, salah satu yang paling besar dan paling kuat pengaruhnya adalah Hisbullah. Hisbullah dalam hal ini adalah salah satu pemain politik yang memiliki pengaruh besar terhadap perpolitikan Lebanon, di dasari oleh kekuatan massa yang dimilikinya

²³ *Ibid.*, hlm. 257-259.

berbasiskan paham dan ideologi Islam Shi'ah. Kekuatan Hisbullah itu pun tidak pernah terlepas dari campur tangan Iran sebagai donatur utama ekonomi, persenjataan, serta paham ideologinya. Melalui bantuan yang selama ini disalurkan Iran, Hisbullah telah berhasil melakukan *state-building* di wilayah Lebanon Selatan dan juga sebagian besar wilayah lainnya di Lebanon, yang pada akhirnya telah membuahkan mereka dukungan yang besar dari masyarakat Lebanon itu sendiri. Selain itu, dengan kemenangan Hisbullah pada tahun 2006 atas Israel, masyarakat Lebanon dan juga pemerintah Lebanon semakin percaya bahwa Hisbullah memiliki kapabilitas yang besar dalam mempertahankan keamanan negara ini, bahkan bisa dikatakan lebih daripada angkatan bersenjata Lebanon sendiri. Kebijakan luar negeri Lebanon yang didasari oleh politik domestik dan politik luar negeri Lebanon pun akan sangat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan Hisbullah karena peran dari organisasi ini semakin kuat dalam kedua sektor perpolitikan tersebut.

1.7. Asumsi

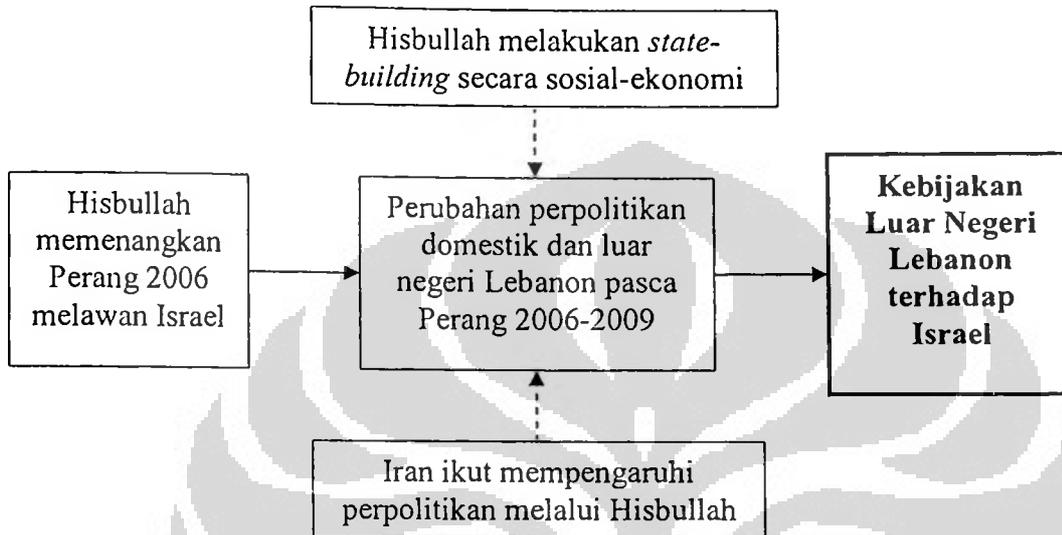
Penelitian ini memiliki beberapa asumsi. Berdasarkan asumsi-asumsi yang penulis anggap benar berdasarkan fakta sebagai landasan analisa, penulis akan mencoba untuk menguji kebenaran hipotesa yang diangkat. Asumsi dari penelitian ini adalah: (1) Hisbullah memiliki peran yang semakin besar di Lebanon baik di sektor sosial, ekonomi maupun politik, (2) Sistem konfesionalisme dan sektarianisme dalam pemerintahan Lebanon membuat segregasi sosial antar kelompok agama sangat terasa, dan (3) Keterlibatan Iran dalam perumusan kebijakan luar negeri Lebanon melalui tangan Hisbullah sangat besar dan tidak dapat diragukan lagi, khususnya karena Iran bertujuan khususnya untuk membangkitkan kekuatan Shi'ah di Lebanon dan seluruh Timur Tengah.

1.8. Hipotesa

Hipotesa yang akan dicoba untuk diuji oleh penulis melalui penelitian ini adalah bahwa setelah Hisbullah semakin kuat secara politik dan ekonomi, dan setelah kelompok ini terlibat dalam pemerintahan Lebanon, maka jelas bahwa Hisbullah akan ikut merumuskan kebijakan luar negeri Lebanon, khususnya

terhadap Israel. Hipotesanya adalah bahwa **kebijakan luar negeri Lebanon terhadap Israel setelah menguatnya peran Hisbullah dalam Pemerintahan Lebanon akan semakin anti-Israel.**

1.9. Model Analisa



1.10. Metode Penelitian

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian **kuantitatif**. Metode ini dipilih karena beberapa alasan sebagai berikut: (1) Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana sebuah kasus atau kondisi yang terjadi di sebuah negara dapat dijabarkan ataupun dianalisa menggunakan beberapa konsep dalam ilmu hubungan internasional maupun ilmu politik, dan jelas bahwa penelitian ini berupaya untuk membuktikan teori atau konsep yang digunakan. Secara umum, definisi dari teori adalah sekumpulan konsepsi (variabel), definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang menjelaskan fenomena dari pandangan yang sistematis dengan menspesifikasi relasi antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena alamiah²⁴. Lalu (2) penelitian ini kurang memungkinkan bagi peneliti untuk terjun langsung ke lapangan sehingga analisa akan dilakukan menggunakan data sekunder maupun

²⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches* (California: SAGE Publications, Inc., 1994), hlm. 82.

informasi-informasi penunjang lainnya yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh peneliti lainnya menyangkut perihal kasus atau kondisi yang sedang diteliti.

Metodologi penelitian yang akan dilakukan akan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Pengumpulan data berupa latar belakang historis dari permasalahan yang diangkat menggunakan media elektronik maupun sumber-sumber data sekunder lainnya, (2) Melakukan analisa menggunakan konsep ataupun teori yang diyakini berkaitan dengan kasus atau kondisi yang sedang diteliti, dengan tujuan membuktikan kebenaran dari konsep ataupun teori tersebut, (3) Mencoba untuk melakukan prediksi ataupun membuat hasil analisa yang berupa gambaran solusi terhadap kasus yang diangkat, (4) Membuat kesimpulan²⁵.

1.11. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Proses *state-building* Hisbullah pasca Perang 2006 dan kondisi perpolitikan Lebanon pasca Perang 2006. Dalam bab ini, penulis akan mencoba untuk mengelaborasi bagaimana proses Hisbullah mencapai statusnya seperti saat ini, serta bagaimana kondisi perpolitikan Lebanon saat itu yang dapat dikatakan lemah.

Bab III : Uji hipotesa dengan melihat kepentingan Hisbullah dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Lebanon. Bab ini merupakan analisa mengenai perumusan kebijakan luar negeri Lebanon terhadap Israel setelah Hisbullah ikut terlibat di dalamnya, serta faktor-faktor yang ikut mempengaruhi Hisbullah dalam mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri tersebut.

Bab IV : Kesimpulan

²⁵ Lawrence Neuman, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2003), hlm. 24-30.

BAB 2 PERKEMBANGAN HUSBULLAH DI LEBANON

Lebanon dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sistem sosial dan politik yang unik, yang lebih dikenal dengan istilah sistem konfesionalisme dan sektarianisme. Kedua sistem ini pada umumnya merupakan sebuah sistem di mana negara tidak pernah mengintervensi atau ikut campur tangan dalam aktivitas ataupun kelangsungan hidup kelompok-kelompok agama maupun etnis yang terdapat di dalam negara tersebut. Sebaliknya, komunitas-komunitas ini bebas ikut berinteraksi dalam sistem politik, ekonomi dan sosial negara²⁶. Sistem yang telah diterapkan sejak Lebanon terlepas dari pengaruh kolonial mandatariat Perancis ini, telah menghasilkan sebuah negara dengan komunitas etnis dan komunitas agama yang demikian banyak dan beragam. Namun, tanpa disadari, sistem ini juga membuka gerbang bagi kekuatan-kekuatan eksternal yang memiliki kesamaan latar belakang etnis atau agama untuk bermain di dalamnya. Salah satu contohnya adalah *Hisbullah*.

2.1. Sejarah Singkat Berdirinya *Hisbullah*

Hisbullah berdiri pada tahun 1982, di mana pada saat itu Lebanon baru saja mengalami invasi dari Israel di wilayah selatan, tepatnya di daerah perbatasan. Berdirinya *Hisbullah* merupakan sebuah hal yang tidak diduga oleh pemerintah Lebanon, Israel yang saat itu menginvasi, maupun Amerika Serikat yang mendukung Israel, karena pada saat yang bersamaan terdapat sebuah gerakan milisi lainnya di wilayah tersebut, yaitu *Amal*²⁷. Meskipun baik *Amal* maupun *Hisbullah* menyatakan Islam Shi'ah sebagai dasar ideologi serta landasan gerak dan sumber kekuatannya, namun *Hisbullah* muncul sebagai kekuatan yang lebih dominan dalam beberapa hal. Bahkan, kemunculan *Hisbullah* yang jauh

²⁶ Harb, *Loc. Cit.*

²⁷ *Amal* merupakan sebuah gerakan milisi berbasis Islam Shi'ah yang berfokus di wilayah Lebanon Selatan dan juga menyebar ke sebagian Beirut pada masa awal perang sipil di tahun 1975. *Amal* pada akhirnya tidak bertahan dan hampir semua petinggiannya berpindah ke *Hisbullah*, setelah popularitasnya di kalangan masyarakat Lebanon pada umumnya, dan masyarakat Shi'ah pada khususnya mulai hilang. Untuk informasi lebih lengkap mengenai gerakan ini dapat dilihat dalam Augustus R. Norton, *Amal and the Shi'a: Struggle for the Soul of Lebanon* (Austin: University of Texas Press, 1987).

sesudah Amal berdiri, tidak menentukan Amal sebagai gerakan yang lebih populer, dan hal inilah yang pada kemudian hari sering menyebabkan terjadinya friksi antara Hisbullah dan Amal²⁸.

Hisbullah didirikan dengan bantuan *The Iranian Revolutionary Guards* atau Pasukan Revolusioner Iran yang pada tahun 1982 dibentuk oleh Iran sebagai pasukan khusus yang mengawasi berjalannya perang sipil serta invasi Israel yang semakin pesat. Yang membedakan Hisbullah dengan gerakan-gerakan milisi lainnya di Lebanon adalah fakta bahwa Iran memberikan dukungan penuh secara fisik, ideologi, maupun finansial kepada Hisbullah. Gerakan-gerakan bersenjata lainnya seperti Amal tidak memiliki sumber ekonomi sendiri, dan pada akhirnya mereka merujuk pada penekanan dan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya pemerintah seperti fasilitas pelabuhan dan kilang-kilang minyak untuk mendukung administrasi lokal mereka²⁹.

Selain itu, Hisbullah bisa dikatakan unik karena meskipun pada awalnya gerakan ini menggunakan cara-cara dan metode terorisme untuk menunjukkan eksistensinya, seiring dengan waktu cara-cara tersebut perlahan hilang dan digantikan dengan metode-metode yang lebih moderat dan konstruktif, dibandingkan dengan Amal yang terus melakukan penekanan bersenjata terhadap Israel serta meneruskan perang sipil antara kelompok-kelompok agama di Lebanon yang semakin panas³⁰. Hisbullah melihat bahwa untuk meneruskan pelawanannya terhadap Israel maka diperlukan dukungan moral dan juga dukungan fisik yang besar dari masyarakat Lebanon itu sendiri, khususnya masyarakat Lebanon Selatan. Selain itu, Hisbullah juga menekankan pentingnya dihentikannya perang sipil untuk mewujudkan sebuah Lebanon yang bersatu dalam melakukan resistensi terhadap Israel.

Lebanon Selatan menjadi prioritas Hisbullah karena beberapa faktor yang sangat penting dan mendasar yaitu: (1) Lebanon Selatan merupakan wilayah

²⁸ Perseteruan antara Hisbullah dan Amal sering terjadi di wilayah Lebanon Selatan, khususnya karena permasalahan dominasi di wilayah ini karena Lebanon Selatan merupakan tempat dengan jumlah kaum Shi'ah banyak, sebuah hal yang sangat dibutuhkan oleh kedua kelompok untuk menambah kekuatan fisik maupun kekuatan politik di Lebanon.

²⁹ Judith Palmer Harik, *Hezbollah: The Changing Face of Terrorism* (London: I. B. Tauris & Co. Ltd., 2007), hlm. 82.

³⁰ Norton, *Amal and the Shi'a*, *Op. Cit.*, hlm. 156.

perbatasan dengan Israel, dan wilayah ini merupakan wilayah yang mendapat perlakuan paling buruk dalam invasi Israel selama ini, baik terhadap penduduknya maupun infrastruktur, (2) wilayah ini merupakan wilayah dengan konsentrasi Shi'ah paling besar di Lebanon, dan jelas bahwa Hisbullah menjalankan amanah Iran bahwa masyarakat Shi'ah di seluruh Timur Tengah harus didongkrak semangat juang dan semangat hidupnya sehingga eksistensinya terus bertahan, berkaitan dengan kebangkitan Shi'ah yang merupakan program Iran, (3) wilayah ini merupakan wilayah di Lebanon yang mendapatkan perhatian paling buruk, baik dari segi ekonomi, sosial, hingga pendidikan, sehingga Hisbullah melihat kesempatan untuk mengisi kekosongan posisi pemerintah di wilayah ini, dan (4) Lebanon Selatan merupakan wilayah dengan konsentrasi pengungsi dari Palestina yang paling besar, di mana Hisbullah melihat bahwa penduduk Palestina yang mayoritas merupakan Shi'ah, kaum yang harus dibelanya selama ini dan menjadi faktor yang bisa menambah kekuatan personil gerakan ini³¹.

Selain itu, kemunculan Hisbullah merupakan salah satu siasat dan agenda dari dua negara yang memiliki kepentingan besar di Lebanon yaitu Suriah dan Iran. Suriah merupakan negara yang sudah lama memegang posisi dominan di Lebanon, khususnya dalam bidang pemerintahan dan juga sosial. Peran serta Suriah dalam pembentukan Hisbullah tidak terlepas dari kepentingannya dalam perebutan wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari negara ini. Israel telah merebut beberapa bagian dari Suriah, salah satunya yang paling penting adalah Dataran Tinggi Golan yang penuh dengan kantung-kantung air, sumber daya alam yang sangat penting bagi kawasan ini³². Suriah yang tidak menemukan jalan keluar melalui diplomasi pada akhirnya memutuskan untuk melakukan konfrontasi bersenjata melalui Hisbullah yang berlaku sebagai perpanjangan tangannya. Damaskus selama beberapa tahun berlaku sebagai gerbang masuknya pasokan senjata menuju Lebanon Selatan³³.

Lain halnya dengan Iran, di mana negara dengan populasi Shi'ah terbesar ini memiliki agenda tersendiri dengan pembentukan Hisbullah. Iran yakin bahwa

³¹ Harik, *Op. Cit.*, hlm. 244-246.

³² *Ibid.*

³³ Usher, *Loc. Cit.*, hlm. 62-63.

kelompok Shi'ah yang berdomisili di Lebanon merupakan kelompok yang mendapatkan perhatian paling minim dibandingkan dengan kelompok agama dan etnis lainnya. Wilayah Lebanon Selatan yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat Lebanon menjadi tempat yang memiliki tingkat pendidikan paling rendah, tingkat kesejahteraan yang paling rendah, bahkan tempat yang paling banyak mendapatkan serangan langsung dari Israel³⁴. Iran yang melihat kondisi buruk yang menimpa masyarakat Shi'ah di wilayah ini memutuskan bahwa hal ini sesuai dengan agendanya yang mengedepankan kebangkitan Shi'ah di Timur Tengah³⁵. Pembentukan Hisbullah pada akhirnya tidak hanya ditujukan pada perlawanan terhadap Israel namun juga sebagai sebuah organisasi yang mampu menaungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Shi'ah di Lebanon, khususnya wilayah Lebanon Selatan.

Dengan demikian, Hisbullah muncul dalam kehidupan politik dan sosial Lebanon sebagai sebuah organisasi militer yang terus mengedepankan perlawanan terhadap Israel. Namun hal yang membedakannya dengan kelompok-kelompok milisi lainnya adalah bahwa perlawanan terhadap Israel tersebut bukanlah agenda tunggalnya, melainkan salah satu dari sekian banyak agendanya termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Shi'ah di Lebanon. Hal yang paling penting yang harus diingat adalah bahwa agenda Hisbullah tidak pernah terlepas dari agenda dan kebijakan-kebijakan Iran yang terus mempengaruhinya.

2.2. Peran Hisbullah Sebagai Sebuah *State-Building Movement*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembentukan Hisbullah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan respon terhadap invasi Israel di Lebanon Selatan dan wilayah selatan Beirut. Namun ternyata ada satu hal lain yang membedakan Hisbullah dari organisasi militer berbasis Shi'ah lainnya yaitu Amal, yaitu bahwa Hisbullah memiliki peran lain sebagai penyedia dan pemberi bantuan ekonomi dan sosial kepada kelompok Shi'ah yang mendapatkan perlakuan paling diskriminatif di Lebanon.

³⁴ Rodger Shanahan, *The Shi'a of Lebanon: Clans, Parties, and Clerics* (London: I. B. Tauris & Co. Ltd., 2005), hlm. 14.

³⁵ Harik, *Op. Cit.*, hlm. 29.

Dengan aliran dana yang terbilang cukup besar dari Iran sebagai sponsor utamanya, Hisbullah berusaha untuk ikut menyediakan segala keperluan sosial dan ekonomi kepada kelompok Shi'ah di Lebanon. Keputusan ini diambil karena selama tahun 1975-1990, yaitu pada masa perang sipil berkecamuk di Lebanon, pemerintah seakan tidak memiliki kredibilitas untuk memfasilitasi segala kebutuhan sosial masyarakatnya secara menyeluruh, khususnya kelompok Shi'ah yang disebut sebagai kelompok yang mendapatkan perlakuan paling minim di negara ini³⁶. Bahkan ketika Lebanon memasuki masa pasca perang dengan Israel, wilayah selatan menjadi wilayah yang memiliki standar hidup paling rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, di mana listrik sangat minim, persediaan air memburuk secara kualitas maupun kuantitas, sanitasi memburuk dan sampah serta puing-puing peperangan menumpuk, fasilitas umum seperti jalan-jalan dan gedung-gedung tidak layak pakai, dan secara keseluruhan perekonomian masyarakat di Lebanon Selatan terpuruk³⁷.

Dalam menjawab keperluan masyarakat atas kebutuhan-kebutuhan dasar, Hisbullah menyediakan beberapa unit khusus yang melingkupi bidang sosial, pendidikan, serta kesehatan, dan semua unit-unit ini digolongkan sebagai *non-governmental organizations* atau NGO karena telah didaftarkan secara resmi kepada pemerintah Lebanon³⁸, jelas hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan pihak-pihak lainnya yang memberikan predikat teroris kepada Hisbullah.

Unit Sosial menaungi empat organisasi utama. Yang pertama adalah *The Jihad Construction Foundation* atau lebih dikenal dengan *Jihad al-Binaa*, yang menangani pembangunan infrastruktur serta penyediaan sumber air bersih sebanyak lebih dari 45 persen penduduk daerah suburban di selatan Beirut³⁹. Tercatat bahwa sejak tahun 1988 hingga sekarang, Hisbullah melakukan peningkatan tingkat sanitasi di Lembah Bekaa dan Lebanon Selatan berupa

³⁶ Shanahan, *Op. Cit.*, hlm. 113.

³⁷ Ahmed Nizar Hamzeh, *In The Path of Hizbullah* (New York: Syracuse University Press, 2004), hlm. 143.

³⁸ Shawn Teresa Flanagan, "Nonprofit Service Provision by Insurgent Organizations: The Cases of Hizballah and the Tamil Tigers" dalam *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31, Issue 6 Juni 2008, hlm. 499-519.

³⁹ Hamzeh, *Op. Cit.*, hlm. 76.

pengangkutan sampah seberat 300 ton setiap harinya, menutupi kekosongan yang dihasilkan oleh Departemen Sanitasi Lebanon yang mengalami kebekuan selama lebih dari satu dekade⁴⁰. Selain itu, *Jihad al-Binaa* juga membangun cadangan-cadangan air yang mampu menampung 4.000 liter di tiap suburban dan mengisi masing-masing lima kali sehari, sebagai respon terhadap cadangan air bersih dari wilayah Ain al-Dilbih yang sudah terkontaminasi⁴¹.

Organisasi ini juga bertugas untuk mendata kerusakan dan membayar dana kompensasi restrukturisasi kepada warga Lebanon Selatan yang menjadi korban perang. Organisasi kedua adalah *Hezbollah's Martyr's Foundation* yang bertugas memberikan bantuan finansial kepada keluarga para martir yang menjadi korban jiwa perang perlawanan terhadap Israel selama ini. Organisasi ketiga adalah *The Foundation for the Wounded* yang memiliki fungsi serupa dengan *Hezbollah's Martyr's Foundation* namun lebih ditujukan kepada warga sipil yang secara tidak sengaja terlibat dalam konfrontasi-konfrontasi bersenjata dengan Israel⁴². Hisbullah juga diberikan sumber daya berupa uang dan perabot rumah tangga untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan ganti rugi berupa barang⁴³.

Unit Kesehatan Hisbullah bisa dikatakan memiliki peran yang paling vital, bukan hanya bagi Hisbullah sendiri, ataupun bagi kelompok Shi'ah sebagai klien utamanya, namun juga bagi masyarakat Lebanon secara keseluruhan serta bagi pemerintah Lebanon secara tidak langsung. Unit ini membawahi dan mengoperasikan tiga rumah sakit besar, 12 pusat kesehatan masyarakat, 20 klinik umum, 20 klinik gigi, serta 10 unit pencegahan wabah⁴⁴. Pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit ini menyediakan pengobatan dengan biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali untuk masyarakat Shi'ah yang berpendapatan rendah, ataupun kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan pengobatan

⁴⁰ Harik, *Op. Cit.*, hlm. 83.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 85.

⁴² Hamzeh, *Op. Cit.*, hlm. 152.

⁴³ John Kifner, "Hezbollah Leads Work to Rebuild, Gaining Stature", artikel 16 Agustus 2006, diakses dari http://www.nytimes.com/2006/08/16/world/middleeast/16hezbollah.html?_r=1.

⁴⁴ Islamic Health Society, *Islamic Health Society Journal - 21 years promoting Health Services*, (Beirut: Islamic Health Society, 2005), hlm. 15.

darurat. Selain itu, unit ini juga memberikan asuransi cuma-cuma serta obat gratis yang diusahakan melalui jaringan rekanan dengan apotik-apotik di Lebanon⁴⁵.

Unit Pendidikan merupakan salah satu unit yang memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Shi'ah secara khusus maupun masyarakat Lebanon secara umumnya. Sistem pendidikan sekolah-sekolah umum di Lebanon dikenal sangat buruk dalam hal kualitas, di mana pendidikan tinggi hanya difasilitasi oleh sekolah-sekolah swasta mahal yang dikelola oleh negara asing. Hisbullah memberikan alternatif kepada keluarga-keluarga dengan pendapatan rendah, dengan cara membangun sekolah-sekolah umum yang memiliki kualitas pendidikan yang cukup setara dengan sekolah-sekolah swasta, dengan biaya pendidikan yang jauh dibawah sekolah-sekolah swasta tersebut. Selain itu, mereka juga menyediakan beasiswa bagi siswa tidak mampu, buku yang dibeli dari luar secara grosir dan dijual kembali dengan harga yang relatif jauh lebih murah, serta menyediakan perpustakaan umum bagi masyarakat Shi'ah maupun non-Shi'ah⁴⁶. Jelas ketika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dasar masyarakatnya, fasilitas yang ditawarkan oleh Hisbullah menjadi pilihan yang sangat baik diterima oleh masyarakat.

Bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh Hisbullah ini sepenuhnya menggunakan dana yang diberikan oleh Iran sebagai sponsor utama organisasi ini, dan bisa dikatakan bahwa Hisbullah tidak mengeluarkan sedikit untuk keseluruhan proses *state-building* yang mereka lakukan. Pada bulan September tahun 2006, pasca perang dengan Israel yang berlangsung selama 34 hari, Hisbullah mengeluarkan sekitar \$281 juta untuk program rekonstruksi dan kompensasi korban pengeboman yang dilakukan Israel⁴⁷, dengan catatan bahwa

⁴⁵ Hamzeh, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁴⁶ Flanigan, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Nilai \$281 juta merupakan angka yang sangat kontras ketika dibandingkan dengan angka \$21 juta yang dikeluarkan oleh pemerintah Lebanon untuk menangani kondisi masyarakat Lebanon pasca perang dengan Israel tersebut, menunjukkan betapa lemahnya kondisi perekonomian pemerintah saat itu. Untuk informasi lebih detil dapat dilihat dalam Yasmien Arif, "Religion and Rehabilitation: Humanitarian Biopolitics, City Spaces and Acts of Religion" dalam *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 32, Issue 3 September 2008, hlm. 671-689.

sebelumnya organisasi ini telah menyiapkan dana cadangan sebesar \$300-400 juta hanya untuk program ini⁴⁸.

Selain ketiga unit utama Hisbullah yang bergerak di bidang sosial di atas, Hisbullah juga ikut membangun kembali kehidupan rural di beberapa wilayah di Lebanon, khususnya pertanian di Baalbek dan Hermel yang sempat tidak berkembang dikarenakan oleh sistem irigasi yang telah lama inefektif, peralatan yang tidak lagi memadai, serta peperangan yang konstan mengganggu aktivitas masyarakat. Hisbullah memberikan bantuan dengan kerjasama langsung dari Iran berupa penyediaan 30 traktor, program agro-teknis yang terencana dengan baik, serta bantuan tenaga fisik dalam menggarap tanah dan membangun sumber-sumber air baru, serta pembangunan klinik-klinik hewan⁴⁹. Perekonomian di wilayah-wilayah rural ini juga sempat terganggu oleh masuknya produk-produk dari Suriah yang lebih murah, mengalahkan produk domestik yang berkembang dengan perlahan. Dengan bantuan dari Iran dan Hisbullah, dibangun beberapa pusat penelitian pertanian yang berfungsi untuk menguji kualitas tanah, menerapkan sistem peternakan yang lebih efektif, bahkan sebuah pabrik pengalengan tomat yang hingga sekarang berhasil menghasilkan 100 ton tomat perharinya⁵⁰.

2.3. Analisa Konsep *State-building Movement* Terhadap Program Sosial Hisbullah

Sejak awal pembahasan bagian mengenai program-program sosial yang dilakukan oleh Hisbullah di Lebanon Selatan dan wilayah suburban selatan Beirut, kita tidak bisa menghilangkan asumsi bahwa Hisbullah melakukan semua ini berdasarkan agenda utamanya, yaitu eradikasi Israel dari wilayah Lebanon dan dari seluruh Timur Tengah apabila dilihat dalam skala besar.

Apa yang telah dilakukan oleh Hisbullah selama dua dekade ini merupakan apa yang diklasifikasikan ke dalam *state-building movement*. Sebuah

⁴⁸ Sabrina Tavemise, "Charity Wins Deep Loyalty for Hezbollah" dalam *The New York Times*, artikel 6 Agustus 2006, diakses dari http://www.nytimes.com/2006/08/6/world/middleeast/16charity.html?_r=1.

⁴⁹ Harik, *Op. Cit.*, hlm. 87.

⁵⁰ Harik, *Op. Cit.*, hlm. 88.

organisasi atau gerakan melakukan *state-building* pada dasarnya bertujuan untuk mengakumulasi *power*, dan pada akhirnya, *power* yang telah didapatkan itu akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengkoersi pemerintah⁵¹. Metode yang dapat digunakan untuk mengakumulasi *power* itu sendiri sangat beragam, dimulai dari propaganda massal yang menggunakan masyarakat sebagai kekuatan utamanya, meminta bantuan kekuatan eksternal dengan pembagian kekuatan secara merata sebagai konsekuensinya, atau apa yang dilakukan oleh Hisbullah, yaitu melalui persuasi sosial dengan bantuan sosial dan finansial yang diberikan pada massa untuk memperoleh dukungan secara akumulatif dan bertahap⁵².

Metode yang digunakan oleh Hisbullah bisa dikatakan yang paling efektif mengingat bahwa Lebanon merupakan sebuah negara multietnis dan multikultural yang kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh pergolakan politik dinamis yang konstan menerpa negara ini. Kedua metode sebelumnya bisa saja digunakan oleh Hisbullah, namun organisasi ini memiliki keuntungan yang lebih dengan menggunakan metode terakhir. Pada awal pembentukannya, Hisbullah sempat menggunakan cara-cara militan yang cenderung mengundang kontroversi dari berbagai pihak, khususnya dari negara-negara barat yang merupakan pemain-pemain yang cukup dominan di Timur Tengah. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberikan predikat teroris kepada Hisbullah⁵³, disebabkan oleh pengeboman yang dilakukan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut dan juga terhadap markas pasukan marinir Amerika di Beirut yang menewaskan 243 pasukan marinir⁵⁴.

Keputusan untuk ikut membantu masyarakat Lebanon di bidang sosial dan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat tepat, mengingat kondisi pemerintah Lebanon yang kurang efektif pada masa itu. Perang yang terus melanda negara tersebut dan kondisi perpolitikan yang terus berkecamuk, ditambah sistem konfesionalisme yang dapat dikatakan ikut memperumit pembentukan sebuah

⁵¹ Jagers, *Loc. Cit.*, hlm. 30-33.

⁵² *Ibid.*

⁵³ MIPT, *Terrorism Knowledge Database Group Profile: Hezbollah* (Oklahoma City: Memorial Institute for the Prevention of Terrorism, 2006).

⁵⁴ Harik, *Op. Cit.*, hlm. 36-38.

pemerintahan yang bersatu dan dapat berlaku adil terhadap setiap kelompok etnis dan agama yang ada⁵⁵. Pemerintah yang telah meninggalkan banyak kekosongan dalam memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, pada akhirnya tidak bisa menolak segala macam bantuan yang muncul dari kelompok-kelompok ataupun organisasi *non-state* yang menawarkan bantuan dalam bidang sosial maupun ekonomi, termasuk Hisbullah. Hisbullah bisa disebut sebagai salah satu organisasi yang paling cepat meraih dukungan dari pemerintah Lebanon karena bantuan-bantuan rekonstruksi serta bantuan medisnya yang responsif dan menyeluruh⁵⁶ seperti yang telah disebutkan di atas, dengan segera mengisi kekosongan-kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintah.

Pada awalnya, bantuan-bantuan sosial dan ekonomi yang diberikan oleh Hisbullah hanya diperuntukkan bagi kaum Shi'ah yang termarginalisasi di wilayah selatan Lebanon. Hal ini juga berhubungan dengan kebijakan luar negeri Iran yang bertujuan untuk mempromosikan ideologi Islamnya serta mendorong kebangkitan kaum Shi'ah di seluruh Timur Tengah. Namun ketika ketiga unit bantuan Hisbullah didirikan dan mulai beroperasi, masyarakat yang membutuhkan datang bukan hanya dari kaum Shi'ah saja. Kristen, Sunni, bahkan Druze yang berdomisili di Lebanon Selatan dan di suburban selatan Beirut, banyak yang membutuhkan bantuan ekonomi dan kesehatan, dan ketidakmampuan pemerintah untuk memfasilitasi hal ini menyebabkan mereka untuk merujuk pada bantuan Hisbullah yang tersedia⁵⁷. Hisbullah sendiri tidak merasa keberatan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok dari agama atau etnis yang berbeda, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang cukup penting.

Pertama, bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh Hisbullah merupakan salah satu bentuk lain dari jihad menurut kelompok ini. *Jihad* memiliki arti yang sangat luas, di mana segala bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap sesuatu yang menyalahi ajaran Allah SWT merupakan sebuah bentuk *jihad*⁵⁸. Seperti yang telah dijelaskan oleh Hassan Nasrallah sendiri:

⁵⁵ Krayem, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁵⁶ Hamzeh, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁵⁷ Tavernise, *Loc. Cit.*

⁵⁸ Kata 'jihad' berasal dari kata kerja bahasa Arab *jahada* yang berarti 'untuk melawan'. Pada umumnya penggunaan kata *jihad* ditujukan pada penggunaan cara-cara militer untuk

“...kami tidak menyebut diri kami sebagai sebuah kelompok teroris ataupun kelompok militan. Kami adalah sebuah kelompok resistensi, kelompok perlawanan terhadap musuh bersama seluruh bangsa Arab di Timur Tengah dan di Dunia. Semua yang dilakukan oleh anggota kami merupakan sebuah bentuk perlawanan, baik itu terhadap tirani, ketidakadilan, ataupun kesengsaraan.”⁵⁹

Segala macam bantuan medis maupun ekonomi yang diberikan oleh Hisbullah merupakan *jihad*, dan jelas bahwa hal ini akan mengaitkan anggota unit-unit sosial yang berada di bawah Hisbullah kepada kewajibannya secara moral dan religius. Hampir semua anggota unit-unit sosial Hisbullah merupakan sukarelawan yang memutuskan untuk mendukung perlawanan Hisbullah terhadap Israel. Tanpa dukungan medis dan ekonomi yang diklasifikasikan sebagai perlawanan garis belakang, pasukan militer yang berada di garis depan tidak akan mampu menghasilkan perlawanan seperti yang telah dilakukan saat ini.

Kedua, bantuan sosial yang telah mencakup hampir semua masyarakat Lebanon yang membutuhkan, telah memperkuat afiliasi Hisbullah dengan pemerintah Lebanon, baik sebagai organisasi sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lebanon, maupun sebagai pasukan militer yang lebih kredibel dalam melawan invasi dan serangan-serangan Israel. Unit-unit sosial yang secara legal terdaftar sebagai NGO di Lebanon, dan pasukan militer yang telah membuktikan bahwa senjatanya tidak ditujukan kepada masyarakat Lebanon⁶⁰, telah menunjukkan bahwa Hisbullah siap bekerja sama sepenuhnya dengan pemerintah Lebanon untuk membentuk sebuah pemerintahan yang lebih

menghancurkan musuh-musuh agama Islam atau segala sesuatu yang menyalahi aturan-aturan Islam. Dalam Islam terkenal empat bentuk *jihad* yaitu *Jihad al-Nafs* atau *jihad* terhadap nafsu, *Jihad al-Lisan* atau *jihad* terhadap perkataan, *Jihad al-Yad* atau *jihad* terhadap perbuatan, dan *Jihad as-Sayf* atau *jihad* terhadap pedang atau musuh. Keempat bentuk *jihad* ini sebenarnya termasuk dalam satu arti global mengenai *jihad*, namun sangat disayangkan bahwa saat ini istilah *jihad* hanya diasosiasikan pada penyerangan kelompok-kelompok radikal Islam terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai *jihad* dapat diakses dalam Rueven Firestone, *Jihad: The Origin of Holy War in Islam* (London: Oxford University Press, 1999).

⁵⁹ Harik, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁶⁰ Norton, “The Role of Hezbollah in Lebanon Domestic Politics”, *Loc. Cit.*, hlm. 479.

efektif dan kredibel dalam menangani berbagai isu dan tantangan yang sedang dihadapi negara ini saat ini.

Ketiga, dan yang hingga kini masih diperdebatkan adalah bahwa Hisbullah memberikan bantuan-bantuan sosial ini untuk merekrut anggota-anggota perlawanan baru. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memberikan simpati dan dukungan kepada Hisbullah melalui bantuan-bantuan sosial dan finansialnya, banyak pihak yang curiga bahwa para simpatisan tersebut akan turut serta dalam melanjutkan perlawanan bersenjata terhadap Israel. Dengan asumsi tersebut, Hisbullah akan menjadi sebuah organisasi militer raksasa yang memiliki kekuatan militer penuh, dukungan penuh dari mayoritas masyarakat Lebanon tanpa mempedulikan etnis ataupun agamanya, dan juga menjadi salah satu partai politik paling berpengaruh yang berpotensi untuk merubah sistem pemerintahan Lebanon yang sekuler menjadi sebuah sistem pemerintahan yang berbasis Islam⁶¹ seperti negara pendukung utamanya, Iran. Namun hingga kini, seperti yang telah disebutkan di atas, hal ini tidak terbukti hingga kini, karena jelas bahwa Hisbullah memiliki tujuannya tersendiri, terlepas dari keterkaitannya dengan Iran.

Dengan pengakumulasian *power* yang dilakukan oleh Hisbullah melalui program-program sosialnya, kita dapat mengasumsikan bahwa Hisbullah akan melanjutkan dua tahap selanjutnya dalam proses yang dilakukan oleh sebuah *state-building movement*, yaitu peningkatan ekonomi dan koersi terhadap pemerintah. Tahap peningkatan ekonomi telah dilakukan Hisbullah sejak keterlibatannya dalam bidang sosial di Lebanon, ditambah pula dengan pemasukan dana dari Iran. Iran telah menjadi donatur utama Hisbullah sejak berdirinya organisasi ini, dan hingga kini ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Iran memberikan \$100-200 juta tiap tahunnya⁶². Jumlah yang tidak sedikit ini sepenuhnya diberikan kepada Hisbullah, dan penggunaannya dibebaskan kepada Hisbullah untuk menentukan. Seperti yang kita lihat, bahwa secara

⁶¹ Usher, *Loc. Cit.*, hlm. 64.

⁶² Harik, *Op. Cit.*, hlm. 179.

ekonomi, Hisbullah sudah memantapkan posisinya sebagai sebuah organisasi yang siap secara finansial dan material⁶³.

Tahap koersi pemerintah merupakan hal yang paling dipertanyakan hingga kini, mengingat bahwa secara teoritis, sebuah *sub-state entity* yang melakukan kegiatan-kegiatan *state-building movement* pada akhirnya akan berusaha untuk mengambil alih pemerintahan melalui koersi atau secara paksa. Hal ini dimungkinkan karena *sub-state entity* tersebut telah memiliki kekuatan finansial yang kuat untuk mendukung segala kegiatannya ke depan, *power* yang matang secara politik dan sosial karena telah mendapatkan dukungan dari masyarakat secara proporsional, dan yang terakhir adalah karena *sub-state entity* ini telah diakui sebagai pihak oposisi yang lebih kredibel dibandingkan oleh pemerintahan legal yang ada. Namun hal ini berlaku lain untuk Hisbullah, di mana pada akhirnya Hisbullah justru mengubah bentuk organisasi ini menjadi sebuah partai yang terdaftar secara legal maupun *de facto* oleh pemerintah dan masyarakat Lebanon. Hisbullah yang memiliki kredibilitas untuk melakukan koersi justru mengambil jalan persuasif dan kooperatif terhadap pemerintah Lebanon yang lemah. Tujuan yang diinginkan oleh Hisbullah jelas bukanlah koersi penuh terhadap pemerintah, namun lebih merujuk pada posisi dominan di pemerintahan Lebanon. Posisi Hisbullah dalam pemerintahan Lebanon akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya.

2.4. Perubahan Status Hisbullah Menjadi Partai Politik

Untuk mencapai tujuan akhirnya, Hisbullah harus menggunakan segala cara yang menurutnya efektif, termasuk konfrontasi-konfrontasi bersenjata yang dilakukannya sejak pertama kali muncul di Lebanon. Namun jelas bahwa metode konfrontatif dan non-kooperatif seperti itu akan mendatangkan banyak kontroversi dari berbagai pihak, baik itu pihak oposisi, maupun dari masyarakat sekitar⁶⁴. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat yang dipilih oleh Hisbullah

⁶³ Material dalam hal ini merujuk pada peralatan militer serta stok persenjataan Hisbullah yang terus bertambah pembelian melalui pembelian sendiri ataupun bantuan dari Iran. Perihal persenjataan Hisbullah sempat dipertanyakan oleh Israel dan Amerika Serikat pada penandatanganan *Ta'if Accords* yang menuntut perlucutan senjata semua kelompok militan di Lebanon, namun tidak dipatuhi oleh Hisbullah. Selanjutnya dapat merujuk pada Usher, *Loc. Cit.*

⁶⁴ Norton, "The Role of Hezbollah in Lebanon Domestic Politics", *Loc. Cit.*, hlm. 481-483.

adalah untuk mengubah metodenya dalam meraih dukungan dari masyarakat maupun pihak lainnya, dalam hal ini difokuskan pada pemerintah Lebanon. Program sosial dan ekonomi yang direalisasikan oleh Hisbullah merupakan metode yang paling tepat, seperti yang dijelaskan dalam sub-bab sebelum ini, mengingat pemerintah Lebanon sedang dalam kondisi di mana segala bentuk bantuan untuk masyarakatnya sangat dibutuhkan.

Kondisi di mana Hisbullah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bidang sosial di Lebanon, telah membuahkan hasil yang cukup besar bagi Hisbullah. Penerima bantuan dari lembaga-lembaga sosial Hisbullah sangat beragam, bukan hanya dari kaum Shi'ah saja tetapi juga dari seluruh lapisan masyarakat di Lebanon, khususnya yang berdomisili di Lebanon Selatan dan *dahiyeh*⁶⁵ Beirut. Terdata bahwa lembaga-lembaga Hisbullah menyediakan dan melayani sekitar 10% dari seluruh penduduk Lebanon, atau sekitar 350.000 jiwa. Angka yang cukup besar ini disebabkan karena Hisbullah memberikan pelayanan yang paling cepat dan paling efektif, dengan jenis pelayanan yang sangat lengkap, serta beroperasi meliputi sebagian besar wilayah-wilayah yang tidak terjangkau ataupun tidak dijangkau oleh lembaga lainnya. Dengan keunggulan ini, Hisbullah dengan mudah telah meraih simpati serta dukungan dari masyarakat Lebanon, dari semua kelompok-kelompok agama, yang mengharapkan bahwa apabila Hisbullah memutuskan untuk maju sebagai sebuah partai politik dan memenangkan pemilihan umum berikutnya, maka bantuan-bantuan ekonomi dan sosial yang diberikan akan semakin meningkat secara kualitas maupun kuantitas.

Hal kedua yang telah meningkatkan simpati masyarakat adalah bahwa lembaga-lembaga sosial Hisbullah merupakan lembaga-lembaga yang independen, atau berarti tidak ada ikatan khusus dengan pemerintah Lebanon. Hampir semua kelompok milisi atau kelompok politik yang ada di Lebanon, sebagai contoh Amal dan beberapa kelompok berbasis Kristen, menggunakan

⁶⁵ *Dahiyeh* merupakan istilah masyarakat Lebanon untuk wilayah suburban yang mengalami keterpurukan ekonomi. Daerah-daerah ini terkenal sangat terpuruk secara ekonomi, di mana pendapatan perkapita hanya 14% dari penduduk Lebanon pada umumnya. Satu hal lain yang menyebabkan kondisi buruk ini adalah *over-population* di daerah ini, di mana seperenam populasi Lebanon terkonsentrasi di *dahiyeh*. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Mona M. Fawaz, "Agency and Ideology in the Service Provision of Islamic Organizations in the Southern Suburb of Beirut, Lebanon", sebuah makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi UNESCO mengenai NGO dan Pemerintahan di Negara-negara Arab, Kairo, Mesir, Maret 2000.

fasilitas milik pemerintah dengan dasar ikatan-ikatan khusus dengan pemerintah Lebanon. Hal ini telah dicap sebagai sebuah bentuk korupsi dan kolusi dalam pemerintahan Lebanon, mengingat bahwa kelompok-kelompok dengan ikatan khusus bisa mendapatkan pelayanan yang cukup lengkap dari pemerintah, seperti penggunaan fasilitas kesehatan negara⁶⁶. Hisbullah tidak pernah terikat dengan pemerintah Lebanon sebelum akhirnya masuk dalam pemerintahan, dan hal ini merupakan sebuah bukti bahwa mereka mampu menjadi sebuah organisasi yang mengabdikan pada masyarakat tanpa harus memiliki ikatan khusus itu.

Dengan dukungan secara *de facto* dari masyarakat Lebanon, dukungan konstan secara finansial dari Iran, dan kondisi pemerintahan Lebanon yang masih cenderung lemah, Hisbullah akhirnya memutuskan untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 1992, mengirim perwakilannya untuk meraih kursi dalam parlemen. Keikutsertaan dalam pemilihan umum merupakan salah satu hal yang paling penting dalam perpolitikan Lebanon, di mana pihak yang mengikuti pemilihan umum dan memperoleh kursi dalam pemerintah, akan memiliki hak veto dan juga kekuatan untuk ikut serta dalam menentukan semua kebijakan negara, dalam hal ini yang ditekankan adalah legalitas keikutsertaan itu. Hisbullah akan memiliki posisi yang sangat penting apabila memenangkan pemilihan umum, setidaknya beberapa posisi penting akan berada dalam pengawasan mereka.

Pada pemilihan umum terakhir, Hisbullah bergabung dalam koalisi 8 Maret bersama Michel Aoun dan kelompok Maronitnya. Koalisi ini mengedepankan pemikiran dan ideologi pan-Arabisme serta keinginan untuk mewujudkan sebuah pemerintahan nasionalis yang bersatu⁶⁷. Selain itu, koalisi ini juga mengedepankan pentingnya mempertahankan persenjataan Hisbullah dan kelompok-kelompok resistansi lainnya, mengingat bahwa Israel masih kerap melakukan konfrontasi bersenjata kepada Lebanon ataupun Palestina sebagai negara tetangga yang sangat didukung oleh Lebanon. Kebijakan mempertahankan senjata ditekankan sebagai salah satu agenda keamanan nasional yang harus

⁶⁶ Hamzeh, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁶⁷ Ali Fayyad, "Hezbollah and the Lebanese State: Reconciling a National Strategy with a Regional Role", dalam *Arab Reform Brief – Arab Reform Initiative*, No. 11, Agustus 2006, hlm. 1-11.

diutamakan⁶⁸. Keputusan Hisbullah untuk bergabung dalam koalisi ini didasari oleh kepentingannya untuk ikut berperan dalam pemerintahan Lebanon dengan kekuatan besar yang sudah cukup terkenal di Lebanon, yaitu kelompok Kristen Maronit. Seperti yang kita ketahui, Kristen Maronit sebelumnya adalah kaum mayoritas di Lebanon sejak awal kemerdekaan, dan posisi presiden selalu dipegang oleh seorang Maronit⁶⁹. Selain itu, sebelum memiliki legalitas untuk berperan dalam pemerintahan, Hisbullah akan selalu memiliki status sebagai *the authority without authority*⁷⁰, sehingga jelas bahwa pengakuan status baru ini harus mendapatkan persetujuan bukan hanya dari masyarakat namun juga dari pemerintah. Terakhir, dengan merangkul kelompok Maronit sebagai aliannya, Hisbullah memperkecil kesenjangan religius dan sektarian yang selama ini ada di Lebanon, meminimalisir kemungkinan pecahnya kembali sebuah perang sipil di Lebanon.

Beberapa permasalahan muncul menyangkut perubahan status pergerakan Hisbullah, termasuk permasalahan yang berasal dari dalam Hisbullah sendiri, khususnya perseteruan antara para ulama konvensional dan para pemimpin yang lebih moderat. Perdebatan internal sengit ini pada khususnya membahas bagaimana visi dan misi politik Hisbullah ke depannya, khususnya apabila telah masuk dan terintegrasi dalam pemerintahan Lebanon. Para ulama konvensional bersikeras bahwa Hisbullah harus bisa mengubah sistem perpolitikan Lebanon yang cenderung sekuler menjadi sebuah sistem berbasis Islam sepenuhnya, mengingat bahwa basis pergerakan organisasi ini adalah ajaran-ajaran Ayatollah Khomeini di Iran, yang telah mengimplementasikan pemerintahan dan perpolitikan berbasis Islam sepenuhnya⁷¹. Sebaliknya para ulama dan dewan pimpinan yang lebih moderat melihat bahwa Hisbullah harus bisa beradaptasi dengan sistem sektarian dan konfesionalis yang telah berjalan di Lebanon. Hassan Nasrallah, salah satu pimpinan utama dari Hisbullah yang hingga saat ini memegang tampuk kekuasaan dalam organisasi ini melihat bahwa perubahan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Harb, *Loc. Cit.*

⁷⁰ Fayyad, *Loc. Cit.*, hlm. 7.

⁷¹ Harik, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

sistem yang diinginkan oleh para tetua merupakan sebuah opsi yang sangat radikal, dan dukungan masyarakat yang selama ini telah dihimpun bisa hilang dalam sekejap ketika Hisbullah memaksakan untuk melakukan perubahan tersebut.

Selain itu, Lebanon terkenal sebagai sebuah negara dengan komunitas dan kelompok-kelompok agama yang sangat bervariasi, dan sistem konfesional yang selama ini terimplementasi telah membuktikan efektivitasnya. Hisbullah cukup ikut bermain dalam sistem ini, dan mengontrol arah perpolitikan sesuai agendanya. Basis pergerakan organisasi tetap berkiblat pada ajaran Khomeini, dan apabila mereka terus bermain dalam sistem yang berlaku, perlawanan terhadap Israel akan bisa terus dilakukan dan justru mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat serta pemerintah Lebanon itu sendiri⁷². Dengan demikian pada akhirnya Hisbullah mendapatkan sebuah keputusan bulat secara internal untuk terus bermain dalam sistem yang ada hingga saat ini, merujuk bahwa tujuan utama mereka adalah membentuk sebuah Lebanon yang bersatu dalam menghadapi Israel. Hisbullah pun tetap menjadi pemain politik utama di Lebanon hingga saat ini, dan puncak dari peran mereka adalah pada kurun waktu 2006, di mana Hisbullah memenangkan perang 34 hari melawan Israel, dan semakin mendapatkan dukungan dari masyarakat, bahkan pengakuan dari pemerintah Lebanon sebagai kekuatan militer yang memiliki kapabilitas lebih besar dibandingkan angkatan bersenjata Lebanon sendiri.

Pasca perang tahun 2006, dan setelah Hisbullah menunjukkan kekuatannya dalam bidang militer, ekonomi, maupun berpolitik, Lebanon mengalami masa transisi dalam perpolitikannya. Lebanon pasca perang tahun 2006 dikenal sebagai Lebanon yang terbagi menjadi dua kubu secara politik, seperti yang telah dijelaskan, yaitu kubu Koalisi 14 Maret yang bersifat pro-Amerika Serikat, dan Koalisi 8 Maret yang disebut pro-Suriah atau pro-Iran. Kedua kubu ini seakan telah secara perlahan menghapuskan sistem konfesional dan sektarian yang telah mendominasi perpolitikan Lebanon selama lebih dari 70 tahun. Setiap kubu memiliki anggota yang berasal dari berbagai kelompok agama, namun pembagian

⁷² *Ibid.*, hlm. 58-60.

utama yang terlihat adalah Koalisi 14 Maret yang mayoritas Sunni, Koalisi 8 Maret yang beraliran Shi'ah, serta kelompok Kristen terbagi menjadi dua.

Proses masuknya Hisbullah dalam perpolitikan Lebanon pasca perang 2006 merupakan hal yang tidak mudah, di mana Hisbullah mendapatkan oposisi yang cukup besar dari Koalisi 14 Maret yang dipimpin oleh Partai Gerakan Masa Depan pimpinan Saad Hariri, putra dari mantan perdana menteri Lebanon Rafik Hariri yang terbunuh pada tahun 2005. Menurut Koalisi 14 Maret, apabila Hisbullah masuk dalam parlemen, maka hal tersebut akan menandakan sebuah pengulangan terhadap kembalinya pengaruh Suriah dalam perpolitikan Lebanon. Lebanon yang telah lepas dari okupasi 30 tahun Suriah sedang berusaha untuk membentuk sebuah pemerintahan yang mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak asing, dan apabila Hisbullah masuk, maka pengaruh Suriah akan kembali muncul dan mempengaruhi perpolitikan kembali.

Penolakan dari pihak oposisi ini telah membawa debat sengit dari Hisbullah, yang menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan uniter yang diwakili oleh seluruh kelompok agama yang terdapat di Lebanon, meskipun pada akhirnya kelompok-kelompok tersebut akan terbagi dalam koalisi-koalisi. Hassan Nasrallah, pemimpin Hisbullah secara langsung meluncurkan ultimatum kepada pihak oposisinya bahwa apabila mereka tidak setuju untuk membentuk sebuah pemerintahan nasional yang bersatu, maka Hisbullah akan siap untuk menyampaikan aspirasi rakyat, menggalang pasukan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran yang akan memenuhi seluruh pelosok Beirut, bahkan menutup akses bandara⁷³. Puncak dari demonstrasi ini adalah pendirian 1000 tenda di Martyr's Square yang dihuni oleh para demonstran Shi'ah dipimpin oleh Hisbullah, yang menyatakan tidak akan bergerak hingga pemerintah setuju untuk membentuk pemerintahan baru⁷⁴. Sebuah perang sipil baru memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk terjadi, di mana Hisbullah telah siap menambah persenjataannya dan tidak sungkan untuk mempersenjatai warga Shi'ah sipil untuk memperjuangkan haknya.

⁷³ Norton, "The Role of Hezbollah in Lebanon Domestic Politics", *Loc. Cit.*, hlm. 484-485.

⁷⁴ *Ibid.*

Meskipun sempat terjadi perseteruan kecil antara Tentara Nasional Lebanon dengan para demonstran, pada akhirnya Hisbullah setuju untuk menunda dibentuknya pemerintahan uniter yang baru pada September 2007. Kompromi yang disetujui oleh Hisbullah adalah bahwa pemerintah akan mengadakan pemilihan presiden baru, melakukan penataan ulang terhadap komposisi kabinetnya, serta berjanji tidak akan berusaha untuk melucuti persenjataan Hisbullah, mengingat bahwa kekuatan Hisbullah telah diakui efektif dalam melakukan resistensi terhadap Israel. Sangat disayangkan, bahwa Lebanon sempat mengalami vakum pada posisi presiden hingga Mei 2008, ketika pada akhirnya Michel Sulaiman, seorang jendral Tentara Nasional Lebanon, terpilih untuk mengisi posisi presiden, dengan persetujuan dan kesepakatan dari Koalisi 14 Maret maupun 8 Maret. Sejak disepakatinya kompromi tersebut pula, Hisbullah mulai memiliki peran yang cukup besar dalam pemerintahan Lebanon, khususnya melalui perwakilan Shi'ah maupun Maronit di dalam kabinet baru. Hisbullah pada akhirnya diakui sebagai bagian dari pemerintahan baru yang bersatu, yang dibentuk setelah pemilihan umum pada 7 Juni 2009 lalu⁷⁵.

⁷⁵ "Lebanon's Government Accommodates Hezbollah", *The Trumpet*, artikel 19 Juni 2009, diakses dari <http://www.thetrumpet.com/index.php?q=6282.4722.0.0>.

BAB 3

HISBULLAH DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI LEBANON

Selama tahun 2006 hingga 2008, Hisbullah mengalami masa kejayaannya di Lebanon, baik secara sosial di mana masyarakat Lebanon telah mempercayai dan mendukung Hisbullah sebagai satu-satunya organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial masyarakat, maupun secara politik di mana Hisbullah telah menjadi sebuah partai legal yang memiliki kursi dalam parlemen, memiliki hak veto dalam memutuskan berbagai kebijakan negara, bahkan memiliki peran dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru yang berhubungan dengan masa depan Lebanon dalam ranah domestik maupun regional dan internasional⁷⁶.

Ketika Lebanon memasuki masa pasca perang besar antara Israel dengan Hisbullah, pemerintahan mengalami inefektivitas karena begitu banyak infrastruktur yang harus dibangun kembali dan masyarakat yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya, namun pemerintah tidak mampu memenuhi semua itu disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak mencukupi serta perpolitikan domestik yang masih dipersulit dengan adanya perang sipil antar kelompok konfesional. Bagi Hisbullah, kondisi ini merupakan kondisi yang paling baik baginya untuk mengembangkan sayapnya dalam berbagai sektor, bukan hanya militer, namun juga politik, ekonomi maupun sosial. Hal ini sangat kontradiktif dengan prediksi Israel maupun Amerika Serikat yang berpikir bahwa tindakan-tindakan konfrontatif Hisbullah selama Perang 34 Hari telah memperburuk citranya di mata masyarakat Lebanon karena telah membawa kehancuran terhadap tempat tinggal dan juga korban jiwa masyarakat sipil. Baik Israel maupun Amerika Serikat menduga bahwa Hisbullah akan dibenci masyarakat Lebanon karena telah menghancurkan kemungkinan terwujudnya sebuah perdamaian antara Lebanon dengan Israel. Kenyataannya adalah Hisbullah mendapatkan popularitas yang lebih besar baik dari masyarakat dan pemerintah Lebanon karena telah berhasil mempertahankan keamanan Lebanon, maupun dari dunia Arab secara

⁷⁶ "Hezbollah's clout in Cabinet grows", *The Los Angeles Times*, artikel 13 Agustus 2008, diakses dari <http://articles.latimes.com/2008/aug/13/world/fg-briefs13.S2>.

keseluruhan karena telah menunjukkan bahwa kekuatan dunia Arab dalam menghadapi Israel masih besar.

3.1. Kebijakan Luar Negeri Lebanon Sebelum Perang 2006

Lebanon sedang berada dalam masa transisi sebelum Perang 2006 antara Hisbullah dan Israel pecah. Perang sipil yang selama ini terjadi baru saja berakhir dengan gencatan senjata, Hisbullah baru saja memasuki ranah politik Lebanon melalui pemilihan umum tahun 2005, Suriah baru saja melepaskan okupasinya dari Lebanon, dan Pemerintah Lebanon baru memulai kembali hubungan bilateral dan regionalnya dengan negara-negara di Timur Tengah, contohnya melalui pelaksanaan sebagai tuan rumah Konferensi Liga Arab untuk pertama kalinya pada tahun 2002, serta penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa pada tahun yang sama⁷⁷. Pemerintah Lebanon memiliki tujuan untuk mengembalikan Lebanon kepada statusnya sebagai sebuah negara yang aman dan bersahabat dengan tetangga-tetangganya, maupun dunia internasional, khususnya untuk menaikkan status kota Beirut itu sendiri yang terkenal sebagai salah satu tujuan wisata dunia.

Namun permasalahan dengan Israel tidak menghilang begitu saja dengan semua usaha yang sedang dilakukan. Meskipun Israel telah menarik mundur pasukannya dari Lebanon Selatan secara unilateral pada tahun 2000, penarikan tersebut dapat dikatakan belum sempurna, mengingat bahwa wilayah yang dikenal sebagai Shebaa Farms masih berada dalam okupasi Israel. Persoalan mengenai kepemilikan wilayah ini masih menjadi perdebatan sengit bagi Hisbullah, yang menyatakan bahwa Shebaa Farms merupakan bagian dari Lebanon yang harus dikembalikan sepenuhnya kepada Lebanon, baik melalui jalur diplomasi dan negosiasi, atau apabila diperlukan, melalui jalur kekerasan dan perang. Pengimplementasian Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1559 yang telah melepaskan Lebanon dari Suriah dapat dikatakan tidak sempurna, mengingat bahwa perjanjian ini tidak berhasil melucuti persenjataan Hisbullah dan membubarkannya. Suriah yang belum mendapatkan kembali wilayah Dataran

⁷⁷ "Lebanon – Foreign Policy", *Encyclopedia of the Nations*, 2005, diakses dari <http://www.nationsencyclopedia.com/World-Leaders-2005/Lebanon-FOREIGN-POLICY.html>.

Tinggi Golan dari Israel juga dengan berat hati menerima keputusan resolusi tersebut.

Suriah yang selama ini mengokupasi Lebanon pertama kali muncul ketika pemerintah Lebanon meminta bantuan kepada Suriah untuk mengintervensi dan menghentikan perang sipil yang telah berkecamuk di negara ini sejak awal tahun 1975 dan memakan lebih dari 150.000 korban jiwa⁷⁸. Suriah juga terus mempengaruhi perpolitikan Lebanon sejak saat itu, membentuk organisasi militer berbasis Shi'ah yang dikenal sebagai Amal, dan juga bersama Iran membentuk Hisbullah, dua kelompok militer yang memegang peranan penting dalam penghentian perang sipil di Lebanon dan penyerangan-penyerangan resistensi terhadap Israel. Ketika Suriah pada akhirnya melepaskan pengaruhnya dari Lebanon, disebabkan oleh pembunuhan mantan perdana menteri Rafik Hariri –di mana Suriah dicurigai sebagai dalang asinasinya- dan juga protes besar dari masyarakat Lebanon yang menginginkan kepergian Suriah atau yang lebih dikenal dengan Revolusi Cedar⁷⁹, perpolitikan domestik dan luar negeri Lebanon sempat diragukan akan menemukan titik stabilitas yang pasti, di mana masyarakat berpikir bahwa perang sipil akan kembali pecah dan Israel akan semakin mengintensifikasi penyerangannya terhadap Lebanon, namun Hisbullah dengan cepat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Suriah, bahkan lebih kredibel dari pemerintah Lebanon dan tentara nasionalnya yang cenderung lemah tersebut. Hisbullah telah berhasil beradaptasi dengan mudah, dari yang sebelumnya mendukung sebuah pemerintahan yang pro-Suriah, menjadi sebuah gerakan yang mengedepankan sebuah pemerintahan uniter yang mandiri, sebuah pemerintahan yang meliputi semua kelompok masyarakat di Lebanon dan bebas intervensi dari aktor asing⁸⁰.

Memasuki tahun 2006, Lebanon telah menyusun berbagai kebijakan luar negeri yang tergolong dalam kategori bersifat damai. Hubungan dagang dan pariwisata mulai dibuka kembali dengan negara-negara Arab lainnya yang sempat

⁷⁸ Daniel Byman, "Lebanon's Hidden Dangers", *Foreign Policy Web Exclusive*, Maret 2005, diakses dari http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=2815.

⁷⁹ Esther Pan, "Lebanon: Election Results", *Council on Foreign Relations*, 20 Juni 2005, diakses dari <http://www.cfr.org/publication/8195/lebanon.html>.

⁸⁰ Byman, *Loc. Cit.*

memutuskan hubungannya karena kondisi Lebanon yang tak kunjung damai dan stabil. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mulai memberikan bantuan dalam bidang ekonomi maupun politik kepada pemerintah Lebanon, khususnya dalam program Amerika Serikat dalam mempromosikan proses demokratisasi kepada Lebanon baru yg telah bebas dari pengaruh tirani Suriah⁸¹. Namun proses restrukturisasi dan pengembalian nama baik ini tidak semudah dan selancar yang diperkirakan, ketika diketahui bahwa Hisbullah meluncurkan sebuah misil anti-tank terhadap dua mobil patroli tentara Israel yang membawa tujuh orang tentara. Dua orang terluka parah, tiga orang tewas, dan dua tentara lainnya diculik oleh Hisbullah⁸². Tindakan yang dilakukan oleh Hisbullah secara sepihak ini telah membawa perang terhadap seluruh Lebanon, di mana Israel meluncurkan rudal dan misil balasan yang menghancurkan rumah-rumah sipil dan membunuh ratusan warga sipil. Israel juga menyatakan bahwa mereka tidak menyerang Hisbullah secara khusus melainkan seluruh Lebanon, karena Hisbullah telah terintegrasi dalam Pemerintah Lebanon, yang berarti bahwa tindakan Hisbullah adalah tindakan Pemerintah Lebanon, dan yang harus mendapatkan balasan bukan hanya Hisbullah tetapi seluruh Lebanon⁸³.

Perang 2006 merupakan salah satu perang paling destruktif yang pernah terjadi di Lebanon maupun di kawasan Timur Tengah. Diakhiri dengan pengimplementasian Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701, Pemerintah Lebanon memiliki agenda baru untuk memperbaiki status negaranya, khususnya dalam bidang hubungan antarnegara. Dalam perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan baru Lebanon kali ini, Hisbullah ikut memainkan peran yang penting, karena organisasi ini telah terintegrasi dalam pemerintahan, dan Pemerintah Lebanon telah mengakui bahwa Hisbullah merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan domestik maupun luar negeri Lebanon.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Almula Turedi, "Lebanon: At the Edge of Another Civil War", dalam *Perceptions*, Spring-Summer 2008, hlm. 21-36.

⁸³ *Ibid.*

3.2. Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Hisbullah Dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri Lebanon

Selama tahun 2006 hingga 2008, Hisbullah ikut berperan dalam perumusan dan pengambilan kebijakan di Lebanon, namun hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang ikut menentukan aktivitas Hisbullah selama ini. Faktor-faktor ini khususnya datang dari aktor-aktor eksternal yang ikut mempengaruhi dinamika politik domestik maupun dinamika internasional Lebanon, yaitu Iran sebagai pendukung utama Hisbullah, Palestina sebagai salah satu tujuan perjuangan Hisbullah selama ini, serta Israel dan Amerika Serikat yang menjadi musuh utama Hisbullah.

3.2.1. Iran

Iran merupakan negara yang memberikan dukungan paling besar bagi Hisbullah hingga saat ini. Dukungan ini muncul dalam bentuk bantuan finansial untuk dana operasional utama semua program Hisbullah selama ini, bentuk bantuan fisik seperti persenjataan dan pelatihan personil kepada kelompok Shi'ah yang terdapat di Lebanon, bentuk ideologis di mana Ayatollah Ali Khomeini merupakan pemimpin spiritual utama mereka dan pemberi dorongan moral bagi para pejuang Hisbullah. Iran juga merupakan negara yang menggagaskan pembentukan Hisbullah sebagai kekuatan militer yang sanggup melawan okupasi Israel di Lebanon serta memfasilitasi dan menaungi masyarakat Shi'ah yang selama ini termarginalisasi di Lebanon, khususnya wilayah Lebanon Selatan. Iran merupakan salah satu negara dengan ideologi yang sangat kuat, dalam hal ini adalah ideologi fundamentalisme Islam berbasis Shi'ah, karena Shi'ah merupakan kelompok dominan di Iran. Ideologi ini begitu kuat dalam mempengaruhi segala aspek kehidupan di Iran termasuk perpolitikan dan perekonomian, dan Iran memiliki keinginan yang sangat besar untuk mempromosikan ideologinya kepada dunia, dimulai dari negara-negara Timur Tengah. Hisbullah merupakan salah satu medianya untuk menyebarkan ideologi ini, khususnya bagi Lebanon dan negara-negara tetangganya⁸⁴.

⁸⁴ Augustus R. Norton, *Hezbollah: A Short History* (New Jersey: Princeton Univ. Press, 2007), hlm. 30-32.

Keberadaan Israel sebagai sebuah negara Yahudi di Timur Tengah dianggap sebagai sebuah duri dalam daging oleh Iran, yang suatu saat akan mempengaruhi seluruh kawasan tersebut dan memperluas pengaruhnya. Oleh karena itu Iran membentuk pasukan-pasukan Islam Shi'ah militan yang bisa melakukan perlawanan terhadap Israel, mengingat bahwa kondisi jarak geografis kedua negara ini cenderung jauh dan kurang memungkinkan dilakukannya konfrontasi langsung. Hisbullah memiliki nilai yang sangat penting bagi Iran untuk meneruskan perlawanannya ini terhadap Israel, mengingat bahwa Lebanon selama ini merupakan medan yang sangat cocok untuk melakukan konfrontasi militer langsung terhadap Israel, dan Lebanon memiliki sumber daya manusia yang cukup -di mana populasi Shi'ah semakin bertambah setiap tahunnya- untuk menyusun kekuatan militernya. Sejak awal pembentukannya, Hisbullah telah mengumumkan bahwa *raison d'etre* yang diusungnya adalah kehancuran Israel, atau yang mereka sebut sebagai 'Palestina yang terokupasi'⁸⁵.

Kepentingan lain yang dimiliki oleh Iran dalam mendukung Hisbullah dalam pemerintah Lebanon adalah program nuklirnya yang hingga saat ini terus dikembangkan. Dengan mendukung Hisbullah untuk terus melakukan perlawanan terhadap Israel, Iran telah berhasil mengalihkan mata masyarakat dan pemerintah negara Timur Tengah lainnya dari isu pengembangan nuklir di Iran⁸⁶. Pengembangan nuklir ini jelas ditujukan untuk menyusun kekuatan militer Iran itu sendiri, dan apabila Israel memfokuskan diri untuk menghentikannya, maka program ini akan mengalami kegagalan besar, oleh karena itulah Iran membutuhkan sebuah pengalih perhatian bagi Israel. Namun perlu diingat bahwa meskipun Iran telah mampu memperoleh senjata nuklir, mereka tidak akan semudah itu memberikannya kepada Hisbullah untuk digunakan sebagai senjata untuk menyerang Israel. Tidak ada negara berkekuatan nuklir yang pernah memberikan aset militernya yang paling

⁸⁵ Ozlem Tur, "The Lebanese War of 2006: Reasons and Consequences" dalam *Perceptions*, Spring 2007, hlm. 109-122.

⁸⁶ Ariel Ilan Roth, "The Root Of All Fears: Why is Israel do Afraid of Iranian Nukes?", *Council on Foreign Relations Snapshots*, diakses dari <http://www.foreignaffairs.com/articles/65692/ariel-ilan-roth/the-root-of-all-fears>.

berharga kepada sebuah aktor pembantu ataupun memberikan kontrol eksklusifnya yang telah dengan susah didapatkan⁸⁷.

Iran bisa dikatakan memiliki agenda yang sangat besar di Timur Tengah, dan Hisbullah beserta Lebanon memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan agenda tersebut. Meskipun hingga saat ini Amerika Serikat maupun Israel secara jelas telah mengaitkan Iran dengan Hisbullah, hal ini tidak menghentikan dukungan Iran terhadap Hisbullah. Ayatollah Khomeini menyatakan bahwa apabila Iran menyerah pada tekanan maka hal itu hanya akan mengundang lebih banyak tekanan. Sehingga kebijakan Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat cenderung mengambil dua sisi yang berlawanan, baik diplomatik ataupun konfrontatif, semua tergantung pada tindakan yang diambil oleh Israel dan Amerika Serikat⁸⁸. Iran memiliki dua tujuan akhir jangka panjang yang masih terus diperjuangkannya, yaitu memperoleh status sebagai hegemon regional dan menyebarkan fundamentalisme Islam, dan kedua tujuan ini tidak akan terpenuhi apabila Iran meluncurkan nuklirnya menuju Israel secara langsung, ataupun meninggalkan pengaruhnya terhadap Hisbullah dan Lebanon⁸⁹.

3.2.2. Israel

Israel memiliki hubungan yang tidak pernah bisa dikatakan baik dengan Lebanon, dan hal ini telah berlangsung selama puluhan tahun, ditandai dengan penyerangan berulang yang terjadi selama lebih dari 50 tahun. Israel telah melakukan penyerangan terhadap Lebanon dimulai dari tahun 1947 pada awal pendirian negara Israel, dilanjutkan dengan penghancuran dua desa di Lebanon, Hanin dan Hula, pada tahun 1967, dan serangan udara terhadap bandara Beirut pada tahun 1968⁹⁰. Israel juga mendanai pasukan bersenjata Kristen sebesar \$150 juta untuk berperang dalam perang sipil selama tahun

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ "Seven Questions: What Iran Wants", *Foreign Policy Web Exclusive*, Juli 2008, diakses dari <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=20293>.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Elizabeth Saleh, "Chronology of Israeli attacks on Lebanon", *Arab Media Watch*, November 2006, diakses dari <http://www.arabmediawatch.com/amw/Default.aspx?tabid=352>.

1975-1977⁹¹. Operasi Litani pada tahun 1978 merupakan penyerangan berikutnya yang dilakukan oleh Israel, menewaskan 96 warga sipil dan ratusan warga luka-luka⁹². Pada tahun 1980, Israel mengokupasi seluruh wilayah selatan Lebanon termasuk Beirut, untuk menghilangkan kekuatan PLO dari negara tersebut, yang dikenal sebagai Operasi Perdamaian untuk Galilee. Pengeboman dan serangan beruntun dilakukan terhadap Beirut untuk menghancurkan PLO, namun justru menewaskan 100 warga sipil dan lebih dari 600 warga mengalami luka parah. PLO pada akhirnya berhasil dibubarkan dari Beirut pada Agustus 1982, namun Israel terus melakukan penyerangan terhadap desa-desa di Lebanon Selatan yang dicurigai menyembunyikan para milisi PLO⁹³. Total korban yang tewas dari operasi ini mencapai jumlah 10.000 jiwa. Perang Tujuh Hari (1993), Operasi Anggur Kemarahan (1996), dan Perang Akuntabilitas yang terjadi pada tahun 1999 merupakan tiga contoh di mana Israel telah menunjukkan kapabilitas militernya yang demikian destruktif, menghancurkan ribuan rumah, sekolah, dan tempat ibadah di Lebanon Selatan, dan juga menunjukkan betapa mudahnya Israel melanggar hak asasi manusia, menewaskan lebih dari 500 warga sipil, melukai ribuan, serta jutaan warga menjadi pengungsi tanpa tempat tinggal serta yang paling buruk dari penyerangan-penyerangan ini adalah penggunaan bom fosfor putih yang beracun⁹⁴.

⁹¹ James D. Fearon & David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 97, No. 1, (Februari 2003), hlm. 75-90.

⁹² Saleh, *Loc. Cit.*

⁹³ Tur, *Loc. Cit.*

⁹⁴ Fosfor putih merupakan sebuah bahan kimia yang biasa digunakan sebagai pemicu pembakaran dalam alat-alat peledak. Ciri khas dari bahan ini adalah asap putih tebal yang dihasilkannya, sehingga biasanya digunakan untuk granat gas air mata. Namun Israel dan Amerika Serikat telah menggunakan fosfor putih dalam rudal dan misil-misilnya, khususnya yang terkenal digunakan pada penyerangan terhadap Irak dan Jalur Gaza. Hal yang membuat penggunaan fosfor putih dilarang oleh PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia adalah efek sampingnya yang mematikan, di mana asap dari fosfor putih dalam jumlah yang banyak dapat membakar dengan cepat segala hal yang dapat terbakar dengan mudah, termasuk baju, bahan bakar, dan kulit manusia. Asap yang dihasilkan dalam jumlah besar juga dapat merusak jaringan otak dan mata manusia. Amerika Serikat dan Israel telah mendapatkan peringatan keras terhadap penggunaan fosfor putih karena penggunaannya dapat dikategorikan dalam pembunuhan massal. Untuk informasi mengenai efek fosfor putih dapat dilihat dalam Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), "White Phosphorus: Health Effects" dalam *Toxicological Profile Information Sheet*, diakses dari <http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/index.html>. Untuk informasi mengenai penggunaan bom fosfor putih oleh Israel dapat dilihat dalam Jaime Jansen, "Lebanon

Dengan sejarah konflik yang begitu banyak, pemerintah Lebanon telah merumuskan kebijakan luar negeri yang mengusahakan perdamaian dengan Israel, khususnya melalui jalur diplomasi dan negosiasi. Kebijakan luar negeri yang selama ini dirumuskan tidak pernah mengedepankan konfrontasi militer karena sudah jelas bahwa angkatan bersenjata Lebanon terlalu lemah untuk melakukan peperangan dengan Israel. Pemerintah terlalu lemah secara finansial untuk mengembangkan persenjataan dan personilnya, sehingga satu-satunya jalur yang tersisa untuk dipilih adalah jalur negosiasi. Sayangnya, Israel tidak pernah memperdulikan berbagai usaha pemerintah Lebanon, bahkan berbagai larangan dari PBB pun tidak diindahkan oleh Israel. Ketika Hisbullah muncul sebagai pihak oposisi yang kerap melakukan resistensi terhadap penyerangan-penyerangan di Lebanon, Israel mendapatkan perlawanan yang cukup besar, di mana sebaliknya kota-kota Israel mengalami serangan rudal dan warga sipilnya menjadi korban dalam konfrontasi-konfrontasi militer antara Tentara Israel dengan Hisbullah⁹⁵.

Konfrontasi paling berdarah antara Hisbullah dengan Israel terjadi pada Perang 34 Hari, atau yg lebih dikenal sebagai Perang 2006. Tujuan Israel dalam Perang 34 Hari pada awalnya adalah membebaskan dua prajuritnya yang ditahan oleh Hisbullah, namun kemudian tujuan itu berubah menjadi ingin menghancurkan atau setidaknya melemahkan kekuatan politik dan militer Hisbullah. Hal ini direalisasikan dengan cara menyerang infrastruktur Lebanon serta lingkungan kelompok-kelompok Kristen maupun Muslim, dengan tujuan bahwa masyarakat akan menyalahkan Hisbullah karena membawa perang kepada rakyat Lebanon⁹⁶. Sayangnya hal tersebut tidak terwujud, karena setelah Hisbullah menunjukkan kapabilitas militernya serta kemampuannya untuk membantu korban sipil yang secara tidak sengaja

claims Israel using banned weapons against civilians” dalam *Paper Chase Newsburst, Jurist Legal News & Research*, (University of Pittsburgh School of Law, Juli 2006).

⁹⁵ Simon Murden, “Understanding Israel’s Long Conflict in Lebanon: The Search for an Alternative Approach to Security during the Peace Process” dalam *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 27, No. 1, (May 2000), hlm. 25-47.

⁹⁶ Tur, *Loc. Cit.*

menjadi target Israel, justru telah meningkatkan popularitas dan dukungan dari masyarakat Lebanon.

Tujuan lain Israel dalam perang tersebut adalah untuk memulihkan kredibilitas pencegahan secara militernya, bukan hanya terhadap Hisbullah tetapi juga seluruh kawasan Timur Tengah. Penyerangan yang dilakukan terhadap Lebanon merupakan pesan yang ditujukan kepada Hisbullah, Iran, serta Suriah⁹⁷. Meskipun masyarakat Arab secara keseluruhan telah melihat bahwa Hisbullah telah berhasil memukul mundur pasukan Israel, Israel tetap bersikeras untuk menyatakan bahwa kekuatan militernya tidak pernah mengalami degradasi, dan kekuatannya untuk menjaga keamanannya dengan cara menyerang pihak-pihak yang dirasakan mengancam masih tinggi. Bahkan, akhir dari Perang 2006, yaitu pengimplementasian Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701, bisa dikatakan lebih menguntungkan Israel, mengingat bahwa Hisbullah harus menyerahkan senjatanya sedangkan Israel diperbolehkan untuk mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan hingga pasukan UNIFIL yang telah diperkuat dikerahkan di wilayah tersebut⁹⁸.

Kebijakan luar negeri Lebanon yang saat ini ikut dirumuskan oleh Hisbullah memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih ofensif terhadap Israel, mengingat bahwa selama ini Hisbullah dan Israel memiliki hubungan yang sangat buruk, dan kali ini Hisbullah telah mendapatkan kekuatan yang lebih besar sebagai bagian dari Pemerintah Lebanon. Israel sendiri memiliki beberapa hal yang masih harus diperhatikannya, seperti isu pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran, yang selama ini seakan tidak tersentuh karena terlalu disibukkan dengan konfrontasi Hisbullah. Israel takut bahwa ambisi nuklir Iran dapat melemahkan superioritas kualitatif persenjataan dan juga kemampuannya untuk menghancurkan musuh-musuhnya, dua hal yang menjadi landasan utama strategi pertahanan Israel⁹⁹. Selain itu, Israel memiliki

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Roth, *Loc. Cit.*

⁹⁹ Tur, *Loc. Cit.*

kemungkinan yang sangat kecil untuk menyerang Iran secara langsung, dan lebih berusaha untuk mengintimidasi Iran untuk berkompromi¹⁰⁰.

3.2.3. Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu aktor yang ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri Lebanon, juga mempengaruhi segala tindakan yang akan diambil oleh Hisbullah. Amerika Serikat terkenal sebagai salah satu negara yang memberikan dukungan penuh terhadap semua kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Israel, termasuk semua penyerangan yang telah melanggar begitu banyak hukum internasional, termasuk hukum perang dan hukum humaniter. Hal ini pada dasarnya dilakukan oleh Amerika Serikat karena Israel merupakan aliansi terkuatnya di Timur Tengah, aliansi yang dapat membantu Amerika Serikat untuk mempromosikan paham demokrasi dan juga ikut menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan hegemon dunia yang juga memiliki pengaruh besar terhadap kawasan Timur Tengah. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat terus memberikan dukungan materi maupun diplomasi bagi Israel, tanpa mempedulikan siapa yang pada saat itu menempati kursi di Ruang Oval Gedung Putih. Namun tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush memiliki agenda dan kebijakan-kebijakan yang paling destruktif dan tidak menguntungkan bagi negara-negara Timur Tengah. Administrasi George W. Bush lebih mengandalkan kekuatan militer dibandingkan jalur diplomasi, menunjukkan bahwa mereka tidak sungkan untuk melanggar norma legal internasional, tidak memperdulikan korban sipil yang banyak, bahkan memberlakukan standar ganda pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menjaga keamanan nasional serta mempromosikan tujuan-tujuan nasionalnya¹⁰¹.

Namun seharusnya George W. Bush sadar bahwa tindakan yang dilakukannya terhadap Timur Tengah justru akan memiliki dampak yang sebaliknya dari yang diharapkan akan terwujud. Selama beberapa tahun ini, bisa kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat

¹⁰⁰ "Seven Questions: Iran", *Loc. Cit.*

¹⁰¹ Stephen Zunes, "Why the Dems Have Failed Lebanon" dalam *FPIF Commentary*, (Silver City, NM and Washington, DC: Foreign Policy In Focus, August 9, 2006).

hanya semakin meradikalisasi kawasan Timur Tengah dan meningkatkan dukungan terhadap Hisbullah serta ekstrimis lainnya yang mengusung metode terorisme¹⁰². Penekanan dan persuasi menggunakan kekerasan akan memberikan umpan balik berupa kekerasan pula, dan keinginan Amerika Serikat untuk mempromosikan demokrasi akan semakin tertutup peluangnya. Amerika Serikat justru sebaliknya mendapatkan reputasi sebagai pembela Israel yang merupakan musuh bersama negara-negara Arab, yang akan mengusahakan berbagai cara untuk melegalsir segala tindakan yang dilakukan oleh Israel. Amerika Serikat memiliki sebuah obligasi moral untuk mendukung Israel dalam menegakkan demokrasi dan kebebasan di atas teror dan radikalisme, karena apabila tidak maka hal itu berarti melemahkan keamanan nasional mereka¹⁰³.

Apabila kita melihat perpolitikan domestik di Amerika Serikat sendiri, yaitu perseteruan dan perlombaan antara Partai Republikan dan Partai Demokrat, seharusnya isu mengenai Timur Tengah dapat menjadi senjata rahasia bagi Partai Demokrat. Selama di bawah pimpinan George W. Bush yang notabene merupakan seorang Republikan, Amerika Serikat terus menunjukkan bahwa dirinya merupakan sebuah negara adikuasa yang tidak segan untuk menggunakan kekuatan militernya untuk memaksakan kehendak dan mewujudkan tujuan-tujuan nasionalnya. Partai Demokrat sebagai pihak oposisi bisa mengambil jalur yang berlawanan dan menentang kebijakan-kebijakan yang cenderung kontroversial tersebut untuk memperoleh dukungan yang lebih banyak. Kenyataannya, baik Partai Demokrat maupun Republikan mendukung tindakan yang dilakukan oleh Israel, dengan dasar bahwa Israel selama ini terus berkomitmen dalam meminimalisir korban jiwa dan berusaha mencegah terjadinya korban sipil. Mereka juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel untuk masyarakat Israel itu sendiri, sesuai dengan hukum internasional¹⁰⁴.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Jeremy Pressman, "The United States and the Israel-Hezbollah War" dalam *Middle East Brief*, The Crown Center for Middle East Studies of Brandeis University, No. 13, November 2006, hlm. 1-8.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Badan internasional seperti PBB dan lembaga-lembaga humaniter lainnya telah memberikan larangan kepada Amerika Serikat untuk membantu Israel, khususnya dalam hal persenjataan. Bahkan *Arms Control Export Act* atau Undang-undang Ekspor Mengenai Kontrol Persenjataan milik Amerika Serikat sendiri melarang transfer persenjataan kepada negara-negara yang menggunakan senjata Amerika untuk tujuan non-defensif, sebagai contoh untuk menyerang warga sipil. Namun hal tersebut seakan tidak berlaku bagi Israel karena tindakan Israel kepada warga Palestina dan Lebanon selama ini adalah “pertahanan diri yang sah”¹⁰⁵. Penyerangan terhadap warga sipil tidak dihitung sebagai pelanggaran penggunaan persenjataan dan pelanggaran hak asasi manusia, karena Israel hanya melakukan serangan balasan terhadap seranga yang diterima sebelumnya, dan Amerika Serikat melihat hal ini sebagai fakta yang dibenarkan sepenuhnya.

Tidak adanya tekanan dari kelompok-kelompok liberal yang menentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang mendukung Israel menyebabkan Administrasi Bush terus menerapkan kebijakan-kebijakan ini¹⁰⁶. Pihak yang seharusnya melakukan protes dan perlawanan seakan tidak berkutik, dan apabila memang ada kelompok yang menentang, maka protes tersebut seakan tidak memiliki efek, karena keputusan pemerintah adalah absolut. Seharusnya Amerika Serikat sadar bahwa apabila mereka menentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon dan Palestina, seharusnya dapat memberikan Amerika Serikat sebuah kesempatan untuk menunjukkan dunia bahwa mereka mendukung terciptanya perdamaian, keamanan, dan kebebasan bagi seluruh masyarakat Timur Tengah, dengan cara bersikeras terhadap Israel untuk mengadakan gencatan senjata dan melakukan negosiasi komprehensif berdasarkan konsensus internasional. Namun Administrasi Bush justru menyatakan bahwa kepentingan Amerika Serikat justru terwujudkan dengan cara mengizinkan Israel membunuh warga Lebanon sebanyak-banyaknya. Pembunuhan dan penyerangan terhadap negara-negara yang digolongkan oleh

¹⁰⁵ Gawdat Bahgat, “Iran and the United States: The Emerging Security Paradigm in the Middle East” dalam *Parameters*, Summer 2007, hlm. 5-18.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Amerika Serikat sebagai “negara-negara pengusung terorisme yang mengancam perdamaian dunia”, merupakan satu-satunya pilihan yang paling efektif untuk menjaga keamanan nasionalnya, keamanan Israel, serta keamanan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Padahal, dengan menentang kebijakan dan tindakan-tindakan destruktif Israel selama ini, sebenarnya Amerika Serikat mendapatkan beberapa keuntungan¹⁰⁷:

1. Gencatan senjata di Lebanon dan sebuah resolusi yang adil terhadap isu Palestina akan mempromosikan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan lebih mudah. Pasar Timur Tengah akan lebih terbuka terhadap Amerika Serikat.
2. Perdamaian di Timur Tengah akan memperkuat perang global terhadap terorisme.
3. Legitimasi Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia akan semakin kuat.
4. Nilai-nilai Amerika akan semakin terpromosikan secara global.

Amerika Serikat dan Inggris sempat menunda tuntutan komunitas internasional kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata terhadap situasi ini, karena ingin melihat Israel berhasil melumpuhkan Hisbullah secara total¹⁰⁸.

Dengan melihat hal ini, Hisbullah yang kini ikut merumuskan kebijakan luar negeri Lebanon cenderung melihat kemungkinan yang akan terjadi apabila Amerika Serikat masih memegang peranan dalam Lebanon. Seperti yang kita ketahui, Koalisi 14 Maret merupakan pihak oposisi Hisbullah dalam parlemen yang bersifat pro-Amerika, sehingga jelas bahwa Hisbullah akan memberikan perhatian lebih kepada segala usul yang datang dari pihak oposisi, karena kepentingan Amerika Serikat akan sangat bermain dalam hal ini.

3.2.4. Palestina

Palestina merupakan salah satu aktor yang sangat mempengaruhi segala tindakan yang akan diambil oleh Hisbullah, baik sebelum maupun sesudah

¹⁰⁷ Zunes, *Loc. Cit.*,

¹⁰⁸ Patrick Vibert, “Three Years Since 2006 War”, Lebanon World Affairs Network, diakses dari <http://lebanon.foreignpolicyblogs.com/2009/07/11/three-years-since-2006-war/>.

Hisbullah terintegrasi dalam pemerintah Lebanon. Hampir semua gerakan-gerakan militan Islam yang berkembang di Timur Tengah memiliki satu tujuan bersama yang telah mendasari pergerakan mereka terhadap Israel, yaitu sesuatu yang dikenal dengan istilah *The Palestinian Cause*. Selain Hisbullah, terdapat Hamas dan juga PLO yang bergerak dengan dasar yang sama, yaitu membebaskan Palestina dari tirani Israel selama ini, serta mengembalikan wilayah-wilayahnya yang telah terokupasi ataupun teraneksasi oleh Israel.

Hisbullah dan Lebanon memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan Palestina, khususnya dalam hal menghadapi Israel ataupun kesamaan latar belakang sejarah etnisnya. Kelompok Shi'ah merupakan mayoritas di Palestina, dan sejak Israel menyerang Palestina selama lebih dari 50 tahun, warga Palestina banyak yang menjadi pengungsi dan mencari suaka di Lebanon Selatan. Terhitung lebih dari satu juta jiwa warga Palestina menjadi pengungsi ke Lebanon karena kehilangan tempat tinggal, tekanan fisik serta tekanan mental dari penyerangan-penyerangan Israel. Selain itu, baik Lebanon ataupun Palestina menyandang status sebagai sebuah '*penetrated country*' karena telah menjadi sebuah medan perang, lahan perkembangan regional, serta sandera regional dalam konflik Arab-Israel, khususnya dari dekade 1960-an hingga sekarang¹⁰⁹. Sebuah *penetrated country* akan sangat sulit mendapatkan kedaulatan dan kondisi politik ataupun ekonomi yang stabil, dikarenakan negara-negara ini kerap mengalami intervensi dari pihak luar yang telah menyebabkan destabilisasi politik berkepanjangan¹¹⁰, suatu hal yang telah dialami oleh Lebanon dan Palestina sejak pembentukannya.

Keberadaan kelompok Shi'ah sebagai mayoritas di Palestina juga merupakan salah satu faktor pendukung bagi kerjasama Hisbullah dengan warga Palestina untuk melawan Israel. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Hisbullah merupakan produk dari Iran yang mengedepankan fundamentalisme Islam Shi'ah sebagai pedoman utama politik dan bernegaranya. Salah satu tujuan utama Iran adalah untuk menyebarkan fundamentalisme Islam tersebut

¹⁰⁹ Tom Pierre Najem, "Lebanon and Europe: The Foreign Policy of a Penetrated State" dalam Gerd Nonneman (ed.), *Analysing Middle East Foreign Policies and the Relationship with Europe*, (London: Routledge, 2005), hlm. 100-122.

¹¹⁰ *Ibid.*

serta membangkitkan kembali kelompok Shi'ah yang sempat menjadi kelompok yang mengalami penekanan oleh kaum Sunni¹¹¹. Hisbullah bisa dengan cepat mendapatkan perhatian dan dukungan dari warga Palestina karena telah dengan sukses menunjukkan bahwa selain organisasi ini memiliki kekuatan militer untuk melakukan perlawanan terhadap Israel, Hisbullah juga mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warga Shi'ah di Lebanon Selatan¹¹². Dengan bukti ini, Hisbullah telah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan perlindungan yang sangat baik kepada kaum Shi'ah, ataupun yang membutuhkan bantuannya, dan warga Palestina yang melihat hal ini semakin percaya bahwa Hisbullah mampu membawa kemenangan terhadap konflik yang selama ini terjadi antara Palestina dengan Israel.

Satu hal yang sangat penting yang harus diingat oleh Hisbullah adalah bahwa tindakan-tindakannya yang berupa penyerangan langsung terhadap Israel, justru bisa memperparah hubungan antara Palestina dengan Israel, dan proses perdamaian yang ingin diusahakan justru akan memiliki kemungkinan besar untuk mengalami kegagalan¹¹³. Meskipun mayoritas warga Palestina menginginkan gencatan senjata permanen antara Palestina-Hisbullah-Israel, warga tersebut tidak menginginkan adanya perdamaian dengan Israel, karena menurut mereka Israel masih harus mengembalikan wilayah yang telah direbut¹¹⁴. Jalur yang diinginkan oleh warga Palestina adalah jalur diplomasi, dan mereka menginginkan Hisbullah sebagai penjaga keselamatan mereka hingga proses negosiasi bisa diselesaikan.

3.3. Pengaruh Hisbullah dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri Lebanon terhadap Israel

Sebelum membahas bagaimana Hisbullah ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri Lebanon terhadap Israel, merupakan suatu hal yang penting untuk memahami mengapa pada akhirnya Koalisi 14 Maret yang telah memenangkan

¹¹¹ "Seven Questions: Iran", *Loc. Cit.*

¹¹² Norton, *Hezbollah, Op. Cit.*, hlm. 132-134.

¹¹³ Kamal Nawash, "Israel/Palestine and Terrorism", diakses dari http://www.crescentlife.com/heal%20the%20world/israel_palestine_&_terrorism.htm.

¹¹⁴ Near East Consulting, "Palestinian Perceptions towards Politics, Peace, and the Conflict in the Lebanon", *NEC Release*, 7 Agustus 2006.

pemilihan umum terakhir dan sebelumnya menolak untuk membentuk sebuah pemerintahan baru yang uniter, menyetujui tuntutan Hisbullah. Sudah jelas bahwa Hisbullah merupakan aktor yang sangat penting di Lebanon dalam segala sektor. Pada sektor ekonomi, Hisbullah telah membantu rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat serangan-serangan Israel selama ini. Selain itu, Hisbullah juga membantu warga Lebanon untuk kembali membangun hidup, dengan menyediakan bantuan finansial bagi keluarga yang membutuhkan, membuka lapangan kerja baru, serta membangun rumah sakit, saluran air, hingga sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat Lebanon. Secara politik, Hisbullah telah menunjukkan kemampuannya dalam memerintah wilayah Lebanon Selatan yang kini memiliki struktur politik yang stabil, dengan tingkat kemakmuran yang jauh berbeda dengan sebelum Hisbullah berdiri. Secara militer, Hisbullah telah meyakinkan pemerintah Lebanon bahwa mereka memiliki kapabilitas yang sangat tinggi untuk mengantisipasi serta meretaliasi segala bentuk serangan dari Israel dan Amerika Serikat. Selain itu, sejak Lebanon terlepas dari pengaruh Suriah, Hisbullah telah berperan sebagai aktor yang menjaga stabilitas perdamaian antar kelompok agama, menghapuskan kemungkinan untuk kembali pecahnya sebuah perang sipil.

Dengan bukti-bukti kuat yang telah ditunjukkan oleh Hisbullah tersebut, tidak ada lagi alasan bagi Saad Hariri yang berlaku sebagai Perdana Menteri, untuk mengajak Hisbullah untuk ikut berperan dalam pemerintah Lebanon. Meskipun demikian, Hisbullah belum diberikan kekuatan veto¹¹⁵. Sebagai gantinya, telah disepakati bersama beberapa perjanjian mutual yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah Lebanon akan mengusahakan sepenuhnya bahwa isu mengenai persenjataan Hisbullah tidak akan pernah dibahas kembali oleh pihak luar, dan Hisbullah mendapatkan posisi lebih banyak dalam menempatkan perwakilannya dalam kabinet baru. Sebaliknya, Hisbullah setuju untuk bertindak sebagai aktor militer utama Lebanon hingga Tentara Nasional Lebanon telah menyusun kembali kekuatannya dan memperbaiki kredibilitasnya.

¹¹⁵ "Lebanon's Government Accommodates Hezbollah", *Log. Cit.*

Meskipun tidak memiliki hak veto, posisi Hisbullah terbilang sangat strategis dalam pemerintah Lebanon, mengingat bahwa organisasi ini merupakan pemimpin dari pihak oposisi bagi Koalisi 14 Maret yang dipimpin oleh Saad Hariri. Popularitas Hisbullah dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya di Lebanon dapat dikatakan merupakan yang paling tinggi, bukan hanya di antara kaum Shi'ah saja, tetapi juga warga Lebanon lainnya. Semua ini karena Hisbullah telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai sebuah pasukan dan kekuatan resistensi terhadap Israel. Oleh karena itu, resistensi terhadap Israel inilah yang kini menjadi objektif utama Hisbullah dalam pemerintah, menyatakan bahwa Israel merupakan musuh bersama yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Lebanon secara bersatu, karena baik Shi'ah, Sunni, Maronit, atau kelompok lainnya di Lebanon, semua merasakan betapa sakitnya serangan-serangan rudal dari Israel, yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Lebanon tanpa pandang bulu.

Hisbullah secara gamblang menyatakan bahwa kekuatan militernya sangat sanggup untuk menghadapi Israel, kapanpun Israel melakukan penyerangan kembali terhadap Lebanon. Persenjataan yang lengkap, dukungan masyarakat secara penuh, dan legalitas untuk beroperasi yang telah didapatkannya dari bergabung dalam pemerintah Lebanon, seakan telah menyempurnakan posisi Hisbullah di Lebanon. Hal ini bahkan sempat mengundang pertanyaan apakah Hisbullah berniat untuk meng kudeta pemerintah Lebanon dan mengubah sistem pemerintahan Lebanon menjadi sebuah negara berdasarkan fundamentalisme Islam. Kekuatan fisik Hisbullah sangat memadai untuk sebuah kudeta, namun hal ini tidak dilakukan, karena seperti yang dikatakan oleh Hassan Nasrallah kepada Rafik Hariri pada tahun 2000: "Kami tidak memiliki kewarganegaraan kedua. Kami lahir di sini, kami akan mati di sini, dan kami akan dimakamkan di sini. Kami kelaparan di sini dan akan memenuhi nafsu kami di sini, maka jelas bahwa tidak ada yang boleh melarang patriotisme dan hak kami untuk merasa sebagai bagian dari Lebanon"¹¹⁶.

Apabila kita melihat secara detil mengenai indikator-indikator yang menunjukkan menguatnya posisi Hisbullah dalam pemerintah Lebanon, maka kita

¹¹⁶ Norton, "The Role of Hezbollah in Lebanon Domestic Politics", *Loc. Cit.*, hlm. 489.

akan membahas lebih lanjut mengenai kekuatan dan pengaruh militernya, serta kekuatan dan pengaruhnya dalam parlemen maupun kabinet Lebanon. Secara militer, jelas bahwa Hisbullah kalah oleh Tentara Nasional Lebanon, khususnya dalam hal jumlah personil. Lebanon memiliki 72.000 personil militer aktif, dengan jumlah senjata mencapai 4.000 pucuk, serta lebih dari 200 kendaraan militer meliputi darat, laut dan udara¹¹⁷. Di sisi lain, personil tetap Hisbullah hanya 1.000 orang, dengan 10.000 sukarelawan yang berasal dari kelompok Shi'ah maupun Maronit. Namun semua personil maupun sukarelawan Hisbullah mendapatkan pelatihan militer khusus dari intelijen Iran, baik dalam strategi perang maupun cara pengoperasian peralatan tempur. Persenjataan Hisbullah meliputi rudal-rudal jarak jauh seperti Zelzal-1 yang memiliki radius 150 km, maupun misil-misil anti-tank dan anti-udara seperti Sagger, Spiggot, maupun SA-18 SAM yang memiliki daya hancur cukup besar dan mobilitas tinggi¹¹⁸, semuanya mencapai jumlah lebih dari 13.000 buah.

Dengan jumlah kekuatan yang lebih kecil ini, Hisbullah mampu mengambil alih kontrol kekuatan militer di Lebanon, hal ini disebabkan oleh dua hal yang sangat penting. Pertama, pelatihan yang diterima serta kesiapan tempur pasukan Hisbullah jauh lebih mapan dibandingkan dengan Tentara Nasional Lebanon. Pasukan Hisbullah lebih efektif dalam melancarkan strategi-strategi gerilya, infiltrasi, maupun serangan pengeboman. Tentara Nasional Lebanon yang tidak mendapatkan pelatihan, serta peralatan militernya yang tidak mengalami pembaharuan, cenderung tertinggal. Kedua, permasalahan politik domestik Lebanon juga dirasakan dalam Tentara Nasional Lebanon, di mana perpecahan sektarian bisa terjadi kapanpun, dan kekuatan pasukan militer tersebut akan terpecah belah menurut kelompok konfesional masing-masing. Semenjak Hisbullah masuk dalam pemerintah Lebanon, kedua hal ini telah mengalami perbaikan. Pelatihan militer lebih intensif, dan Tentara Nasional Lebanon juga dipersiapkan untuk strategi gerilya maupun dilatih dalam mengoperasikan peralatan militer yang dimiliki oleh Hisbullah. Selain itu, semenjak Hisbullah

¹¹⁷ "Lebanon Military Strength", *Global Fire Power*, 2008 Data, diakses dari http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Lebanon.

¹¹⁸ Frank Gardner, "Hezbollah Missile Threat Assessed", *BBC News*, 3 Agustus 2008, diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5242566.stm#rocket.

masuk dalam pemerintahan Lebanon, segi militer Lebanon juga ikut dipengaruhi olehnya, di mana 40 persen dari Tentara Nasional Lebanon yang merupakan kelompok Shi'ah, berada di bawah kontrol Hezbollah¹¹⁹.

Dari segi politik, Hezbollah mengalami kenaikan posisi yang cukup besar dibandingkan dengan hasil pemilihan umum pada tahun 2007. Dalam pemerintahan baru yang uniter ini, Hezbollah dan Koalisi 8 Maret mendapatkan 10 posisi kementerian, sedangkan pihak oposisi mendapatkan 15 posisi, dan lima kursi kementerian sisanya diberikan kepada Presiden Sulaiman untuk memilih. Pembagian kursi seperti ini diperuntukkan agar tidak ada satu pihak yang lebih dominan. Meskipun Koalisi 14 Maret memiliki 15 kursi kementerian karena kemenangannya dalam pemilihan umum tahun 2009, Hezbollah dan Koalisi 8 Maret tetap memiliki posisi yang signifikan dengan dominasi militer serta keunggulannya dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat Lebanon. Hezbollah akan menempati empat kursi yang penting dalam kabinet uniter yang baru, di mana salah satunya adalah posisi Menteri Telekomunikasi, posisi yang sangat penting untuk mempertahankan jaringan komunikasi rahasia Hezbollah yang sempat diputuskan pada tahun 2008¹²⁰.

Saat ini, satu-satunya hal menyangkut kebijakan luar negeri Lebanon yang dianggap paling penting oleh Hezbollah adalah respon Lebanon ke depannya terhadap Israel. Israel telah menyatakan dengan jelas bahwa saat ini Hezbollah merupakan bagian dari pemerintah Lebanon, oleh karena itu segala tindakan yang diambil oleh Hezbollah terhadap Israel merupakan tindakan Lebanon sebagai satu kesatuan, dan respon yang akan diberikan oleh Israel terhadap hal tersebut akan dirasakan oleh seluruh Lebanon tanpa pandang bulu. Pemerintah Lebanon tidak lagi bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hezbollah bukanlah tindakan

¹¹⁹ STRATFOR, "Lebanon: Hezbollah's Control over the Military", *Reform Party of Syria*, 7 Agustus 2009, diakses dari <http://reformsyria.org/intelligence/regime-against-others/3183-lebanon-hezbollahs-control-over-the-military.html>.

¹²⁰ Hussein Dakroub, "Lebanon Premier unveils new Cabinet with Hezbollah", *Antiwar Newswire*, 9 November 2009, diakses dari <http://wire.antiwar.com/2009/11/09/lebanon-premier-unveils-new-cabinet-with-hezbollah-2/>.

pemerintah Lebanon, mereka tidak lagi bisa melepaskan diri dari hubungannya dengan Hisbullah¹²¹.

Apabila kita melihat kepentingan aktor-aktor eksternal terhadap Hisbullah di atas, jelas bahwa semua hal itu mendukung satu tujuan global yang sama, yaitu perlawanan terhadap Israel, dan perumusan kebijakan luar negeri Lebanon tidak akan pernah terlepas dari dinamika regional dan internasional yang selama ini menyangkut peranan Hisbullah di dalamnya¹²². Iran yang merupakan pendukung utama Hisbullah menekankan pentingnya Hisbullah melakukan perlawanan terhadap Israel. Dua program utama Iran, yaitu muncul sebagai hegemon regional di Timur Tengah dan juga menyebarkan fundamentalisme Islam, tidak akan berhasil apabila Israel masih memiliki posisi yang dominan seperti saat ini. Melalui Hisbullah, Iran mencoba untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Lebanon agar perlawanan terhadap Israel menjadi prioritas utamanya. Palestina pun demikian, di mana Hisbullah yang terus memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan kembali wilayah-wilayahnya yang direbut oleh Israel akan terus didukung. Kenyataan di mana warga Palestina percaya bahwa stabilitas regional dan perdamaian abadi di Timur Tengah akan sulit dicapai apabila tidak menggunakan kekuatan militer dan konfrontasi bersenjata, telah semakin memperkuat justifikasi Hisbullah untuk membawa Lebanon untuk berperang dengan Israel.

Ancaman yang diberikan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Lebanon dan Hisbullah juga telah semakin memperkuat kekuatan Hisbullah untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Lebanon yang lebih ofensif terhadap Israel. Negosiasi akan cenderung mengalami jalan buntu selama Israel yang didukung penuh Amerika Serikat terus memberikan tekanan terhadap Lebanon menggunakan kekuatan militer. Hisbullah telah meyakinkan pemerintah bahwa Lebanon harus bisa memperkuat pertahanannya untuk memberikan *deterrence* kembali pada Israel, meskipun pada akhirnya Lebanon harus

¹²¹ Mohamad Bazzi, "Lebanon's Shadow Government: How Hezbollah wins by losing", *Foreign Affairs Snapshot*, 11 September 2009, diakses dari <http://www.foreignaffairs.com/articles/65405/mohamad-bazzi/lebanon%E2%80%99s-shadow-government>.

¹²² Christopher D. Hamilton, "Hezbollah's Global Reach", *Hearing of the House Committee on International Relations Testimonial*, 28 September 2006.

menggunakan Hisbullah sebagai ujung tombak pertahanannya tersebut. Sebuah tekanan dalam bentuk kekuatan militer tidak akan bisa dilawan dengan tekanan diplomatif dan negosiatif, melainkan dengan tekanan militer kembali. Hal ini juga yang menjadi pedoman utama strategi keamanan Israel, di mana selama puluhan tahun strategi keamanannya berupa serangan-serangan *preemptive*, melemahkan semua pihak yang memiliki ancaman eksternal terhadap keamanan nasionalnya sebelum ancaman tersebut muncul ke permukaan¹²³.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri Lebanon terhadap Israel ke depannya akan memiliki bentuk yang cenderung non-kooperatif, bahkan konfrontatif dan ofensif, mengingat bahwa Hisbullah telah memberikan masukan yang cukup banyak terhadap pemerintah Lebanon. Kemampuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap segala kebijakan Lebanon belum sepenuhnya ada, mengingat bahwa kekuatan veto belum dimiliki oleh Hisbullah. Namun jelas bahwa oposisinya dalam pemerintah Lebanon paham bahwa Hisbullah akan menggunakan segala cara yang memungkinkan agar usul dan masukannya dimasukkan dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan perumusan serta penetapan kebijakan-kebijakan luar negeri maupun domestik, seperti yang jelas telah ditunjukkan oleh Hisbullah pada tahun 2006 ketika menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan baru yang uniter, dan juga pada tahun 2008 pada saat menjelang pemilihan presiden baru¹²⁴.

¹²³ Murden, *Loc. Cit.*, hlm. 35.

¹²⁴ Hamilton, *Op. Cit.*

BAB 4 KESIMPULAN

Perpolitikan di Lebanon bisa dikatakan tidak pernah menemui stabilitas yang berarti, mengingat bahwa negara ini terus mengalami pergolakan politik secara domestik yang disebabkan oleh sistem konfesional dan sektarian yang telah berkembang sejak pendiriannya, maupun pergolakan politik internasional yang disebabkan oleh bermainnya aktor-aktor eksternal dalam negara ini. Secara regional, Lebanon telah menjadi sebuah medan perang bagi negara-negara tetangganya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konflik Arab-Israel maupun konflik Israel-Palestina yang hingga saat ini terus terjadi. Tekanan militer dari Israel yang selama ini terwujud dalam bentuk penyerangan dan okupasi, telah membangkitkan beberapa aktor *non-state* yang berusaha untuk mengatur kembali stabilitas politik, ekonomi, maupun sosial yang telah hancur oleh tirani negara-negara adikuasa.

Hisbullah muncul di Lebanon sebagai sebuah badan militer independen yang memiliki tujuan utama sebagai pemimpin resistensi terhadap Israel. Organisasi ini didirikan oleh Iran dan Suriah, dua negara yang memiliki agenda tersendiri dengan Israel, sebagai media pelaksana *proxy war* dengan Israel, serta sebagai organisasi yang dapat mendongkrak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Shi'ah di Lebanon. Pada akhirnya, Hisbullah telah berkembang pesat, bukan hanya sebagai sebuah kekuatan militer yang mampu diperhitungkan dalam skala regional, tetapi juga sebagai sebuah organisasi kesejahteraan rakyat yang memiliki berbagai institusi yang meliputi berbagai sektor kehidupan masyarakat Lebanon.

Lebanon yang selalu mengalami instabilitas politik dan ekonomi, merupakan tempat yang sangat sesuai bagi Hisbullah untuk berkembang dan melebarkan sayapnya. Pemerintah Lebanon yang lemah, institusi-institusi sosial dan ekonominya yang inefektif, serta tentara nasionalnya yang cenderung inkapabel untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan masyarakatnya, hal-hal ini lah yang telah membuka jalur bagi Hisbullah untuk berperan lebih banyak di Lebanon, khususnya dengan aliran dana serta bantuan

teknis yang tidak kecil dari para sponsornya. Namun, keberadaan Hisbullah juga telah mengundang kontroversi terhadap masyarakat internasional, khususnya Israel, Amerika Serikat, dan juga negara-negara Barat lainnya, di mana untuk memenuhi tujuannya, Hisbullah tidak jarang menggunakan metode-metode teror. Amerika Serikat dan beberapa negara yang menentang keberadaan Hisbullah telah mengkategorikan organisasi ini termasuk dalam badan-badan terorisme internasional yang akan mengganggu usaha-usaha proses perdamaian di Timur Tengah.

Penggunaan metode teror oleh Hisbullah hanya merupakan langkah awalnya dalam melakukan perkembangan lebih lanjut, di mana sekarang, Hisbullah menjadi salah satu organisasi terbesar di bidang sosial maupun ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lebanon pada umumnya, serta kaum Shi'ah di Lebanon maupun Palestina pada khususnya. Hisbullah telah berkembang dari sebuah organisasi militer radikal, menjadi sebuah *state-building movement* yang melakukan donasi-donasi sosial, bantuan rekonstruksi infrastruktur, maupun menstabilkan politik domestik Lebanon yang selama ini diberatkan oleh adanya segregasi sosial antar kelompok agama dan etnis.

Selain itu, memasuki dekade 1990-an hingga sekarang, Hisbullah menjadi salah satu aktor dominan dalam kancah perpolitikan Lebanon, di mana organisasi ini telah menyandang status sebagai salah satu partai politik resmi di Lebanon yang mengikuti pemilihan umum dan memiliki perwakilan dalam parlemen. Memasuki pertengahan tahun 2009, Hisbullah pada akhirnya telah berhasil turut serta dalam membentuk sebuah pemerintahan uniter bersama pihak oposisinya dalam pemerintahan selama ini, yaitu Koalisi 14 Maret. Meskipun organisasi ini belum diberikan hak veto untuk dalam penentuan-penentuan kebijakannya, Hisbullah tetap memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi berbagai kebijakan yang akan diambil oleh Lebanon, termasuk kebijakan terhadap musuh utama Hisbullah yaitu Israel.

Negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat menyatakan bahwa keterlibatan lebih besar dari Hisbullah dalam pemerintah Lebanon akan membawa kesulitan yang lebih besar bagi Israel khususnya untuk menjadi hegemon di Timur

Tengah, karena Lebanon kini akan memberikan respon yang lebih ofensif terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Hezbollah yang telah menjadi bagian dari pemerintahnya. Usaha Israel untuk memisahkan antara para pejuang resistensi Hezbollah dengan anggotanya yang berperan dalam perpolitikan Lebanon pun dapat dikatakan tidak memungkinkan, karena jelas dinyatakan oleh Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, bahwa perjuangan Hezbollah secara militer dan secara politik tidak pernah terpisah. Setiap anggota resistensi Hezbollah adalah seorang pejuang politik, dan tiap politikusnya merupakan seorang pejuang resistensi, sehingga hal tersebut akan sangat tidak mungkin untuk dibedakan dan dipilah-pilah¹²⁵. Apabila Israel memutuskan untuk menghancurkan Hezbollah, maka kali ini Israel harus menghancurkan sebuah negara, sebuah hal yang memiliki kemungkinan sangat kecil, mengingat bahwa komunitas internasional telah memberikan begitu banyak peringatan kepada Israel atas pelanggaran-pelanggaran humaniternya selama ini.

Dipengaruhi oleh Iran yang menekankan tujuannya untuk menyebarkan fundamentalisme Islam dan kebangkitan Shi'ah, Palestina yang terus mengalami opresi dan penyerangan dari Israel dan terus berjuang untuk memperoleh perdamaian, serta Amerika Serikat yang mendukung Israel secara penuh dan memiliki pengaruh yang semakin berkurang pada Koalisi 14 Maret, Hezbollah terus memberikan usulan dan pengaruh terhadap perumusan kebijakan luar negeri Lebanon terhadap Israel. Kebijakan luar negeri ini akan cenderung bersifat ofensif, mengingat bahwa Hezbollah tidak pernah mengusahakan sebuah jalan negosiasi atau diplomasi dengan Israel, dan persenjataan Hezbollah terus meningkat setiap tahunnya, dan yang terakhir adalah bahwa tujuan akhir dari Hezbollah bukanlah perdamaian dengan Israel, melainkan kehancuran Israel dari kawasan Timur Tengah.

Berbagai resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, khususnya yang berhubungan dengan perdamaian antara Israel dengan Hezbollah, serta pembubaran semua kekuatan militer *sub-state* yang terdapat di dalam Lebanon, termasuk Hezbollah. Namun jelas bahwa Hezbollah tidak akan membubarkan diri ataupun menyerahkan senjatanya, karena bagi organisasi ini, tujuan akhir mereka

¹²⁵ Norton, *Hezbollah, Op. Cit.*, hlm 89-93.

belum tercapai. Hisbullah yang telah terintegrasi dalam pemerintah Lebanon telah menyatakan setuju untuk mempertahankan *status quo* di mana tidak ada penyerangan frontal yang akan diluncurkan terhadap Israel, meskipun persenjataannya siap untuk diarahkan kepada Israel kapan pun. Kebijakan luar negeri Lebanon dapat dikatakan cenderung tetap anti-Israel, di mana Hisbullah diberikan posisi penting dalam kabinetnya, baik dalam bidang militer maupun politik.

Secara militer, Hisbullah mengontrol 40 persen pasukan militer Lebanon khususnya yang berasal dari kelompok Shi'ah dan Maronit, dan pasukan ini siap untuk membantu Hisbullah dalam melakukan resistensi terhadap Israel. Persenjataan Hisbullah juga siap untuk digunakan oleh pasukan Lebanon apabila diperlukan dalam menghadapi Israel. Dari segi politik, Hisbullah memegang kursi Menteri Telekomunikasi yang mampu mengontrol jaringan komunikasi Hisbullah kepada Iran dan Suriah, serta Menteri Pengembangan Energi yang mampu memenuhi kebutuhan sumber daya Hisbullah, khususnya dalam bidang finansial. Pemerintah Lebanon sendiri menyatakan bahwa Hisbullah memegang peranan penting dalam mempertahankan stabilitas domestik, memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat Lebanon, serta mempertahankan stabilitas regional dengan Israel, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikutsertakan Hisbullah dalam pemerintahan ataupun membubarkan Hisbullah. Hubungan diplomatik dengan Israel hingga saat ini belum dilakukan kembali, dan kemungkinan untuk terciptanya hubungan yang harmonis di antara kedua negara ini sangat kecil, mengingat bahwa isu Palestina masih terus memanas, dan Hisbullah terus mendukung Palestina untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Fawaz, Mona M. (2000, March). *Agency and Ideology in the Service Provision of Islamic Organizations in the Southern Suburb of Beirut, Lebanon*. Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi UNESCO mengenai NGO dan Pemerintahan di Negara-negara Arab, Kairo, Mesir.
- Firestone, Rueven. (1999). *Jihad: The Origin of Holy War in Islam*. London: Oxford University Press.
- Hamzeh, Ahmed Nizar. (2004). *In The Path of Hizbullah*. New York: Syracuse University Press.
- Harik, Judith Palmer. (2007). *Hezbollah: The Changing Face of Terrorism*. London: I. B. Tauris & Co. Ltd.
- Holsti, K. J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis*. (6th ed). New Jersey: Prentice Hall.
- Krayem, Hassan. (2009). Lebanon Confessionalism and the Crisis of Democracy” Dalam Barry A. Kosmin & Ariela Keysar. *Secularism, Women & the State: The Mediterranean World in the 21st Century*. Hartford: ISSSC-Trinity College.
- Najem, Tom Pierre. (2005). Lebanon and Europe: The Foreign Policy of a Penetrated State. Dalam Gerd Nonneman (Ed.). *Analysing Middle East Foreign Policies and the Relationship with Europe*. London: Routledge.
- Neuman, Lawrence. (2003). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach* (4th ed). Boston: Allyn and Bacon.
- Norton, Augustus R. (1987). *Amal and the Shi'a: Struggle for the Soul of Lebanon*. Austin: University of Texas Press.
- Norton, Augustus R. (2007). *Hezbollah: A Short History*. New Jersey: Princeton Univ. Press.
- Shanahan, Rodger. (2005). *The Shi'a of Lebanon: Clans, Parties, and Clerics*. London: I. B. Tauris & Co. Ltd.
- Webber, Mark & Smith, Michael. (2002). *Foreign Policy in a Transformed World*. Harlow: Prentice Hall.

Artikel Jurnal

- Arif, Yasmeeen. (2008, September 3). Religion and Rehabilitation: Humanitarian Biopolitics, City Spaces and Acts of Religion. *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 32.

- Bahgat, Gawdat. (2007). Iran and the United States: The Emerging Security Paradigm in the Middle East. *Parameters*.
- Dombret, Dimitri. (2009, June 11). The Lebanese Elections: The Defeat of Hezbollah – Is This a New Turn of Events for the Land of Cedars? *ESISC Analysis*.
- Fayyad, Ali. (2006, August). Hezbollah and the Lebanese State: Reconciling a National Strategy with a Regional Role. *Arab Reform Brief – Arab Reform Initiative*, No. 11.
- Fearon, James D. & Laitin, David D. (2003, February). Ethnicity, Insurgency, and Civil War. *The American Political Science Review*, Vol. 97, No. 1.
- Flanigan, Shawn Teresa. (2008, June 6). Nonprofit Service Provision by Insurgent Organizations: The Cases of Hizballah and the Tamil Tigers. *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31.
- Irani, George Emile. (2006). After the Lebanon War: *Quo Vadis* the Middle East. *Real Instituto Elcano*, Area: Mediterranean & Arab World – ARI 94.
- Islamic Health Society. (2005). *Islamic Health Society Journal - 21 years promoting Health Services*, Beirut: Islamic Health Society.
- Jagers, Keith. (1992, April). War and the Three Faces of Power: War Making and State Making in Europe and the Americas. *Comparative Political Studies*, Vol. 25, No.1.
- Jansen, Jaime. (2006, July). Lebanon claims Israel using banned weapons against civilians. *Chase Newsburst, Jurist Legal News & Research*, University of Pittsburgh School of Law.
- Menashri, David. (2006, August 20). After the War in Lebanon: Iranian Might and Its Imitations. *Iran-Pulse*, Center for Iranian Studies, No.2.
- Murden, Simon. (2000, May). Understanding Israel's Long Conflict in Lebanon: The Search for an Alternative Approach to Security during the Peace Process. *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 27, No. 1.
- Norton, Augustus R. (2007, December). The Role of Hezbollah in Lebanon Domestic Politics. *The International Spectator*, Vol. 42, No. 4.
- Prados, Alfred B. (2006, March 16). Lebanon: Update. *CRS Issue Brief for Congress*.
- Pressman, Jeremy. (2006, November). The United States and the Israel-Hezbollah War. *Middle East Brief*, The Crown Center for Middle East Studies of Brandeis University, No. 13.
- Tur, Ozlem. (2007). The Lebanese War of 2006: Reasons and Consequences. *Perceptions*.
- Turedi, Almula. (2008). Lebanon: At the Edge of Another Civil War. *Perceptions*.
- Usher, Graham. (1997). Hezbollah, Syria, and the Lebanese Elections. *Journal of Palestine Studies*, Vol.26, No.2.

Zunes, Stephen. (2006, August 9). Why the Dems Have Failed Lebanon. *FPIF Commentary*, Silver City, NM and Washington, DC: Foreign Policy In Focus.

Artikel Internet

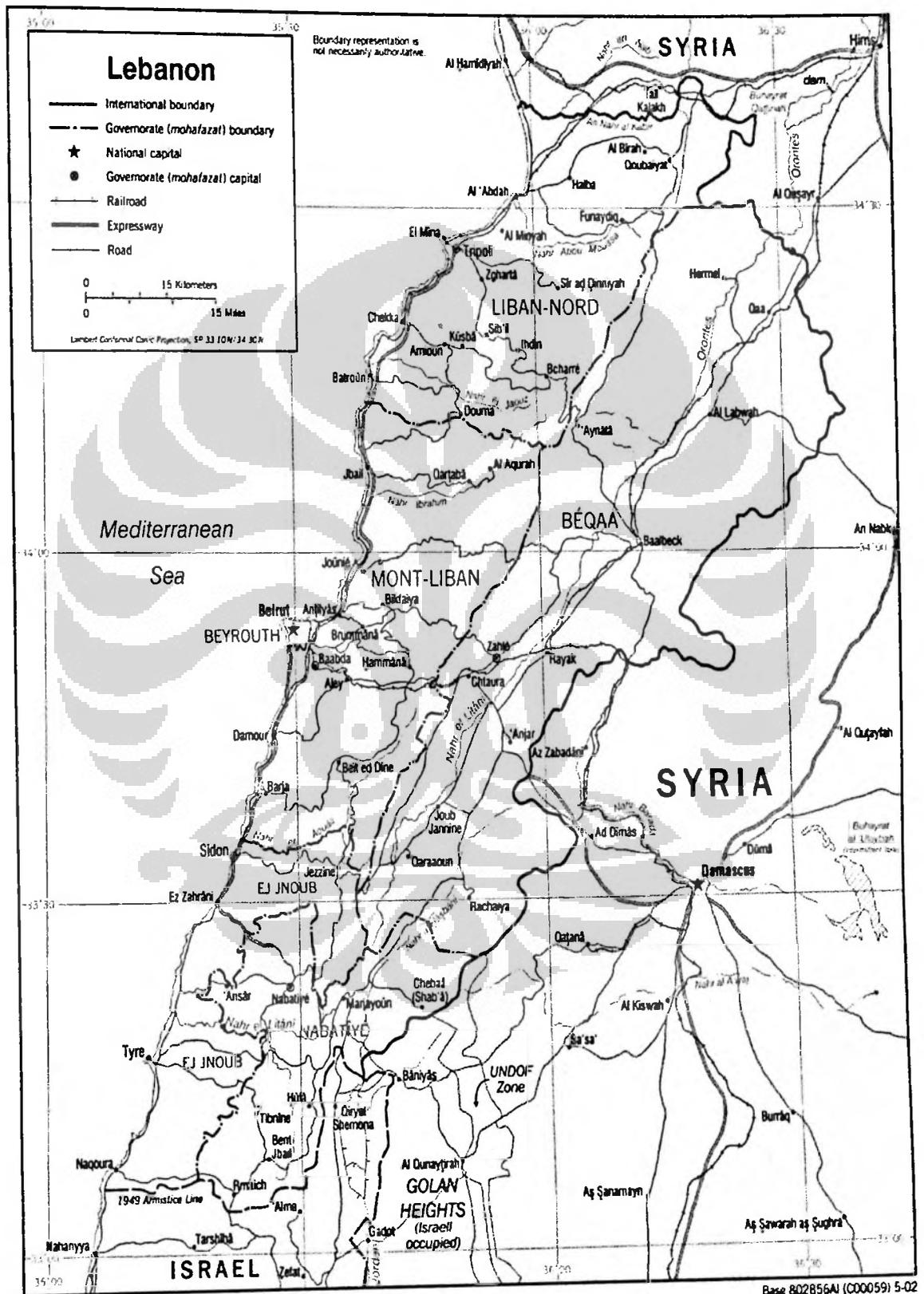
- Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). White Phosphorus: Health Effects. *Toxicological Profile Information Sheet*.
<http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/index.html>
- Bazzi, Mohamad. (2009, September 11). Lebanon's Shadow Government: How Hezbollah wins by losing. *Foreign Affairs Snapshot*.
<http://www.foreignaffairs.com/articles/65405/mohamad-bazzi/lebanon%E2%80%99s-shadow-government>
- Byman, Daniel. (2005, March). Lebanon's Hidden Dangers. Foreign Policy Web Exclusive. http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=2815
- Chadwick, Alex. (2009, July 27). Hezbollah's Role in Lebanon's Government – Interview with Amal Saad Ghorayeb. <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5554992>
- Dakroub, Hussein. (2009, November 9). Lebanon Premier unveils new Cabinet with Hezbollah. *Antiwar Newswire*.
<http://wire.antiwar.com/2009/11/09/lebanon-premier-unveils-new-cabinet-with-hezbollah-2/>
- Gardner, Frank. (2008, August 3). Hezbollah Missile Threat Assessed. *BBC News*.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5242566.stm#rocket
- Harb, Imad. (2006, March). Lebanon's Confessionalism: Problems and Prospects. *USIPeace Briefing*. <http://www.usip.org/resources/lebanons-confessionalism-problems-and-prospects>
- Hezbollah's clout in Cabinet grows. (2008, August 13). *The Los Angeles Times*.
<http://articles.latimes.com/2008/aug/13/world/fg-briefs13.S2>
- Kifner, Joe. (2006, August 16). Hezbollah Leads Work to Rebuild, Gaining Stature. *The New York Times*.
http://www.nytimes.com/2006/08/16/world/middleeast/16hezbollah.html?_r=1
- Lebanon – Foreign Policy. (2005). *Encyclopedia of the Nations*.
<http://www.nationsencyclopedia.com/World-Leaders-2005/Lebanon-FOREIGN-POLICY.html>
- Lebanon Military Strength. (2008). *Global Fire Power*.
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Lebanon
- Nawash, Kamal. (n.d.). Israel/Palestine and Terrorism. http://www.crescentlife.com/heal%20the%20world/israel_palestine_&_terrorism.htm
- Pan, Esther. (2005, June 20). Lebanon: Election Results. *Council on Foreign Relations*. <http://www.cfr.org/publication/8195/lebanon.html>

- Roth, Ariel Ilan. (n.d.). The Root Of All Fears: Why is Israel do Afraid of Iranian Nukes? *Council on Foreign Relations Snapshots*. <http://www.foreignaffairs.com/articles/65692/ariel-ilan-roth/the-root-of-all-fears>
- Saleh, Elizabeth. (2006, November). Chronology of Israeli attacks on Lebanon. *Arab Media Watch*. <http://www.arabmediawatch.com/amw/Default.aspx?tabid=352>
- Seven Questions: What Iran Wants. (2008, July). *Foreign Policy Web Exclusive*. <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=20293>
- STRATFOR. (2009, August 7). Lebanon: Hezbollah's Control over the Military. *Reform Party of Syria*. <http://reformsyria.org/intelligence/regime-against-others/3183-lebanon-hezbollahs-control-over-the-military.html>
- Tavernise, Sabrina. (2006, August 6). Charity Wins Deep Loyalty for Hezbollah. *The New York Times*. http://www.nytimes.com/2006/08/06/world/middleeast/16charity.html?_r=1
- Timeline: Lebanon – A Chronology of Key Events. (n.d.). http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/819200.stm
- Lebanon's Government Accommodates Hezbollah. (2009, June 19). *The Trumpet*. <http://www.thetrumpet.com/index.php?q=6282.4722.0.0>
- Vibert, Patrick. Three Years Since 2006 War. *Lebanon World Affairs Network*. <http://lebanon.foreignpolicyblogs.com/2009/07/11/three-years-since-2006-war/>
- Yerenian, Edward. Lebanese Cabinet Approves Policy Statement. *The Voice of America News*. www.voanews.com/english/2008-08-05-voa9.cfm

Sumber Lain

- Hamilton, Christopher D. (2006, September 28). *Hezbollah's Global Reach*. Testimoni dalam Hearing of the House Committee on International Relations.
- MIPT. (2006). *Terrorism Knowledge Database Group Profile: Hezbollah*. Oklahoma City: Memorial Institute for the Prevention of Terrorism.
- Near East Consulting. (2006, August 7). *Palestinian Perceptions towards Politics, Peace, and the Conflict in the Lebanon*. NEC Release.

Peta Lebanon



THE TAIF AGREEMENT

First, General Principles and Reforms:

I. General Principles:

- A. Lebanon is a sovereign, free, and independent country and a final homeland for all its citizens.
- B. Lebanon is Arab in belonging and identity. It is an active and founding member of the Arab League and is committed to the league's charter. It is an active and founding member of the United Nations Organization and is committed to its charters. Lebanon is a member of the nonaligned movement. The state of Lebanon shall embody these principles in all areas and spheres, without exception.
- C. Lebanon is a democratic parliamentary republic founded on respect for public liberties, especially the freedom of expression and belief, on social justice, and on equality in rights and duties among all citizens, without discrimination or preference.
- D. The people are the source of authority. They are sovereign and they shall exercise their sovereignty through the constitutional institutions.
- E. The economic system is a free system that guarantees individual initiative and private ownership.
- F. Culturally, socially, and economically-balanced development is a mainstay of the state's unity and of the system's stability.
- G. Efforts (will be made) to achieve comprehensive social justice through fiscal, economic, and social reform.
- H. Lebanon's soil is united and it belongs to all the Lebanese. Every Lebanese is entitled to live in and enjoy any part of the country under the supremacy of the law. The people may not be categorized on the basis of any affiliation whatsoever and there shall be no fragmentation, no partition, and no repatriation [of Palestinians in Lebanon].
- I. No authority violating the common co-existence charter shall be legitimate

II. Political Reforms:

- A. Chamber of Deputies: The Chamber of Deputies is the legislative authority which exercises full control over government policy and activities.
 1. The Chamber spokesman and his deputy shall be elected for the duration of the chamber's term.
 2. In the first session, two years after it elects its speaker and deputy speaker, the chamber may vote only once to withdraw confidence from its speaker or deputy speaker with a 2/3 majority of its members and in accordance with a petition submitted by at least 10 deputies. In case confidence is withdrawn, the chamber shall convene immediately to fill the vacant post.

3. No urgent bill presented to the Chamber of Deputies may be issued unless it is included in the agenda of a public session and read in such a session, and unless the grace period stipulated by the constitution passes without a resolution on such a bill with the approval of the cabinet.
 4. The electoral district shall be the governorate.
 5. Until the Chamber of Deputies passes an election law free of sectarian restriction, the parliamentary seats shall be divided according to the following bases:
 - a. Equally between Christians and Muslims.
 - b. Proportionately between the denominations of each sect.
 - c. Proportionately between the districts.
 6. The number of members of the Chamber of Deputies shall be increased to 108, shared equally between Christians and Muslims. As for the districts created on the basis of this document and the districts whose seats became vacant prior to the proclamation of this document, their seats shall be filled only once on an emergency basis through appointment by the national accord government that is planned to be formed.
 7. With the election of the first Chamber of Deputies on a national, not sectarian, basis, a senate shall be formed and all the spiritual families shall be represented in it. The senate powers shall be confined to crucial issues.
- B. President of Republic: The president of republic is the head of the state and a symbol of the country's unity. He shall contribute to enhancing the constitution and to preserving Lebanon's independence, unity, and territorial integrity in accordance with the provisions of the constitution. He is the supreme commander of the armed forces which are subject to the power of the cabinet. The president shall exercise the following powers:
1. Head the cabinet [meeting] whenever he wishes, but without voting.
 2. Head the Supreme Defense Council.
 3. Issues decrees and demand their publication. He shall also be entitled to ask the cabinet to reconsider any resolution it makes within 15 days of the date of deposition of the resolution with the presidential office. Should the cabinet insist on the adopted resolution, or should the grace period pass without issuing and returning the decree, the decree of the resolution shall be valid and must be published.
 4. Promulgate laws in accordance with the grace period stipulated by the constitution and demand their publication upon ratification by the Chamber of Deputies. After notifying the cabinet, the president may also request reexamination of the laws within the grace periods provided by the constitution, and in accordance with the articles of the constitution. In case the laws are not issued or returned before the end of the grace periods, they shall be valid by law and they must be published.

5. Refer the bills presented to him by the Chamber of Deputies.
 6. Name the prime minister-designate in consultation with the Chamber of Deputies speaker on the basis of binding parliamentary consultation, the outcome of which the president shall officially familiarize the speaker on.
 7. Issue the decree appointing the prime minister independently.
 8. On agreement with the prime minister, issue the decree forming the cabinet.
 9. Issue decrees accepting the resignation of the cabinet or of cabinet ministers and decrees relieving them from their duties.
 10. Appoint ambassadors, accept the accreditation of ambassadors, and award state medals by decree.
 11. On agreement with the prime minister, negotiate on the conclusion and signing of international treaties which shall become valid only upon approval by the cabinet. The cabinet shall familiarize the Chamber of Deputies with such treaties when the country's interest and state safety make such familiarization possible. As for treaties involving conditions concerning state finances, trade treaties, and other treaties, which may not be abrogated annually, they may not be concluded without Chamber of Deputies' approval.
 12. When the need arises, address messages to the Chamber of Deputies.
 13. On agreement with the prime minister, summon the Chamber of Deputies to hold special sessions by decree.
 14. The president of the republic is entitled to present to the cabinet any urgent issue beyond the agenda.
 15. On agreement with the prime minister, call the cabinet to hold a special session whenever he deems it necessary.
 16. Grant special pardon by decree.
 17. In the performance of his duty, the president shall not be liable unless he violates the constitution or commits high treason.
- C. Prime Minister: The prime minister is the head of the government. He represents it and speaks in its name. He is responsible for implementing the general policy drafted by the cabinet. The prime minister shall exercise the following powers:
1. Head the cabinet.
 2. Hold parliamentary consultations to form the cabinet and co-sign with the president the decree forming it. The cabinet shall submit its cabinet statement to the Chamber of Deputies for a vote of confidence within 30 days [of its formation]. The cabinet may not exercise its powers before gaining the confidence, after its resignation, or when it is considered retired, except within the narrow sense of disposing of affairs.

3. Present the government's general policy to the Chamber of Deputies.
 4. Sign all decrees, except for decrees naming the prime minister and decrees accepting cabinet resignation or considering it retired.
 5. Sign the decree calling for a special session and decrees issuing laws and requesting the reexamination of laws.
 6. Summon the cabinet to meet, draft its agenda, familiarize the president of the republic in advance with the issues included in the agenda and with the urgent issues to be discussed, and sign the usual session minutes.
 7. Observe the activities of the public departments and institutions, coordinate between the ministers, and issue general instructions to ensure the smooth progress of work.
 8. Hold working sessions with the state agencies concerned in the presence of the minister concerned.
 9. By law, act as the Supreme Defense Council's deputy chairman.
- D. Cabinet:
- [No item 1. as published]
2. Watch over the implementation of laws and regulations and supervise the activities of all the state agencies without exception, including the civilian, military, and security departments and institutions.
 3. The cabinet is the authority which controls the armed forces.
 4. Appoint, dismiss, and accept the resignation of state employees in accordance with the law.
 5. It has the right to dissolve the Chamber of Deputies at the request of the president of the republic if the chamber refuses to meet throughout an ordinary or a special session lasting no less than one month, even though it is summoned twice consecutively, or if the chamber sends back the budget in its entirety with the purpose of paralyzing the government. This right may not be exercised again for the same reasons which called for dissolving the chamber in the first instance.
 6. When the president of the republic is present, he heads cabinet sessions. The cabinet shall meet periodically at special headquarters. The legal quorum for a cabinet meeting is 2/3 the cabinet members. The cabinet shall adopt its resolutions by consent. If impossible then by vote. The resolutions shall be adopted by a majority of the members present. As for major issues, they require the approval of 2/3 the cabinet members. The following shall be considered major issues: The state of emergency and its abolition, war and peace, general mobilization, international agreements and treaties, the state's general budget, comprehensive and long-term development plans, the appointment of top-level civil servants or their equivalent, reexamination of the administrative division, dissolving the Chamber of Deputies, the election law, the

citizenship law, the personal status laws, and the dismissal of cabinet ministers.

- E. Minister: The minister's powers shall be reinforced in a manner compatible with the government's general policy and with the principle of collective responsibility. A minister shall not be relieved from his position unless by cabinet decree or unless the Chamber of Deputies withdraws its confidence from him individually.
- F. Cabinet Resignation, Considering Cabinet Retired, and Dismissal of Ministers:
1. The cabinet shall be considered retired in the following cases:
 - a. If its chairman resigns.
 - b. If it loses more than 1/3 of its members as determined by the decree forming it.
 - c. If its chairman dies.
 - d. At the beginning of a president's term.
 - e. At the beginning of the Chamber of Deputies' term.
 - f. When the Chamber of Deputies withdraws its confidence from it on an initiative by the chamber itself and on the basis of a vote of confidence.
 2. A minister shall be relieved by a decree signed by the president of the republic and the prime minister, with cabinet approval.
 3. When the cabinet resigns or is considered retired, the Chamber of Deputies shall, by law, be considered to be convened in a special session until a new cabinet is formed. A vote-of-confidence session shall follow.
- G. Abolition of Political Sectarianism: Abolishing political sectarianism is a fundamental national objective. To achieve it, it is required that efforts be made in accordance with a phased plan. The Chamber of Deputies elected on the basis of equal sharing by Christians and Muslims shall adopt the proper measures to achieve this objective and to form a national council which is headed by the president of the republic and which includes, in addition to the prime minister and the Chamber of Deputies speaker, political, intellectual, and social notables. The council's task will be to examine and propose the means capable of abolishing sectarianism, to present them to the Chamber of Deputies and the cabinet, and to observe implementation of the phased plan. The following shall be done in the interim period:
1. Abolish the sectarian representation base and rely on capability and specialization in public jobs, the judiciary, the military, security, public, and joint institutions, and in the independent agencies in accordance with the dictates of national accord, excluding the top-level jobs and equivalent jobs which shall be shared equally by Christians and Muslims without allocating any particular job to any sect.
 2. Abolish the mention of sect and denomination on the identity card.

III. Other Reforms:

A. Administrative Decentralism:

1. The State of Lebanon shall be a single and united state with a strong central authority.
2. The powers of the governors and district administrative officers shall be expanded and all state administrations shall be represented in the administrative provinces at the highest level possible so as to facilitate serving the citizens and meeting their needs locally.
3. The administrative division shall be recognized in a manner that emphasizes national fusion within the framework of preserving common coexistence and unity of the soil, people, and institutions.
4. Expanded administrative decentralization shall be adopted at the level of the smaller administrative units [district and smaller units] through the election of a council, headed by the district officer, in every district, to ensure local participation.
5. A comprehensive and unified development plan capable of developing the provinces economically and socially shall be adopted and the resources of the municipalities, unified municipalities, and municipal unions shall be reinforced with the necessary financial resources.

B. Courts:

1. To guarantee that all officials and citizens are subject to the supremacy of the law and to insure harmony between the action of the legislative and executive authorities on the one hand, and the givens of common coexistence and the basic rights of the Lebanese as stipulated in the constitution on the other hand:
 - a. The higher council which is stipulated by the constitution and whose task it is to try presidents and ministers shall be formed. A special law on the rules of trial before this council shall be promulgated.
 - b. A constitutional council shall be created to interpret the constitution, to observe the constitutionality of the laws, and to settle disputes and contests emanating from presidential and parliamentary elections.
 - c. The following authorities shall be entitled to revise the constitutional council in matters pertaining to interpreting the constitution and observing the constitutionality of the laws:
 1. The president of the republic.
 2. The Chamber of Deputies speaker.
 3. The prime minister.
 4. A certain percentage of members of the Chamber of Deputies.
2. To ensure the principle of harmony between religion and state, the heads of the Lebanese sects may revise the constitutional council in matters pertaining to:
 - a. Personal status affairs.

- b. Freedom of religion and the practice of religious rites.
 - c. Freedom of religious education.
- C. To ensure the judiciary's independence, a certain number of the Higher Judiciary Council shall be elected by the judiciary body.
- D. Parliamentary Election Law: Parliamentary elections shall be held in accordance with a new law on the basis of provinces and in the light of rules that guarantee common coexistence between the Lebanese, and that ensure the sound and efficient political representation of all the people's factions and generations. This shall be done after reviewing the administrative division within the context of unity of the people, the land, and the institutions.
- E. Creation of a socioeconomic council for development: A socioeconomic council shall be created to insure that representatives of the various sectors participate in drafting the state's socioeconomic policy and providing advice and proposals.
- F. Education:
1. Education shall be provided to all and shall be made obligatory for the elementary stage at least.
 2. The freedom of education shall be emphasized in accordance with general laws and regulations.
 3. Private education shall be protected and state control over private schools and textbooks shall be strengthened.
 4. Official, vocational, and technological education shall be reformed, strengthened, and developed in a manner that meets the country's development and reconstruction needs. The conditions of the Lebanese University shall be reformed and aid shall be provided to the university, especially to its technical colleges.
 5. The curricula shall be reviewed and developed in a manner that strengthens national belonging, fusion, spiritual and cultural openness, and that unifies textbooks on the subjects of history and national education.
- G. Information: All the information media shall be reorganized under the canopy of the law and within the framework of responsible liberties that serve the cautious tendencies and the objective of ending the state of war.

Second, spreading the sovereignty of the State of Lebanon over all Lebanese territories:

Considering that all Lebanese factions have agreed to the establishment of a strong state founded on the basis of national accord, the national accord government shall draft a detailed one-year plan whose objective is to spread the sovereignty of the State of Lebanon over all Lebanese territories gradually with the state's own forces. The broad lines of the plan shall be as follows:

- A. Disbanding of all Lebanese and non-Lebanese militias shall be announced. The militias' weapons shall be delivered to the State of Lebanon within a period of 6 months, beginning with the approval of the national accord charter. The president of the republic shall be elected. A national accord cabinet shall be formed, and the political reforms shall be approved constitutionally.
- B. The internal security forces shall be strengthened through:
1. Opening the door of voluntarism to all the Lebanese without exception, beginning the training of volunteers centrally, distributing the volunteers to the units in the governorates, and subjecting them to organized periodic training courses.
 2. Strengthening the security agency to insure control over the entry and departure of individuals into and out of the country by land, air, and sea.
- C. Strengthening the armed forces:
1. The fundamental task of the armed forces is to defend the homeland, and if necessary, protect public order when the danger exceeds the capability of the internal security forces to deal with such a danger on their own.
 2. The armed forces shall be used to support the internal security forces in preserving security under conditions determined by the cabinet.
 3. The armed forces shall be unified, prepared, and trained in order that they may be able to shoulder their national responsibilities in confronting Israeli aggression.
 4. When the internal security forces become ready to assume their security tasks, the armed forces shall return to their barracks.
 5. The armed forces intelligence shall be reorganized to serve military objectives exclusively.
- D. The problem of the Lebanese evacuees shall be solved fundamentally, and the right of every Lebanese evicted since 1975 to return to the place from which he was evicted shall be established. Legislation to guarantee this right and to insure the means of reconstruction shall be issued. Considering that the objective of the State of Lebanon is to spread its authority over all the Lebanese territories through its own forces, represented primarily by the internal security forces, and in view of the fraternal relations binding Syria to Lebanon, the Syrian forces shall thankfully assist the forces of the legitimate Lebanese government to spread the authority of the State of Lebanon within a set period of no more than 2 years, beginning with ratification of the national accord charter, election of the president of the republic, formation of the national accord cabinet, and approval of the political reforms constitutionally. At the end of this period, the two governments -- the Syrian Government and the Lebanese National Accord Government -- shall decide to redeploy the Syrian forces in Al-Biq'a area from Dahr al-Baydar to the Hammana-al-Madayrij-'Ayn Darah line, and if necessary, at other points to be determined by a joint Lebanese-Syrian military committee. An agreement shall also be concluded by the two governments to determine the strength and duration of the presence of Syrian forces in the above-mentioned area and to define these

forces' relationship with the Lebanese state authorities where the forces exist. The Arab Tripartite Committee is prepared to assist the two states, if they so wish, to develop this agreement.

Third, liberating Lebanon from the Israeli occupation:

Regaining state authority over the territories extending to the internationally-recognized Lebanese borders requires the following:

- A. Efforts to implement resolution 425 and the other UN Security Council resolutions calling for fully eliminating the Israeli occupation.
- B. Adherence to the truce agreement concluded on 23 March 1949.
- C. Taking all the steps necessary to liberate all Lebanese territories from the Israeli occupation, to spread state sovereignty over all the territories, and to deploy the Lebanese army in the border area adjacent to Israel; and making efforts to reinforce the presence of the UN forces in South Lebanon to insure the Israeli withdrawal and to provide the opportunity for the return of security and stability to the border area.

Fourth, Lebanese-Syrian Relations:

Lebanon, with its Arab identity, is tied to all the Arab countries by true fraternal relations. Between Lebanon and Syria there is a special relationship that derives its strength from the roots of blood relationships, history, and joint fraternal interests. This is the concept on which the two countries' coordination and cooperation is founded, and which will be embodied by the agreements between the two countries in all areas, in a manner that accomplishes the two fraternal countries' interests within the framework of the sovereignty and independence of each of them. Therefore, and because strengthening the bases of security creates the climate needed to develop these bonds, Lebanon should not be allowed to constitute a source of threat to Syria's security, and Syria should not be allowed to constitute a source of threat to Lebanon's security under any circumstances. Consequently, Lebanon should not allow itself to become a pathway or a base for any force, state, or organization seeking to undermine its security or Syria's security. Syria, which is eager for Lebanon's security, independence, and unity and for harmony among its citizens, should not permit any act that poses a threat to Lebanon's security, independence, and sovereignty.

United Nations
Security Council

S/RES/1559 (2004)

Distr.: General
2 September, 2004

Resolution 1559 (2004)

The Security Council,

Recalling all its previous resolutions on Lebanon, in particular resolutions 425 (1978) and 426 (1978) of 19 March 1978, resolution 520 (1982) of 17 September 1982, and resolution 1553 (2004) of 29 July 2004 as well as the statements of its President on the situation in Lebanon, in particular the statement of 18 June 2000 (S/PRST/2000/21),

Reiterating its strong support for the territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon within its internationally territorially recognized borders,

Noting the determination of Lebanon to ensure the withdrawal of all non-Lebanese forces from Lebanon,

Gravely concerned at the continued presence of armed militias in Lebanon, which prevent the Lebanese government from exercising its full sovereignty over all Lebanese territory,

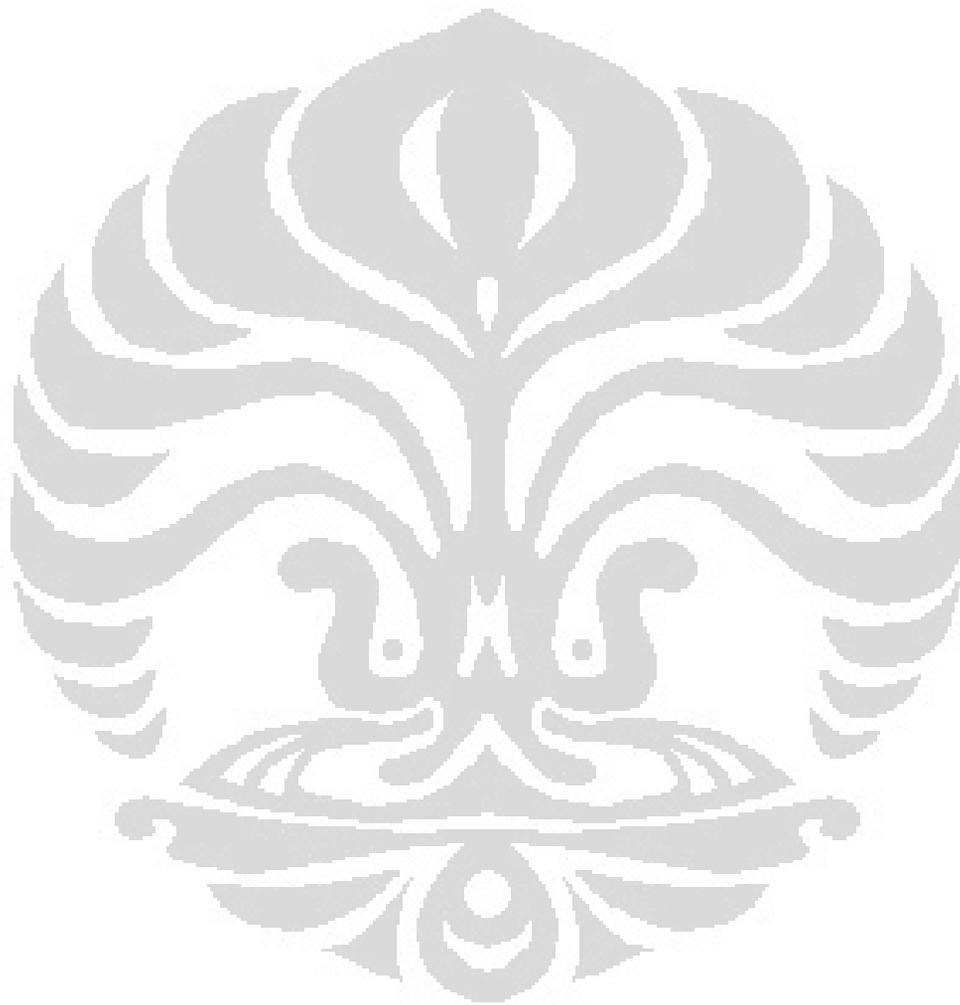
Reaffirming the importance of the extension of the control of the Government of Lebanon over all Lebanese territory,

Mindful of the upcoming Lebanese presidential elections and underlining the importance of free and fair elections according to Lebanese constitutional rules devised without foreign interference or influence,

1. Reaffirms its call for the strict respect of the sovereignty, territorial integrity, unity, and political independence of Lebanon under the sole and exclusive authority of the Government of Lebanon throughout Lebanon;
2. Calls upon all remaining foreign forces to withdraw from Lebanon;
3. Calls for the disbanding and disarmament of all Lebanese and non-Lebanese militias;
4. Supports the extension of the control of the Government of Lebanon over all Lebanese territory;
5. Declares its support for a free and fair electoral process in Lebanon's upcoming presidential election conducted according to Lebanese constitutional rules devised without foreign interference or influence;

6. Calls upon all parties concerned to cooperate fully and urgently with the Security Council for the full implementation of this and all relevant resolutions concerning the restoration of the territorial integrity, full sovereignty, and political independence of Lebanon;

7. Requests that the Secretary-General report to the Security Council within thirty days on the implementation by the parties of this resolution and decides to remain actively seized of this matter.



United Nations
Security Council

S/RES/1701 (2006)

Distr.: General
11 August, 2006

Resolution 1701 (2006)

The Security Council,

Recalling all its previous resolutions on Lebanon, in particular resolutions 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006), 1680 (2006) and 1697 (2006), as well as the statements of its president on the situation in Lebanon, in particular the statements of 18 June, 2000, of 19 October, 2004, of 4 May 2005, of 23 January 2006 and of 30 July 2006;

Expressing its utmost concern at the continuing escalation of hostilities in Lebanon and in Israel since Hezbollah's attack on Israel on 12 July 2006, which has already caused hundreds of deaths and injuries on both sides, extensive damage to civilian infrastructure and hundreds of thousands of internally displaced persons;

Emphasizing the need for an end of violence, but at the same time emphasizing the need to address urgently the causes that have given rise to the current crisis, including by the unconditional release of the abducted Israeli soldiers;

Mindful of the sensitivity of the issue of prisoners and encouraging the efforts aimed at urgently settling the issue of the Lebanese prisoners detained in Israel;

Welcoming the efforts of the Lebanese prime minister and the commitment of the government of Lebanon, in its seven-point plan, to extend its authority over its territory, through its own legitimate armed forces, such that there will be no weapons without the consent of the government of Lebanon and no authority other than that of the government of Lebanon, welcoming also its commitment to a UN force that is supplemented and enhanced in numbers, equipment, mandate and scope of operation, and bearing in mind its request in this plan for an immediate withdrawal of the Israeli forces from southern Lebanon;

Determined to act for this withdrawal to happen at the earliest;

Taking due note of the proposals made in the seven-point plan regarding the Shebaa Farms area;

Welcoming the unanimous decision by the government of Lebanon on 7 August 2006 to deploy a Lebanese armed force of 15,000 troops in south Lebanon as the Israeli army withdraws behind the Blue Line and to request the assistance of additional forces from UNIFIL as needed, to facilitate the entry of the Lebanese armed forces into the region and to restate its intention to strengthen the Lebanese armed forces with material as needed to enable it to perform its duties;

Aware of its responsibilities to help secure a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict;

Determining that the situation in Lebanon constitutes a threat to international peace and security;

1. Calls for a full cessation of hostilities based upon, in particular, the immediate cessation by Hezbollah of all attacks and the immediate cessation by Israel of all offensive military operations;
2. Upon full cessation of hostilities, calls upon the government of Lebanon and UNIFIL as authorized by paragraph 11 to deploy their forces together throughout the South and calls upon the government of Israel, as that deployment begins, to withdraw all of its forces from southern Lebanon in parallel;
3. Emphasizes the importance of the extension of the control of the government of Lebanon over all Lebanese territory in accordance with the provisions of resolution 1559 (2004) and resolution 1680 (2006), and of the relevant provisions of the Ta'if Accords, for it to exercise its full sovereignty, so that there will be no weapons without the consent of the government of Lebanon and no authority other than that of the government of Lebanon;
4. Reiterates its strong support for full respect for the Blue Line;
5. Also reiterates its strong support, as recalled in all its previous relevant resolutions, for the territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon within its internationally recognized borders, as contemplated by the Israeli-Lebanese General Armistice Agreement of 23 March 1949;
6. Calls on the international community to take immediate steps to extend its financial and humanitarian assistance to the Lebanese people, including through facilitating the safe return of displaced persons and, under the authority of the government of Lebanon, reopening airports and harbors, consistent with paragraphs 14 and 15, and calls on it also to consider further assistance in the future to contribute to the reconstruction and development of Lebanon;
7. Affirms that all parties are responsible for ensuring that no action is taken contrary to paragraph 1 that might adversely affect the search for a long-term solution, humanitarian access to civilian populations, including safe passage for humanitarian convoys, or the voluntary and safe return of displaced persons, and calls on all parties to comply with this responsibility and to cooperate with the Security Council;
8. Calls for Israel and Lebanon to support a permanent ceasefire and a long-term solution based on the following principles and elements:
 - Full respect for the Blue Line by both parties;

- security arrangements to prevent the resumption of hostilities, including the establishment between the Blue Line and the Litani river of an area free of any armed personnel, assets and weapons other than those of the government of Lebanon and of UNIFIL as authorised in paragraph 11, deployed in this area;
- Full implementation of the relevant provisions of the Taif Accords, and of resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), that require the disarmament of all armed groups in Lebanon, so that, pursuant to the Lebanese cabinet decision of July 27, 2006, there will be no weapons or authority in Lebanon other than that of the Lebanese state;
- No foreign forces in Lebanon without the consent of its government;
- No sales or supply of arms and related materiel to Lebanon except as authorized by its government;
- Provision to the United Nations of all remaining maps of land mines in Lebanon in Israel's possession;

9. Invites the secretary general to support efforts to secure as soon as possible agreements in principle from the government of Lebanon and the government of Israel to the principles and elements for a long-term solution as set forth in paragraph 8, and expresses its intention to be actively involved;

10. Requests the secretary general to develop, in liaison with relevant international actors and the concerned parties, proposals to implement the relevant provisions of the Ta'if Accords, and resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), including disarmament, and for delineation of the international borders of Lebanon, especially in those areas where the border is disputed or uncertain, including by dealing with the Shebaa Farms area, and to present to the Security Council those proposals within 30 days;

11. Decides, in order to supplement and enhance the force in numbers, equipment, mandate and scope of operations, to authorize an increase in the force strength of UNIFIL to a maximum of 15,000 troops, and that the force shall, in addition to carrying out its mandate under resolutions 425 and 426 (1978):

- a. Monitor the cessation of hostilities;
- b. Accompany and support the Lebanese armed forces as they deploy throughout the South, including along the Blue Line, as Israel withdraws its armed forces from Lebanon as provided in paragraph 2;
- c. Coordinate its activities related to paragraph 11 (b) with the government of Lebanon and the government of Israel;
- d. Extend its assistance to help ensure humanitarian access to civilian populations and the voluntary and safe return of displaced persons;
- e. Assist the Lebanese armed forces in taking steps towards the establishment of the area as referred to in paragraph 8;
- f. Assist the government of Lebanon, at its request, to implement paragraph 14;

12. Acting in support of a request from the government of Lebanon to deploy an international force to assist it to exercise its authority throughout the territory,

authorizes UNIFIL to take all necessary action in areas of deployment of its forces and as it deems within its capabilities, to ensure that its area of operations is not utilized for hostile activities of any kind, to resist attempts by forceful means to prevent it from discharging its duties under the mandate of the Security Council, and to protect United Nations personnel, facilities, installations and equipment, ensure the security and freedom of movement of United Nations personnel, humanitarian workers, and, without prejudice to the responsibility of the government of Lebanon, to protect civilians under imminent threat of physical violence;

13. Requests the secretary general urgently to put in place measures to ensure UNIFIL is able to carry out the functions envisaged in this resolution, urges member states to consider making appropriate contributions to UNIFIL and to respond positively to requests for assistance from the Force, and expresses its strong appreciation to those who have contributed to UNIFIL in the past;

14. Calls upon the government of Lebanon to secure its borders and other entry points to prevent the entry in Lebanon without its consent of arms or related materiel and requests UNIFIL as authorized in paragraph 11 to assist the government of Lebanon at its request;

15. Decides further that all states shall take the necessary measures to prevent, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft;

- a. the sale or supply to any entity or individual in Lebanon of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories, and;
- b. the provision to any entity or individual in Lebanon of any technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items listed in subparagraph (a) above, except that these prohibitions shall not apply to arms, related materiel, training or assistance authorised by the government of Lebanon or by Unifil as authorised in paragraph 11;

16. Decides to extend the mandate of UNIFIL until 31 August 2007, and expresses its intention to consider in a later resolution further enhancements to the mandate and other steps to contribute to the implementation of a permanent ceasefire and a long-term solution;

17. Requests the secretary general to report to the Council within one week on the implementation of this resolution and subsequently on a regular basis;

18. Stresses the importance of, and the need to achieve, a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, based on all its relevant resolutions including its resolutions 242 (1967) of 22 November 1967 and 338 (1973) of 22 October 1973;

19. Decides to remain actively seized of the matter.

Developments in Hezbollah Military Forces in Lebanon in 2004-2006

- Roughly 2,500-3,500 men, heavily dependent on part-time and irregular forces. Many are now highly experienced, often well-educated forces.
- Composed of a core of around 300 guerrillas. Has deliberately cut its force over the past years to prevent infiltration and leaks.
- Hezbollah fighters are old by comparison to Israeli fighters. Any age up to 35, usually married, often university students or professional men.
- Still seems to have Iranian Revolutionary Guards as advisors. Heavily supplied and financed by Iran, but Syrian personnel seem to be involved in training and in coordinating with Iran. Iranian and Syrian coordination of support for military supply and possibly operations of Hezbollah seems to occur at the general officer, deputy minister level.
- Conflicting intelligence reports estimate Iranian aid to Hezbollah to involve tens of million dollars a year.
- Equipped with APCs, artillery, multiple rocket launchers, mortars, anti-tank guided missiles (including AT-3 Sagger, AT-4 Spigot ATGMs, and captured TOWs), recoilless rifles, SA-7s, anti-aircraft guns.
- Guerrilla mortar strikes have improved in both accuracy and range, indicating better rangefinding systems, low signature weapons, and the use of mortar boosters that enable consistent hits for 2 to 3 miles.
- Supply of rockets is estimated to have risen to 1,000. These include Iranian produced 240mm rockets with a range of 40 km, according to Israeli intelligence reports. Most of the rockets are 120mm and 127mm variants with a maximum range of 22 km. Types include the Katyusha, Fajr 3/5, and Zelzal-2.
- Has great expertise in using improvised explosive devices like the improved radio detonated roadside bombs that proved effective against the Israelis. Some are disguised as large rocks. These rock-like explosives are reportedly produced in Iran.

Source: Various editions of the IISS Military Balance, US, British, Lebanese, and other experts